

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERANAN SUTAN SJAHRIR DALAM PEMERINTAHAN

INDONESIA (1945-1947)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan

Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

Bernarda Prihartanti

NIM: 051314006

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2010

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PERANAN SUTAN SJAHRIR DALAM PEMERINTAHAN
INDONESIA (1945-1947)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

Bernarda Prihartanti

NIM: 051314006

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2010

SKRIPSI

PERANAN SUTAN SJAHRIR DALAM PEMERINTAHAN
INDONESIA (1945-1947)

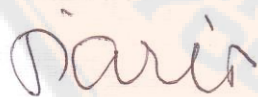
Oleh:

BERNARDA PRIHARTANTI

NIM: 051314006

Telah disetujui oleh:

Pembimbing:



Dr. Anton Haryono, M. Hum

Tanggal, 4 Januari 2010

SKRIPSI

PERANAN SUTAN SJAHRIR DALAM PEMERINTAHAN

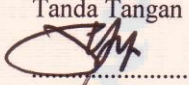
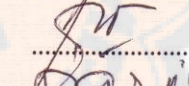
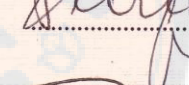
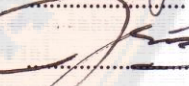
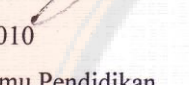
INDONESIA (1945-1947)

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
BERNARDA PRIHARTANTI

NIM: 051314006

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 30 Januari 2010
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

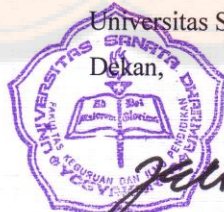
	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Yohanes Harsoyo, S.Pd, M.Si.	
Sekretaris	Drs. B. Musidi, M.Pd.	
Anggota	Dr. Anton Haryono, M. Hum.	
Anggota	Drs. A. A. Padi	
Anggota	Drs. Y. R. Subakti, M. Pd.	

Yogyakarta, 30 Januari 2010

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan,



Drs. T. Sarkim, M.Ed., Ph.D.

MOTTO

When love and skills work together expect a masterpiece
Ketika cinta dan kemampuan bekerja bersama akan menghasilkan mahakarya.
(Jhon Ruskin)

Kesalahan terbesar yang bisa dibuat oleh manusia di dalam kehidupannya adalah terus-menerus mempunyai rasa takut bahwa mereka akan membuat kesalahan.
(Elbert Hubbard)

Kita tidak tahu bagaimana hari esok, yang bisa kita lakukan ialah berbuat sebaik- baiknya dan berbahagia pada hari ini.
(Samuel Taylor Coleridge)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- 1) Kedua orangtuaku Bapak Pakomeum dan Ibu Yasinta Rampan yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang,
- 2) Kakakku Agnes Erpiyanti serta kedua adikku Vinsensius Prambetu dan Romana Noviyanti yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan,
- 3) Abangku yang telah memberikan banyak pelajaran berharga tentang hidup dan cinta,
- 4) Para Pendidik dan sahabat-sahabatku di Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.

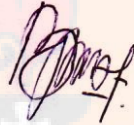
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 30 Januari 2010

Penulis



Bernarda Prihartanti

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Bernarda Prihartanti

Nomor Mahasiswa : 051314006

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

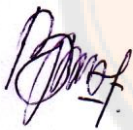
PERANAN SUTAN SJAHRIR DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA (1945-1947)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikannya secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberi royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya .

Yogyakarta, 30 Januari 2010

Yang menyatakan



(Bernarda Prihartanti)

ABSTRAK

**PERANAN SUTAN SJAHRIR DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA
(1945-1947)**

Oleh : Bernarda Prihartanti
NIM : 051314006

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang kehidupan Sutan Sjahrir, peranan Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia pada tahun 1945-1947, dan tantangan-tantangan yang dihadapi olehnya selama berkuasa.

Skripsi ini disusun berdasarkan metode penelitian sejarah dengan menggunakan pendekatan historis, sosiologis, psikologis, dan politik, sehingga model penulisannya bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sutan Sjahrir merupakan seorang nasionalis, moderat, demokrat, dan sosialis, serta memiliki jiwa kepemimpinan yang didukung oleh cakrawala intelektual yang luas. Ia merupakan negarawan dan politikus yang mengabdikan diri untuk memperjuangkan kedaulatan negara Republik Indonesia.

Peranan yang pernah dimainkan oleh Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia ialah sebagai Ketua KNIP dan perdana menteri selama tiga kali berturut-turut. Politik diplomasi merupakan garis politik yang dijalankan olehnya untuk memperjuangkan pengakuan terhadap keberadaan RI yang baru memperoleh kemerdekaan. Selama menjabat sebagai perdana menteri, Sjahrir menghadapi banyak tantangan berat dari pihak oposisi.

ABSTRACT

**THE ROLE OF SUTAN SJAHRIR IN INDONESIAN GOVERNMENT
IN 1945-1947**

Oleh : Bernarda Prihartanti
NIM : 051314006

This research aims to describe and analyze the background of Sutan Sjahrir's life, his participation in 1945-1947, and the challenges that he faced when he held the power.

This research was arranged based on the method of history research which used history, sociology, psychology, and political approach. The process of writing is a descriptive analysis.

The result shows that Sutan Sjahrir is a nationalist, who is moderat, democratic, and social. He has the quality to be the leader that is supported by wide intellectual experiences. He is a statesman and politician who serves and struggles for the Indonesia sovereignty.

The participation that has been done by Sutan Sjahrir in Indonesian government is as a leader of KNIP, and as a prime minister for at least four years. The politic diplomacy is the politic line which he conducted to struggle for the existence of Indonesian Republic that has just been liberated. When he was a prime minister, Sjahrir faced many difficult challenges from his opposition sides.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Sutan Sjahrir dalam Pemerintahan Indonesia (1945-1947)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma.
4. Dr. Anton Haryono, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, membantu, dan memberikan banyak pengarahan, saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan pihak sekretariat Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.

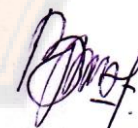
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6. Seluruh staf Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, Perpustakaan Kolsani, Perpustakaan Seminari Tinggi Kentungan, Perpustakaan FIB UGM, dan Perpustakaan Alocita yang telah melayani dan membantu penulis dalam memperoleh sumber skripsi ini.
7. Kedua orangtua penulis yang telah memberikan dorongan spiritual dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Yogyakarta, 30 Januari 2010

Penulis,



Bernarda Prihartanti

DAFTAR ISI

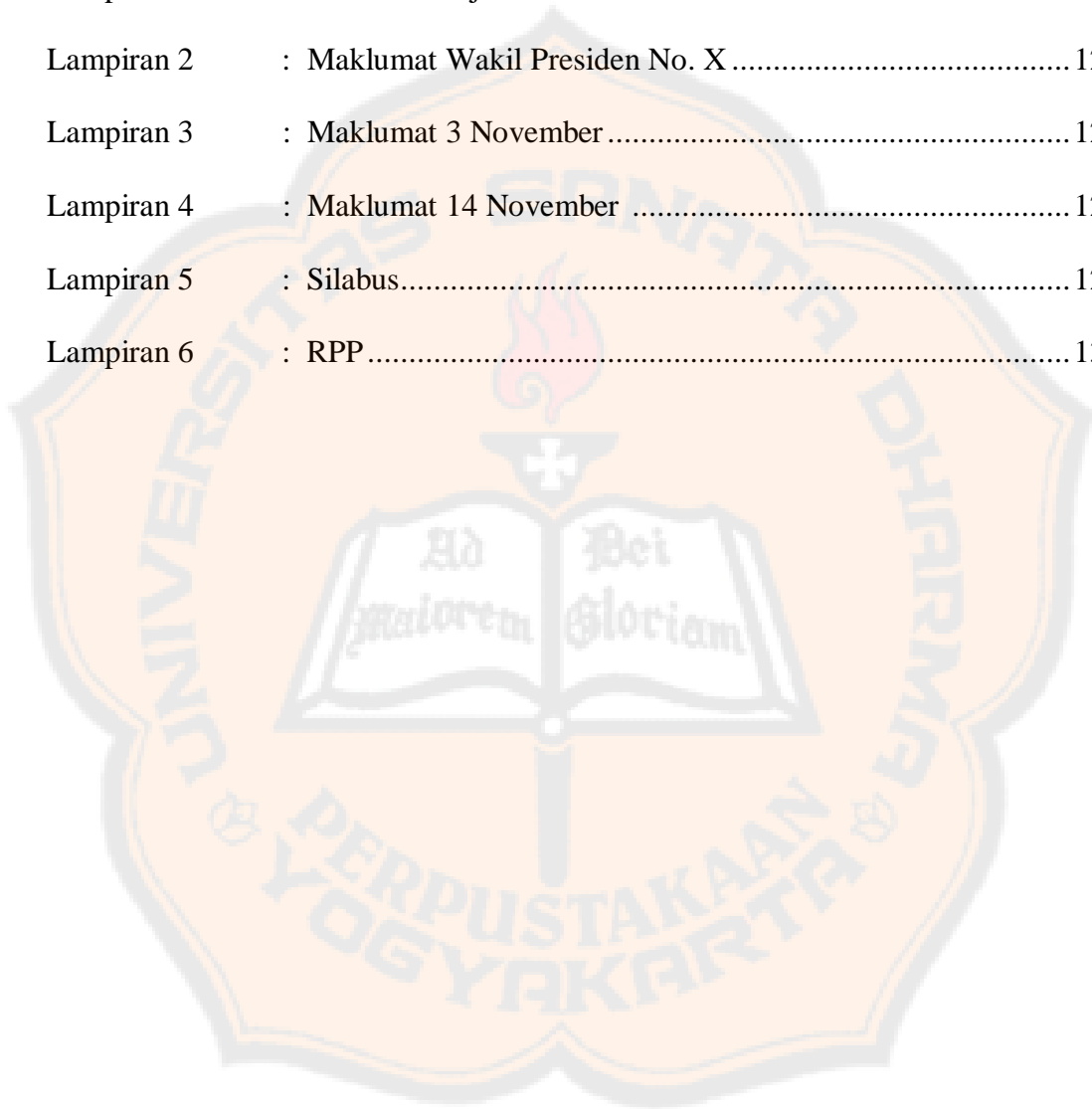
	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRAC	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teoritis	15
F. Metodologi Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II: LATAR BELAKANG KEHIDUPAN SUTAN SJAHRIR	29
A. Latar Belakang Sosial-budaya	29
B. Latar Belakang Politik.....	45
BAB III: PERANAN SUTAN SJAHRIR DALAM PEMERINTAHAN	
INDONESIA (1945-1947)	54
A. Arti Penting Sjahrir Pada Awal Kemerdekaan	54

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Sutan Sjahrir sebagai Ketua KNIP (16 Oktober 1945-28 November 1945)	59
C. Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri (14 November 1945-28 Februari 1946).....	68
D. Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri untuk yang Kedua Kalinya (12 Maret 1946-27 Juni 1946)	75
E. Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri untuk yang Ketiga Kalinya (2 Oktober 1946-27 Juni 1947).....	81
BAB IV: TANTANGAN-TANTANGAN YANG DIHADAPI	
SUTAN SJAHRIR	87
A. Oposisi Persatuan Perjuangan.....	87
B. Pertentangan dengan Militer	99
C. Masalah Persetujuan Linggarjati.....	105
BAB V: KESIMPULAN	113
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	124
SUPLEMEN	128

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Foto Sutan Sjahrir.....	124
Lampiran 2 : Maklumat Wakil Presiden No. X.....	125
Lampiran 3 : Maklumat 3 November.....	126
Lampiran 4 : Maklumat 14 November	127
Lampiran 5 : Silabus.....	128
Lampiran 6 : RPP.....	130



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan yang telah diperoleh oleh bangsa Indonesia bukan sebagai pemberian dari penjajah, akan tetapi sebagai hasil dari perjuangan panjang dan berat yang telah dilalui dalam kurun waktu yang cukup lama. Proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah hasil akhir dari perjuangan itu, akan tetapi ini adalah awal perjuangan baru dalam membangun sebuah tatanan berbangsa dan bernegara. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia berupaya untuk mempertahankan kedaulatannya sebagai bangsa yang merdeka, dan ingin membuktikan bahwa proklamasi yang telah dilakukan bukanlah isapan jempol belaka, akan tetapi merupakan cita-cita yang akan dibuktikan dengan realita.

Bangsa Indonesia berusaha untuk mempertahankan kemerdekaannya dengan melakukan perjuangan yang terdiri atas dua macam yakni secara fisik dan non fisik. Perjuangan fisik merupakan perlawanan yang dilakukan dengan jalan menggunakan senjata atau perang yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam menghadapi kekuasaan asing. Perjuangan non fisik atau diplomasi dilakukan dengan cara menempuh jalan damai melalui perundingan-perundingan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik Indonesia dengan pihak penjajah. Jalan yang ditempuh oleh para tokoh, baik jalan perang maupun diplomasi memberikan hasil yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,

yaitu kemerdekaan sejati yang berarti bahwa bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan asing dan berhak menentukan nasibnya sendiri.

Sebagai negara yang baru berdiri, maka Indonesia harus memiliki pemerintah yang kuat dan dapat diakui baik di dalam maupun di luar negeri. Pemerintahan awal yang dibentuk oleh Soekarno ialah pemerintahan dengan sistem Kabinet-Presidensial, pemerintahan ini ternyata memiliki banyak kelemahan. Indonesia dianggap sebagai negara fasis buatan Jepang, sehingga sulit untuk memperoleh pengakuan dari negara lain terutama pihak sekutu dan Belanda. Selain itu, Presiden Soekarno memiliki citra yang kurang baik di luar negeri karena ia dicap sebagai kolaborator Jepang. Meskipun demikian, Soekarno memiliki kedudukan ke dalam yang kuat, bangsa Indonesia hanya mengakui Soekarno sebagai Presiden sehingga tidak mungkin untuk menggeser kedudukannya.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dikeluarkanlah Maklumat Negara RI No. X tahun 1945. Maklumat ini berisi tentang perubahan KNIP menjadi badan legislatif dan mempunyai hak ikut untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara. Untuk melaksanakan maklumat tersebut dibutuhkan seorang pemimpin yang sesuai dengan keinginan rakyat, pemuda dan mahasiswa, karena itu pimpinan harus seorang revolusioner.¹ Maka ditunjuklah Sjahrir sebagai pemimpin, ia merupakan sosok yang dianggap bersih dari pengaruh pihak Jepang dan memiliki tempat yang istimewa di kalangan pemuda Indonesia.

¹ Soebadio Sastrosatomo, *Perjuangan Revolusi*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987, hlm. 63-64.

Kabinet presidensial yang dibentuk oleh Sukarno kemudian diganti oleh Kabinet-Sjahrir dengan sistem parlementer, dan Sjahrir diangkat sebagai perdana menteri Indonesia yang pertama.² Pemerintahan dengan sistem kabinet parlementer ini merupakan perwujudan hasil perjuangan demokrasi melawan fasisme. Dengan demikian, Republik Indonesia akan memiliki kedudukan yang kuat baik ke dalam maupun ke luar karena pemerintahannya dipimpin oleh seorang pejuang demokrasi yang bebas dari fasisme.

Ketenaran dwitunggal Soekarno-Hatta dalam memimpin revolusi Indonesia, seringkali membuat orang melupakan sosok Sjahrir yang berada di belakang kedua tokoh tersebut. Padahal ia merupakan salah satu dari tokoh sentral dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan Negara Indonesia yang baru saja berdiri. Dia memilih cara elegan dalam menghalau penjajah, yakni melalui diplomasi, cara yang pada masa itu ditentang oleh tokoh revolusi lainnya yang lebih mengutamakan perjuangan fisik. Banyak pihak yang menganggap jalan yang dipilih Sjahrir terlalu jauh memberi konsesi pada pihak Belanda.

Persetujuan Linggarjati sering dianggap sebagai salah satu kegagalan Sjahrir dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Sebagai wakil dari RI, Sjahrir sering disalahkan karena perundingan ini dianggap merugikan pihak republik. Akan tetapi, apabila ditinjau lebih jernih, sebenarnya persetujuan Linggarjati telah menjadi batu loncatan bagi negara Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Kemenangan dari perjanjian ini adalah internasionalisasi masalah Indonesia, dimana sebelumnya hanya menjadi urusan dalam negeri dan tanah

² Osman Raliby, *Documenta Historica Sejarah Dokumenter dari Pertumbuhan dan Perjuangan Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1953, hlm. 94.

jajahan Belanda.³ Dalam persetujuan Linggarjati, Republik Indonesia untuk pertama kalinya diakui secara *de facto*, sehingga hal ini merupakan alasan bagi beberapa negara, misalnya India dan Australia untuk mengakui keberadaan Indonesia secara *de facto*.

Maklumat No X, oleh sebagian orang dianggap sebagai usaha kudeta halus untuk menyingkirkan kekuasaan Presiden Soekarno. Kelompok yang berseberangan dengan Sjahrir pada masa itu menilai apa yang dilakukan kelompok pemuda dan Sjahrir, adalah demi memperoleh kekuasaan. Akan tetapi, pada kenyataannya sejarah memperlihatkan bahwa Sjahrir mampu menentukan posisi Indonesia di mata dunia internasional dan mampu menyakinkan Sekutu bahwa Republik Indonesia bukan buatan Jepang. Soekarno sendiri menyadari bahwa penyelesaian revolusi, yang memerlukan perundingan dengan pihak sekutu dan Belanda, membutuhkan seorang tokoh yang terbebas dari noda fasisme Jepang. Pada dasarnya keberadaan Sjahrir bukan sebagai pengganti, akan tetapi sebagai pelengkap paling tepat dan vital bagi Soekarno-Hatta. Pimpinan revolusi kemerdekaan Indonesia ada dalam tangan ketiga pimpinan yang semuanya saling isi-mengisi dan dukung-mendukung, sehingga mereka disebut *triumvirat de facto*, Soekarno-Hatta- Sjahrir.⁴

Sebagai Perdana Menteri Pertama Indonesia, Sutan Sjahrir telah menorehkan tintas emas perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ia lahir di Padangpanjang Sumatera Barat 5 Maret 1909, dan meninggal dunia pada usia 57 tahun di Zurich, Swiss, setelah dirawat sekian lama akibat sakit yang dideritanya.

³ *Tempo Edisi Khusus 100 tahun Sjahrir (Edisi 9-15 Maret 2009)*, hlm. 19.

⁴ *Ibid*, hlm. 44-45, bdk Aboe Bakar Loebis, *Kilas Balik Revolusi Kenangan, Pelaku, dan Saksi*, Jakarta, UI Press, 1992, hlm. 314-316.

Ia meninggal dengan status tahanan politik pada masa Orde Lama, ia merupakan seorang revolusioner sejati yang gugur dalam kesepian, jauh dari tanah yang ia perjuangkan kemerdekaannya.

Sebagai tokoh pemimpin di belakang revolusi Indonesia, Sjahrir adalah seorang revolusioner yang terlalu moderat dalam zamannya, sehingga ia banyak ditentang oleh tokoh lainnya yang lebih perjuangan fisik sebagai jalan penyelesaian revolusi. Padahal kedua perjuangan itu, baik diplomasi maupun perang merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Perjuangan fisik tanpa diplomasi akan mengalami ketimpangan, begitu juga sebaliknya diplomasi tanpa perjuangan fisik tidak akan ada apa-apanya. Sejarah seolah melupakan peran dan sumbangan Sjahrir bagi eksistensi Republik Indonesia di masa-masa genting setelah proklamasi kemerdekaan.

B. Permasalahan

Dari latar belakang masalah tampak bahwa, seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia nama Sutan Sjahrir seperti hilang ditelan zaman. Dalam era modern seperti saat ini, orang begitu mudah melupakan tokoh-tokoh penting yang mempunyai peranan vital dalam perjuangan kemerdekaan negara ini. Nama Soekarno-Hatta mungkin tidak begitu asing bagi kaum awam, namun nama Sutan Sjahrir hanya segelintir orang yang mengetahuinya. Sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa ini, maka sudah selayaknya mengangkat kembali peranan yang telah disumbangkan oleh Sjahrir bagi negara Indonesia yang pada saat itu baru memperoleh kemerdekaannya.

Penelitian dalam skripsi ini mengidentifikasi dan menganalisis peranan Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia tahun 1945-1947. Permasalahan pertama yang ingin dijawab dalam penelitian ini ialah bagaimana latar belakang kehidupan Sutan Sjahrir. Permasalahan ini akan dijawab dengan menjelaskan latar belakang sosial-budaya Sutan Sjahrir, yang meliputi latar belakang keluarga dan pendidikan. Latar belakang politiknya dijawab dengan menguraikan pengalaman-pengalaman politik Sjahrir sebelum menjabat sebagai Perdana Menteri. Uraian mengenai latar belakang kehidupan Sutan Sjahrir akan menjelaskan munculnya nasionalisme dalam diri Sutan Sjahrir, sehingga ia akan terlibat dalam pemerintahan Indonesia tahun 1945-1947. Penjelasan mengenai latar belakang kehidupan Sutan Sjahrir juga untuk menganalisis kepribadian dan pemikirannya yang berpengaruh terhadap gaya atau tipe kepemimpinannya selama memegang peranan penting dalam pemerintahan Indonesia tahun 1945-1947.

Permasalahan kedua yang ingin dijawab dalam skripsi ini ialah peran apa yang dipegang oleh Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia tahun 1945-1947. Permasalahan ini akan dijawab dengan terlebih dahulu menjelaskan mengenai situasi Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan hingga munculnya Sutan Sjahrir sebagai perdana menteri Indonesia. Selanjutnya akan dibahas usaha-usaha yang dilakukan oleh Sutan Sjahrir selama menjabat sebagai perdana menteri dalam pemerintahan Indonesia.

Permasalahan yang ketiga akan menjawab tantangan apa yang dihadapi Sutan Sjahrir selama berperan dalam pemerintahan Indonesia tahun 1945-1947. Selama menjabat sebagai perdana menteri dalam pemerintahan Indonesia,

tentunya Sutan Sjahrir menghadapi tantangan atau hambatan. Permasalahan yang ketiga ini akan dijawab dengan menguraikan tantangan yang dihadapinya baik dari dalam maupun luar negeri.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, ialah:

1. Bagaimana latar belakang kehidupan sosial-budaya dan politik Sutan Sjahrir?
2. Apa peranan Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia tahun 1945-1947?
3. Tantangan-tantangan apa yang dihadapi oleh Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia tahun 1945-1947?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah :

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang kehidupan sosial-budaya dan politik Sutan Sjahrir.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis peranan Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia tahun 1945-1947.
- c. Mendeskripsikan dan menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia.

2. Manfaat Penulisan

Manfaat Penulisan ini adalah :

- a. Bagi Universitas Sanata Dharma

Selain untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma perguruan tinggi khususnya bidang penelitian yaitu ilmu pengetahuan sosial, skripsi ini diharapkan dapat

memberikan kekayaan khasanah yang berguna bagi pembaca dan pemerhati sejarah di lingkungan Universitas Sanata Dharma.

b. Bagi Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sejarah para tokoh bangsa dan peranannya, lebih khususnya tentang peranan Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pelengkap dalam pembelajaran sejarah.

c. Bagi Pembaca

Skripsi ini diharapkan mampu menarik minat pembaca untuk mempelajari tentang sejarah Indonesia kontemporer, khususnya mengenai peranan Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Sumber sejarah berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau dengan pancaindera yang lain atau dengan alat-alat mekanik seperti telepon dan lain-lain untuk mengetahui suatu peristiwa.⁵ Louis Gottchalk juga menekankan bahwa sumber primer tidak perlu “asli” (asli yang dimaksud di sini adalah bahwa dari sumber yang ada dalam peristiwa tersebut) tetapi sumber primer itu hanya harus “asli” dalam artian kesaksiannya tidak berasal dari sumber lain melainkan berasal dari sumber pertama.⁶ Dengan

⁵ Louis Gottchalk, *Mengerti Sejarah*, Jakarta, UI Pres, 1969, hlm. 35.

⁶ *Ibid*, hlm. 36

demikian sumber primer harus dihasilkan oleh seseorang yang sejamin dengan peristiwa yang dikisahkan.⁷

Adapun sumber primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa sumber tertulis yang diperoleh melalui buku-buku. Buku-buku yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

Renungan dan Perjuangan, buku ini merupakan terjemahan dari *Indonesische Overpeinzigen* dan *Out of Exile*,⁸ Buku ini terdiri dari dua bagian, yakni bagian I berjudul *Renungan dalam Tahanan*, merupakan terjemahan dari *Indonesische Overpeinzigen*.⁹ Isi dari bagian ini ialah kumpulan surat-surat dan karangan yang ditulis Sutan Sjahrir ketika berada dalam tahanan dan pengasingan di Batavia, Boven Digoel, dan Banda Neira (1934-1938). Kumpulan surat tersebut oleh mantan isterinya Ny. Maria Duchateau bekerjasama dengan Sutan Sjahsam (adik Sutan Sjahrir) disunting dalam bentuk buku harian. Bagian II dalam buku *Renungan dan Perjuangan* ini berjudul “Aksi” merupakan terjemahan dari karangan Sjahrir yang khusus atas permintaan Charles Wolf Jr. untuk dimuat dalam “*Out of Exile*”.¹⁰ Bagian ini mengisahkan dengan singkat kejadian-kejadian di tahun-tahun terakhir masa kolonialisasi Belanda, dan perjalanan hidup Sjahrir selanjutnya, yakni pada masa pendudukan Jepang, ketika menjabat sebagai perdana menteri, ketika tampil di forum internasional Dewan Keamanan PBB di Lake Success, dan ketika menjadi duta besar Republik Indonesia.

⁷ *Ibid*, hlm. 35

⁸ Buku ini direvisi kembali oleh H.B. Jassin, diterbitkan oleh Penerbit Djambatan dan Dian Rakyat pada tahun 1990.

⁹ Buku ini diterbitkan oleh *De Bezige Bij*, Amsterdam, tahun 1945.

¹⁰ Terbitan *Jhon Day Company New York*, 1948, penyunting Charles Wolf Jr.

Mengenang Sjahrir, buku ini berisi tulisan-tulisan mengenai Sjahrir oleh orang-orang yang pernah mengenalnya secara dekat dan dalam aneka hubungan: sebagai pejuang atau sebagai negarawan, di masa mudanya, dalam gerakan nasional dan semasa revolusi atau di gelanggang politik.¹¹ Karangan dalam buku ini antara lain di tulis oleh Moh. Hatta dengan judul *Kenang-kenangan Masa Lampau dengan Sjahrir*, karangan ini berisi tentang kenangan Hatta bersama Sjahrir ketika sama-sama bersekolah di Leiden, Belanda dan bergabung dalam Perhimpunan Indonesia (PI), mendirikan PNI-Baru, serta hidup bersama dalam pengasingan dari Boven Digoel, Banda Neira, hingga ke Sukabumi. Tulisan dengan judul *Makna Sjahrir untuk Sastra dan Sastra untuk Sjahrir* yang dimuat dalam buku ini berisi tentang pandangan Sastra mengenai pribadi dan pemikiran Sjahrir, menurutnya Sjahrir adalah seorang demokrat yang berhaluan sosialis dan perjuangannya adalah perjuangan kerakyatan.¹²

Perjuangan Kita,¹³ buku ini ditulis oleh Sutan Sjahrir sendiri ketika Indonesia berada dalam masa-masa revolusi. Buku atau biasa disebut sebagai pamflet ini berisi tentang pandangan-pandangan Sjahrir tentang taktik dan strategi perjuangan penyelesaian revolusi yang sedang berlangsung. Buku yang diterbitkan dalam bulan Oktober 1945 ini merupakan kritikan-kritikan Sjahrir terhadap fasisme Jepang, penggambaran pemerintahan demokratis yang harus

¹¹Kumpulan karangan-karangan tersebut diedit oleh H. Rosihan Anwar, diterbitkan oleh PT. Gramedia atas kerjasama dengan Soedjatmoko (Ketua Panitia Penerbitan) pada tahun 1980 dalam rangka mengenang 70 tahun Sutan Sjahrir

¹² Rosihan Anwar (edtr), *Mengenang Sjahrir*, Jakarta, Gramedia, 1980, hlm. 85-86

¹³ Buku ini ditulis oleh Sutan Sjahrir, diterbitkan ulang oleh Pusat Dokumentasi Politik "Guntur 49", pada tahun 1995.

terlepas dari fasisme, dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam masa revolusi.

Selain sumber primer diatas masih ada sumber lain atau sumber sekunder yang digunakan penulis untuk mendukung penulisan skripsi ini. Sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi langsung dari peristiwa yang dikisahkan. Adapun buku yang digunakan penulis antara lain sebagai berikut;

Sjahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia,¹⁴ buku ini berisi mengenai biografi Sutan Sjahrir. Dalam buku ini dipaparkan secara rinci mengenai latar belakang keluarga Sjahrir, latar belakang keluarga Ibunya, Siti Rabiyyah, dan latar belakang keluarga ayahnya, Moh. Rasad Gelar Maha Raja Soetan yang bekerja sebagai Jaksa di Pengadilan Negeri. Buku ini juga menganalisis bagaimana hubungan kepribadian Sjahrir dengan budaya Minangkabau, dan keadaan sosial di lingkungan Sjahrir dibesarkan, yaitu Kota Medan. Dalam buku ini juga memaparkan tentang kegiatan Sjahrir selama bersekolah mulai dari ELS dan MULO di Medan, AMS di Bandung dan ketika menjadi mahasiswa di Amsterdam, Belanda. Selanjutnya buku ini menguraikan mengenai kehidupan Sjahrir ketika berada di penjara Cipinang, dalam pengasingan di Boven Diogel dan Banda Neira. Buku ini juga memaparkan tentang kegiatan bawah tanah Sjahrir dan kelompoknya selama pendudukan Jepang. Buku ini juga memaparkan tentang keterlibatan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan, kebijakannya selama menjadi perdana menteri, serta

¹⁴ Buku ini ditulis oleh Rudolf Mrazek dengan judul asli *Sjahrir Politic and Exil in Indonesia*, diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia, Jakarta pada tahun 1996.

pertentangannya dengan tokoh lainnya, seperti Tan Malaka yang membentuk Persatuan Perjuangan (PP) dan Jendral Sudirman. Buku ini juga menguraikan secara rinci mundurnya Sjahrir dari kursi pemerintahan, dan kemudian membentuk Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang hanya memperoleh 5 kursi pada pemilu 1955. Selanjutnya buku ini memaparkan mengenai tuduhan-tuduhan kaum komunis, sehingga ia ditahan tanpa diadili pada zaman orde lama, yang berujung pada kematiannya di Zurich, Swiss pada tahun 1966.

*Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir,*¹⁵ buku ini merupakan salah satu buku yang memaparkan tentang peranan Sjahrir pada masa perjuangan kemerdekaan dan beberapa tahun setelahnya. Penulis buku ini ingin memulihkan interpretasi negatif penulis lain yang terkesan mengecilkan peranan Sjahrir melalui studi ilmiah yang didukung dengan data yang kuat. Buku ini memaparkan dengan jelas dan terinci bagaimana terbentuknya kelompok Sjahrir pada masa pendudukan Jepang di Jakarta dan juga menguraikan profil para pengikut baru Sjahrir. Buku ini juga memaparkan peranan Sjahrir sebagai perdana menteri dan pelaksanaan kebijakan Sjahrir selama menjabat sebagai perdana menteri.

*Apa dan Siapa Sutan Syahrir,*¹⁶ buku ini merupakan biografi singkat Sutan Sjahrir. Buku ini berisi tentang masa muda Sutan Sjahrir, bagaimana perkenalannya dengan Soekarno, kegiatan-kegiatan Sjahrir ketika masih besekolah di AMS Bandung seperti ikut dalam kegiatan pemberantasan buta huruf

¹⁵ Buku ini ditulis oleh J.D.Legge, dengan judul asli *Intellectuals and Nationalism in Indonesia: a study of the following recruited by Sutan Sjahrir in occupation Jakarta*. Diterjemahkan oleh Hasan Basri, diterbitkan oleh Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, tahun 1993.

¹⁶ Buku ini ditulis oleh Syahbuddin Mandalaram, diterbitkan oleh PT.Rosda Jayaputera, pada tahun 1987.

dengan bergabung untuk mendirikan sekolah-sekolah nasional “Cahaya” antara lain di Cimindi, Ujungberung, dan di kampung Banjarnegara, Lembang. Dalam buku ini juga dikisahkan mengenai kegiatan-kegiatan Sjahrir selama menjadi mahasiswa di negeri Belanda, antara lain ikut dalam Perhimpunan Mahasiswa Sosial Demokratis Amsterdam, bergabung dalam Perhimpunan Indonesia (PI), dan mendirikan PNI-Baru bersama Bung Hatta. Selanjutnya buku ini mengisahkan tentang kegiatan politik Sjahrir dalam PNI-Baru, sampai pada penangkapan dan pembuangannya ke Boven Digoel, Banda Neira, dan Sukabumi. Kegiatan Sjahrir selama pendudukan Jepang juga dikisahkan dalam buku ini, dimana pada masa itu ia menolak untuk bekerjasama dengan Jepang dan lebih memilih untuk membangun jaringan bawah tanah. Buku ini selanjutnya mengisahkan tentang keterlibatan Sjahrir dalam memimpin pemerintahan di masa sulit sebagai perdana menteri, pihak-pihak yang menentang kebijakannya, difitnah oleh kaum komunis hingga ia di tahan tanpa diadili dan kematiannya di Zurich, Swiss.

Sjahrir Wajah Seorang Diplomat,¹⁷ buku yang dikarang oleh Solichin Salam ini secara ringkas menguraikan tentang riwayat hidup Sutan Sjahrir. Buku ini lebih memfokuskan pada keterlibatan Sjahrir dalam perjuangan menengakkan kemerdekaan RI, khususnya dalam bidang diplomasi. Dalam buku ini juga diuraikan secara singkat mengenai hubungan antara Soekarno dan Sjahrir. Selain itu buku ini dilengkapi dengan foto-foto Sjahrir dan lampiran-lampiran yang

¹⁷ Pengarang: Solichin Salam, diterbitkan oleh CISR, Jakarta, pada tahun 1990.

berhubungan dengan penunjukannya sebagai perdana menteri dan surat-surat penting lainnya.

In Memoriam Sutan Sjahrir (Perjuangan dan Penderitaannya),¹⁸ buku ini secara ringkas mengisahkan tentang perjalanan hidup Sutan Sjahrir, yang menguraikan biografi singkat dari masa kecil dan masa mudanya, peranan dalam pemerintahan, dan akhir perjalanan hidupnya. Dalam buku ini juga mengupas sedikit mengenai pandangan-pandangan Sjahrir yang tertuang dalam pamflet “Perjuangan Kita” mengenai situasi Indonesia dan revolusi yang sedang berjalan.

Tempo Edisi Khusus Mengenang Seratus Tahun Sjahrir (Edisi 9-15 Maret 2009), majalah Tempo edisi ini secara khusus mengupas kehidupan Sutan Sjahrir, mulai dari masa kecilnya, masa bersekolah di Belanda, masa pergerakan nasional, masa pendudukan Jepang, peranannya dalam pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan, akhir kehidupannya, sampai pada kisah percintaannya.

Perjuangan Revolusi, buku ini ditulis oleh Soebadio Sastrosatomo, diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, pada tahun 1987. Buku ini merupakan sebuah otobiografi dari penulis, di dalamnya membahas mengenai perkembangan sejarah politik Indonesia dari tahun 1945 sampai 1950. Penulisan sejarah politik pada masa ini dilihat penulis dari orang yang terlibat dan mengalami sendiri serta ditambah dengan bahan yang lengkap dari penulis-penulis asing.

¹⁸ Buku ini ditulis oleh Sjahbuddin Mangandaralam dengan bantuan R.E. Soekarna Kartawidjaja, diterbitkan oleh Panjasakti Bandung pada tahun 1966.

*Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*¹⁹ Buku ini membahas dan menganalisis asal mula nasionalisme Indonesia, menggambarkan perkembangan pergerakan nasional dimana kaum pelajar memainkan peranan yang penting, masa pendudukan Jepang (1942-1945), membahas revolusi Indonesia sampai saat pengakuan kedaulatan Indonesia pada bulan Desember 1949 dan terbentuknya Negara Kesatuan pada 17 Agustus 1950.

E. Kerangka Teoritis

Pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan merupakan pemerintahan yang unik, dimana lembaga kepresidenan yang telah terbentuk masih belum mantap, karena masih mencari bentuk. Sistem pemerintahan yang dibentuk memiliki kekurangan, sehingga sulit untuk memperoleh pengakuan internasional. Untuk mencapai sebuah pemerintahan yang dapat diakui oleh dunia internasional masih dibutuhkan perjuangan yang panjang, seperti mengganti sistem pemerintahan.

Pemerintahan dalam arti luas yakni segala bentuk kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan. Pengertian pemerintahan seperti ini mencakup kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.²⁰ Sedangkan pemerintahan

¹⁹ Terjemahan dari buku *Nationalism And Revolution in Indonesia* karya George McTurnan Kahin, diterbitkan oleh Cornell University Press tahun 1952), kemudian dialih bahasakan oleh Nin Bakdi Soemanto, diterbitkan oleh UNS Press bekerjasama dengan Pustaka Sinar Harapan pada tahun 1995.

²⁰ B.Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusi*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2003, hlm. 84.

dalam arti sempit ialah aktifitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh fungsi eksekutif yang dalam hal ini dilaksanakan oleh presiden atau perdana menteri sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatannya.²¹

Menurut Carl J. Ferderich, sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional terhadap keseluruhan, sehingga hubungan itu menimbulkan ketergantungan antara bagian-bagian, jika salah bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi seluruh bagian itu.²² Dengan demikian sistem adalah sebuah kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur atau organ yang saling bergantung satu sama lainnya, apabila salah satu dari unsur atau organ tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik maka akan mempengaruhi seluruh kesatuan tersebut. Dengan demikian, sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu tatanan atau susunan pemerintahan berupa suatu struktur yang terdiri dari berbagai organ pemegang kekuasaan di dalam negara dan saling melakukan hubungan fungsional, baik secara vertikal maupun horizontal untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki.²³ Dengan kata lain sistem pemerintahan merupakan organisasi dalam negara yang dibentuk oleh berbagai organ pemegang kekuasaan dengan menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing, dimana diantara organ tersebut mempunyai hubungan yang saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, untuk mencapai suatu tujuan negara yang dikehendaki bersama.

Secara umum, sistem pemerintahan yang dijalankan oleh negara-negara di dunia terbagi menjadi dua, yaitu sistem presidensial dan parlementer. Dalam

²¹ *Ibid*, hlm. 85.

²² Carl J. Friederich dalam *Ibid*, hlm. 83.

²³ *Ibid*, hlm. 85.

sistem presidensial, antara parlemen (legislatif) dan eksekutif memiliki kedudukan yang sama dan saling melakukan kontrol.²⁴ Badan eksekutif tidak bertanggungjawab kepada parlemen, karena dibentuk dari pemilihan umum. Kabinet dibentuk oleh presiden dan berfungsi sebagai pembantu presiden, jadi kabinet bertanggungjawab kepada presiden. Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer, badan eksekutif dan legislatif saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Kabinet dibentuk dan dibubarkan oleh badan legislatif, serta bertanggungjawab kepada parlemen (kabinet parlementer).²⁵ Badan eksekutif merupakan mandataris parlemen yang setiap waktu mandat dapat dicabut apabila badan eksekutif tidak dapat memberikan pertanggungjawaban kepada parlemen.²⁶

Sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan mencari bentuk yang sesuai dengan situasi politik pada masa itu. Indonesia sedang mengalami suatu masa yang disebut sebagai masa revolusi. Istilah revolusi berasal dari bahasa latin, yaitu “*revolve*” yang berarti menjungkirbalikkan, revolusi dapat diartikan sebagai penjungkirbalikkan tata-nilai yang dianggap usang supaya diganti dengan yang lain.²⁷ Dalam sosiologi, revolusi ialah perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar-dasar sendi kehidupan masyarakat, yaitu lembaga-lembaga kemasyarakatan. Unsur-unsur

²⁴ *Ibid*, hlm. 86.

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 2007, hlm. 210.

²⁶ Rushadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 141.

²⁷ *Ibid*, hlm. 197.

pokok revolusi ialah adanya perubahan yang cepat dan perubahan tersebut mengenai dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat.²⁸

Secara politik, revolusi merupakan perubahan radikal dalam suatu sistem sosial politik suatu masyarakat yang berlangsung dalam tempo yang singkat dengan menggunakan jalan kekerasan.²⁹ Kata revolusi untuk pertama kalinya digunakan dalam teks politik Italia yang berarti penggulingan pemerintahan; kejadian seperti ini dilihat sebagai bagian dari siklus dalam pemindahan kekuasaan antar pihak-pihak yang bersaing tanpa adanya perubahan-perubahan dalam instuisi yang terlibat.³⁰ Revolusi juga dapat berarti perubahan yang dilakukan dengan cara mengesampingkan azas, dimana azas-azas lama diganti dengan azas-azas baru.³¹ Agar suatu revolusi dapat terjadi, maka harus memenuhi syarat tertentu, yaitu:³²

- a) Harus ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. Didalam masyarakat harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan, dan harus ada keinginan untuk mencapai perbaikan dengan perubahan keadaan tersebut.
- b) Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat itu.
- c) Pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan masyarakat untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas menjadi program dan arah gerakan.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1990, hlm. 347.

²⁹ Adam Kuper & Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 969.

³⁰ Save M Dangun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta, LPKN, hlm. 924.

³¹ T.G.S.Mulia, *Ensiklopedi Indonesia*, Bandung, W van Hoeve, 1990, hlm. 320.

³² Soerjono Soekanto, *op. cit*, hlm.347-348.

- d) Pemimpin harus dapat menunjukkan suatu tujuan yang bersifat kongkrit dan dapat dilihat oleh masyarakat.
- e) Harus ada momentum yang tepat untuk memulai dan melaksanakan suatu gerakan.

Menghadapi revolusi yang sedang berlangsung, bangsa Indonesia memerlukan nasionalisme yang tinggi agar revolusi itu dapat tercapai. Menurut Hans Kohn, *nasionalisme* adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Nasionalisme merupakan rasa yang muncul akibat adanya ikatan yang mendalam dengan tanah air seseorang. Nasionalisme mempunyai berbagai perwujudan yang berbeda, sesuai dengan tuntutan zamannya. Dahulu kesetiaan individu ditujukan kepada berbagai bentuk kekuasaan, misalnya suku atau clan, negara-kota, atau raja feodal. Pada akhir-akhir abad ke-18, nasionalisme berkembang menjadi suatu rasa yang memunculkan keinginan suatu bangsa untuk membentuk sebuah negara bangsa.³³

Nasionalisme yang berkembang di negara-negara Eropa berbeda dengan nasionalisme yang berkembang di negara-negara jajahan seperti Indonesia. Nasionalisme yang berkembang muncul akibat adanya penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Hak kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri merupakan tujuan utama dari nasionalisme bangsa Indonesia, dimana nasionalisme merupakan sumber kekuatan untuk melawan penjajahan. Nasionalisme Indonesia muncul dari kaum intelektual yang mampu

³³ Hans Kohn, *Nasionalisme Arti dan Sedjarahnya*, Jakarta, PT. Pembangunan, 1961, hlm. 11.

mengidentifikasi situasi kolonial, mengkritiknya dan menganalisa rumusan program perjuangan nasionalistis.

Boyd C. Shafer mendefinisikan nasionalisme sebagai berikut: 1) Nasionalisme adalah rasa cinta pada tanah air, ras, bahasa dan sejarah budaya bersama; 2) Nasionalisme adalah suatu keinginan yang tinggi akan kemerdekaan politik, keselamatan dan prestise bangsa; 3) Nasionalisme ialah suatu kebaktian mistis terhadap organisme sosial yang kabur, kadang-kadang bahkan adikodrati yang disebut sebagai bangsa atau *Volk* yang kesatuannya lebih unggul daripada bagian-bagiannya; 4) Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan demi bangsa itu sendiri; 5) Nasionalisme adalah doktrin yang menyatakan bahwa bangsa sendirilah yang harus dominan diantara bangsa-bangsa lain dan harus bertindak agresif.³⁴ Jadi, nasionalisme dapat diartikan sebagai rasa cinta tanah air dan keinginan untuk mempertahankan keberadaan negara dan bangsa dari berbagai bentuk tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.

Selain membutuhkan nasionalisme, dalam revolusi juga dibutuhkan peranan dari tokoh-tokoh yang dipercaya mampu untuk menjadi pemimpin. *Peranan* dapat diartikan sebagai sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.³⁵ Peranan juga dapat diartikan sebagai fungsi seseorang atau sesuatu dalam kehidupan.³⁶

³⁴ Boyd C. Shafer, *Nationalism Myth and Reality*, New York, A Harvest Book Harcourt Brace & World Inc, 1955, hlm. 6.

³⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1982, hlm. 735.

³⁶ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia Jilid II*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983, hlm. 1579.

Menurut Soerjono Soekanto, peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan sebuah peranan. Jadi, peranan disini dapat diartikan sebagai fungsi seseorang yang terkait dengan kedudukannya dalam sebuah kelompok sosial atau masyarakat.³⁷ Dalam pengertian ini berarti seseorang akan memiliki peranan apabila mempunyai kedudukan dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat. Adam Kuper dan Jessica Kuper menyatakan bahwa peran (*role*) adalah perilaku yang diharapkan dalam kerangka posisi sosial tertentu.³⁸ Masyarakat akan terus berperan sesuai dengan keinginan mereka, sepanjang mereka menyadari peran apa yang dijalankannya.

Setiap pemimpin tentunya memiliki sifat, temperamen, watak dan kepribadian sendiri yang unik dan khas, sehingga dapat membedakan tingkah laku dan gayanya dengan orang lain. Gaya hidup seseorang dapat terbentuk dengan dipengaruhi berbagai faktor, yang menjadi faktor utama ialah latar belakang kehidupan dan pengalaman-pengalaman hidupnya. Perbedaan gaya hidup memunculkan beberapa tipe kepemimpinan, misalnya tipe kharismatis, paternalistis, otokratis, *laisser faire*, populis, administratif, dan demokratis.³⁹ Pemimpin dapat diartikan sebagai seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya dalam satu bidang, sehingga ia dapat mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu.⁴⁰

³⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 286.

³⁸ Adam Kuper & Jessica Kuper, *op.cit*, hlm. 935.

³⁹ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta., Rajawali, 1983, hlm. 30-31.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 33.

Bagi sebuah negara yang baru merdeka, diplomasi merupakan langkah yang penting dalam usaha untuk memperoleh pengakuan dari dunia internasional. Secara umum, diplomasi berarti usaha untuk memelihara hubungan antar negara dengan perantara wakil-wakil diplomatik yang khusus, yaitu duta besar, duta atau kuasa usaha (*charge d'affaires*). Diplomasi dalam arti resmi dimulai pada abad ke-15, oleh Republik Venesia (Italia) dan menjadi kebiasaan pada abad ke-16 untuk saling mengakui sebagai negara berdaulat.⁴¹

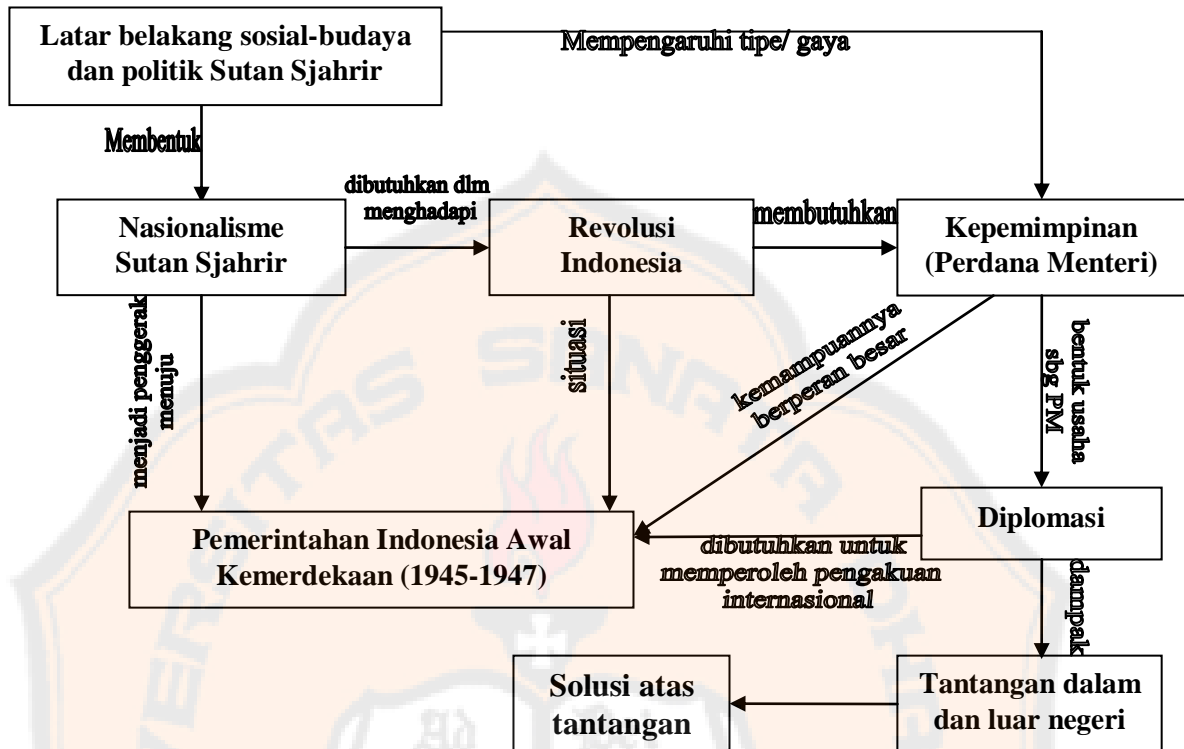
Diplomasi dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hubungan resmi antar negara, dengan melakukan perundingan dan komunikasi informasi antara pemerintah yang akhirnya akan menghasilkan keputusan.⁴² Diplomasi juga dapat berarti hal-hal yang menyangkut hubungan resmi antara satu negara dengan negara lain yang dilakukan oleh wakil-wakilnya.⁴³ Kata diplomasi sering digunakan dalam arti yang luas yaitu membuat dan melaksanakan politik luar negeri. Dalam arti yang bersifat teknis, diplomasi berarti komunikasi antar pemerintah yang mengadakan penyelenggaraan hubungan resmi untuk kepentingan bersama.

⁴¹ A.Heuken, dkk, *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*, Jakarta, Yayasan Cipta Loka Caraka, 1973, hlm. 250.

⁴² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1982, hlm. 253.

⁴³ Save M Dagun, *op.ci*, hlm. 179.

Bagan Kerangka Teoritis



F. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah, dengan melalui tahap-tahap berikut:

a. Pengumpulan sumber (Heuristik)

Setelah menentukan topik langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah ialah heuristik atau pengumpulan sumber. Sumber sejarah disebut juga data sejarah yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis.⁴⁴ Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan berbagai sumber yang terkait dengan topik

⁴⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Bentang Budaya, 2001, hlm. 96.

yang akan ditulis. Bahan puataka yang dijadikan sebagai sumber dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Adapun sumber primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Renungan dan Perjuangan, Mengenang Sjahrir, dan Perjuangan Kita*. Sedangkan sumber sekundernya ialah *Sjahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia, Tempo Edisi Khusus Mengenang Seratus Tahun Sjahrir (Edisi 9-15 Maret 2009), Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir, Apa dan Siapa Sutan Syahrir, Sjahrir Wajah Seorang Diplomat, In Memoriam Sutan Sjahrir (Perjuangan dan Penderitannya), Perjuangan Revolusi, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*.

b. Kritik Sumber (Verifikasi)

Tahap selanjutnya ialah verifikasi, yaitu pengujian terhadap data-data yang ada untuk mengetahui apakah data dapat dipertanggung jawabkan keasliannya atau tidak. Tahap verifikasi ini terdiri dari dua macam yaitu, otentisitas atau keaslian sumber (kritik ekstern), dan kredibilitas, atau kebiasaan dipercayai (kritik intern).⁴⁵

Kritik ekstern digunakan untuk membuktikan keaslian sumber yang akan digunakan. Hal yang diteliti ialah penampilan luar sumber, misalnya kertasnya, tinta, gaya tulisan, bahasa, kalimat, kata-katanya, jenis huruf, dsb. Kritik intern dilakukan untuk meneliti apakah sumber yang digunakan dapat dipercaya

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 101.

kebenarannya. Kritik intern ini dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber sehingga akan diperoleh fakta yang lebih jelas dan lengkap.⁴⁶

Contoh dari verifikasi dalam penulisan skripsi ini ialah ketika penulis akan menggunakan sumber dari *Majalah Tempo Edisi Khusus Seratus Tahun Sjahrir*, penulis harus membandingkan fakta-fakta yang tertulis dalam majalah dengan sumber aslinya. Misalnya dalam sebuah artikel dinyatakan B.M. Diah berpendapat bahwa Maklumat No. X ialah sebuah kudeta halus, untuk membuktikan kebenaran pendapat tersebut penulis membandingkan dengan pendapat B.M. Diah sendiri yang terdapat dalam buku *Butir-butir Padi*.

c. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahap selanjutnya setelah verifikasi, tahap ini merupakan tahap dimana penulis melakukan penafsiran atas fakta-fakta yang telah diuji dan penganalisisan sumber untuk menghasilkan suatu peristiwa yang telah teruji kebenarannya. Tujuan dari interpretasi ialah untuk mengurangi unsur subjektifitas dalam penulisan sejarah. Interpretasi terdiri dari dua macam yaitu analisis yang berarti menguraikan dan sintesis yang berarti menyatukan.⁴⁷ Jadi, dalam tahap ini penulis melakukan fakta-fakta yang telah teruji kebenarannya dengan cara menganalisis data atau fakta, kemudian mensintesis antara data atau fakta yang satu dengan yang lainnya.

Contoh interpretasi dalam penulisan skripsi ini terdapat pada bab II, dimana dalam bab ini penulis mencoba untuk menganalisis latar belakang sosial-budaya, pendidikan, dan politik Sutan Sjahrir sehingga muncul rasa nasionalisme yang

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 102

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 103.

mengantarkannya berperan dalam pemerintahan Indonesia tahun 1945-1947. Dalam mengkaji masalah ini penulis harus melakukan penafsiran terhadap beberapa sumber, hal ini karena dari beberapa sumber yang digunakan oleh penulis tidak memberikan penjelasan yang lengkap dan terinci. Oleh karena itu penulis melakukan analisis dengan mencari keterkaitan antara masalah yang ada dengan teori-teori dan pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini.

d. Penulisan

Langkah terakhir dari penelitian sejarah ialah historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi merupakan penulisan dari rekonstruksi yang bersifat imajinatif dari kejadian di masa lampau yang berdasarkan atas fakta dan data dengan melalui suatu proses. Aspek kronologis sangat diperlukan dalam merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah, agar lebih mudah memberi pengertian kapan peristiwa tersebut terjadi.

Metode penulisan dalam skripsi ini ialah metode deskriptif analitis. Metode sejarah deskriptif menekankan pada penemuan fakta-fakta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁴⁸ Dalam skripsi ini penulis menyajikan model penulisan deskriptif analisis yaitu menggambarkan peranan Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia tahun

⁴⁸ Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 63.

1945-1947, sebuah tinjauan perspektif historis-politis dengan menggunakan sudut pandang yang mengikuti garis perkembangan waktu tertentu.

2. Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan multidimensional, yaitu suatu pendekatan yang memaparkan dan menganalisa berbagai peristiwa menggunakan konsep-konsep ilmu sosial yang relevan dengan pokok-pokok kajiannya. Pendekatan multidimensional dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologis, psikologis, dan politik.

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji segi-segi sosial dalam suatu peristiwa. Dalam penelitian ini pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat keadaan politik dan sosial negara Indonesia pada masa awal kemerdekaan, dimana pada masa itu dibutuhkan seorang pemimpin yang bebas dari noda fasisme agar dapat memperoleh pengakuan dari negara-negara lain. Sutan Sjahrir sebagai tokoh yang bersih merasa terpanggil untuk mempertahankan kedaulatan RI.

Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang berorientasi pada tingkah laku manusia, baik di dalam maupun di luar. Tingkah laku manusia dapat dijelaskan dengan adanya tanggapan dari dalam diri manusia.⁴⁹ Melalui pendekatan ini, penulis dapat menguraikan sifat-sifat dan tingkah laku Sutan Sjahrir yang berjiwa nasionalis, dan berpandangan jauh ke depan. Jiwa nasionalis yang mendorongnya untuk ikut ambil bagian dalam menjalankan pemerintahan Indonesia sebagai Ketua KNIP, dan Perdana Menteri selama tiga kali berturut-

⁴⁹ Robert F, Berchover, *A Behavioural Approach to Historical Analysis*, New York, A Free Press Paperback, hlm. 7.

turut. Pandangannya yang jauh ke depan membuatnya memilih jalan diplomasi sebagai jalan penyelesaian masalah dengan Belanda. Selain itu latar belakang sosial-budaya, pendidikan dan politik Sutan Sjahrir juga mendorongnya untuk ikut dalam dunia perpolitikan Indonesia.

Pendekatan politik digunakan untuk melihat peranan Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia tahun 1945-1947 dan hal-hal yang melandasi kepemimpinan Sjahrir selama menjabat sebagai perdana menteri Indonesia, misalnya keterlibatannya dalam organisasi politik yaitu Perhimpunan Indonesia (PI) dan PNI-Baru.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “Peranan Sutan Sjahrir dalam Pemerintahan Indonesia tahun 1945-1947” ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Berupa pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Bab ini menyajikan uraian tentang latar belakang kehidupan sosial-budaya dan politik Sutan Sjahrir.

Bab III: Bab ini menyajikan uraian mengenai peranan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia antara tahun 1945-1947.

Bab IV: Bab ini menyajikan uraian mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia.

Bab V: Bab ini berupa kesimpulan dari penulisan permasalahan yang diuraikan pada bab II, III dan IV.

BAB II

LATAR BELAKANG KEHIDUPAN SUTAN SJAHRIR

A. Latar Belakang Sosial-Budaya

1. Latar Belakang Keluarga dan Lingkungan Sosial

Sutan Sjahrir lahir pada tanggal 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat, sebagai anak Moh. Rasad Gelar Maha Raja Soetan yang menjabat sebagai Hoofd Jaksa pada *Landraad* (Pengadilan Negeri) di Medan.¹ Ayah Sjahrir berasal dari Koto Gadang dan ibunya, Siti Rabiyyah berasal dari Natal, Sumatera Utara. Ibunya merupakan isteri kelima dari enam orang isteri ayahnya.² Ketika usianya baru satu tahun ia meninggalkan kota Padang dan bermukim di Jambi, mengikuti tugas ayahnya. Pada usia empat tahun, Sjahrir pindah ke Medan dan di kota inilah ia menghabiskan masa kecilnya.³

Kakek Sjahrir, Lemang Sutan Palidin, dan ayahnya merupakan jaksa yang bekerja bagi pemerintah Hindia Belanda. Pada masa itu, jabatan sebagai jaksa merupakan jabatan yang paling bergengsi di Koto Gadang selain jabatan guru dan mantri. Jadi, keluarga Sjahrir dapat dikatakan masuk dalam kalangan elite

¹ Subadio Sastrosatomo, *Sjahrir: Suatu Persektif Manusia dan Sejarah*, dalam *Mengenang Sjahrir*, (Ed) Rosihan Anwar, Jakarta, PT Gramedia, 1980, hlm ix. J.D.Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan Peranan Kelompok Sjahrir*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1993, hlm 43.

² St. Rais Alamsjah, *10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang*. Jakarta, Penerbit Mutiara, 1952, hlm 137. Tamar Djaja, *Rohana Kudus Srikandi Indonesia Riwayat dan Perjuangannya*, Jakarta, Mutiara, 1980, hlm 31.

³ Rudolf Mrazek, *Sjahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1996, hlm 34.

pegawai Belanda.⁴ Latar belakang keluarga modern ayahnya di Koto Gedang merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi pembentukan cakrawala intelektual Sjahrir.

Ibu Sjahrir, Siti Rabiyah merupakan keturunan langsung dari Tuanku Besar Sintan dari Natal (orang terkemuka di Tapanuli Selatan).⁵ Ia juga masih mempunyai darah Minang dan lahir sebagai orang Minang yang tinggal “di rantau”.⁶ Rabiyah bangga akan gelar Mandailing-nya dan berperilaku layaknya seorang bangsawan. Meskipun demikian, kebanggaan Rabiyah akan darah bangsawannya tidaklah membuat ia dan anak-anaknya menjadi orang yang asing bagi Minangkabau. Daerah Natal merupakan daerah yang berdekatan dengan wilayah Minangkabau, sejak dahulu banyak perantau Minang yang datang ke Natal, sehingga dalam hal budaya kedua daerah ini tidak jauh berbeda. Perkawinan antara perantau Minang dengan perempuan Natal, khususnya perempuan berdarah bangsawan, seperti perkawinan Rabiyah dengan ayah Sjahrir adalah suatu kelaziman dan diperkenankan oleh tradisi. Rabiyah beserta suami dan anaknya, tinggal di Minangkabau untuk waktu yang amat singkat. Sebagian besar masa kehidupan keluarganya dihabiskan di berbagai tempat di luar tanah Minang, ikut kemana suaminya ditugaskan.⁷

Setahun setelah Sjahrir lahir, orangtuanya pindah ke Jambi, ia tinggal di kota ini hingga berumur empat tahun. Kemudian pindah ke Medan dan tinggal di

⁴ *Rumah di Kaki Singgalang*, dalam *Majalah Tempo Edisi Khusus 100 tahun Sjahrir*, Edisi 9-15 Maret 2009, hlm 22. Tamar Djaja, *op.cit.*, hlm 62.

⁵ Rudolf Mrazek, *op.cit.*, hlm 4.

⁶ Rantau adalah tempat atau wilayah di luar batas-batas wilayah Minangkabau, rantau juga dapat diartikan sebagai tempat dimana unsur-unsur budaya Minangkabau yang mengikat dapat di lepaskan.

⁷ *Ibid*, Hal 5.

Kampung Aur. Orang-orang yang tinggal di daerah ini merupakan orang yang cukup berada dan mampu untuk mengirim anak-anaknya ke sekolah-sekolah modern. Sjahrir merupakan anak lelaki terpandai dalam keluarganya. Dalam ujian-ujian yang secara teratur diberikan oleh ayahnya, Sjahrir biasanya memperoleh angka 9 atau 10. Hanya untuk tulisan indah dia jarang mendapat angka lebih dari lima.⁸

Pada tahun 1915, ketika berusia enam tahun, Sjahrir masuk ke sekolah terbaik yang ada di Medan, yaitu *Europeesche Lagere School* (ELS) atau Sekolah Dasar Eropa. Menurut strata sosial, sekolah dasar di Hindia Belanda pada waktu itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. ELS merupakan sekolah dasar yang paling bergengsi di Hindia Belanda, karena dikhususkan untuk anak-anak keturunan Belanda dan keturunan Timur Asing. Sekolah ini diperbolehkan bagi bumiputera yang berasal dari golongan tertentu, seperti bangsawan, pejabat tinggi dan tokoh-tokoh terkemuka yang disegani oleh orang-orang pribumi dan Belanda. Sekolah dasar lainnya dengan bahasa pengantar bahasa Belanda ialah HIS (*Hollandsh Inlanderscheschool*), sekolah ini khusus bagi penduduk pribumi yang berasal dari golongan bangsawan, dan pegawai-pegawai negeri. Sedangkan untuk penduduk pribumi yang berasal dari golongan biasa, didirikan sekolah berbahasa Melayu, yaitu *Inlandeshe school* dan *Volksschool* (Sekolah Desa). Pada masa itu hanya 4.631 bumiputera yang masuk sekolah dasar di Hindia Belanda yang berpenduduk 60 juta jiwa, dibandingkan dengan 26.871 anak Eropa.⁹ Sjahrir merupakan salah satu bumiputera yang dapat mengenyam pendidikan di ELS, ini

⁸ Rudolf Mrazek, *op.cit*, hlm 35. J.D. Legge, *op.cit*, hlm 44.

⁹ Sumarsono Mestiko, dkk, *Pendidikan Indonesia Dari Jaman Ke Jaman*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986, hlm 112-123.

menunjukkan bahwa ia berasal dari keluarga yang masuk dalam golongan atas. Hal ini juga menunjukkan bahwa sejak kecil Sjahrir sudah menikmati pendidikan yang bermutu dan bergengsi di zamannya.

Hanya sedikit yang dapat diketahui tentang Sjahrir pada masa kecilnya itu, dia merupakan anak yang senang bermain sepak bola. Dalam permainan sepak bola ia menjadi seorang penyerang tengah yang tangkas dan lincah. Sjahrir juga pandai bermain biola, ia mampu memainkan *fox-trot* untuk mendapatkan uang saku di Hotel de Boer Medan yang mewah dan sangat kolonial, dimana hanya boleh dimasuki oleh orang kulit putih, kecuali para pelayan dan musisi.¹⁰ Kegiatan yang dilakukan Sjahrir pada masa kecilnya ini, menunjukkan bahwa sejak kecil ia sudah belajar untuk mandiri dan berani untuk tampil di tempat yang hanya diperuntukkan bagi orang Eropa.

Selain memperoleh pendidikan formal di ELS, Sjahrir juga memperoleh pendidikan dasar Islam dari ayahnya. Ia tinggal di rumah yang penuh keragaman, majalah-majalah Hindia dalam bahasa Melayu dan Belanda biasa tergeletak di meja tempat minum kopi. Ketika berumur tiga belas tahun, Ibunya meninggal dunia, tanggungjawab untuk mengurus keluarga kecil ini diambil alih oleh saudara perempuan tertua Sjahrir. Ayahnya tidak punya banyak waktu untuk memberi perhatian kepada mereka, kecuali untuk mengurus pendidikan. Sulit bagi ayahnya untuk melakukan lebih dari itu, hal ini disebabkan karena saudara Sjahrir berjumlah sekitar 25 orang dari beberapa isteri ayahnya.

¹⁰ Rudolf, Mrazek, *op.cit.* Hal 39.

Pada tahun 1920'an, ketika berusia belasan tahun, Sjahrir mengalami masa yang disebut oleh orang Minang sebagai masa rantau dan "etis baru".¹¹ Pada masa ini kota Medan sedang mengalami pertumbuhan sebagai sebuah pemukiman modern. Pada tahun 1913, kuli-kuli bebas mulai dikerahkan untuk membersihkan jalan-jalan kota, dan pada tahun 1928 mobil mulai digunakan. Pada tahun 1924, lapangan pacu utama di Medan dipilih sebagai perhentian pertama bagi penerbangan lintas Euro-Asia yang baru dibuka di Hindia Belanda.¹² Di daerah timur tepatnya di wilayah Deli, dibangun perkebunan kopi, tembakau dan karet yang ditata secara teratur dan dihubungkan dengan kereta api. Medan merupakan kota multikultur, kota ini didiami oleh orang-orang Eropa pemilik perkebunan, para pegawai yang bekerja bagi pemerintah, orang-orang Cina, sebagian kecil orang-orang India, pribumi dan kuli-kuli yang didatangkan dari Jawa.¹³ Sjahrir menghabiskan masa kecil dan remajanya di kota yang penuh keragaman itu, hal ini akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan cara berfikirnya dalam memandang suatu perbedaan. Ia menjadi seorang nasionalis dan tidak hanya membangga-banggakan suku atau etnis tertentu. Kepribadian seperti ini yang dibutuhkan oleh seorang negarawan.

Sjahrir kecil dan muda hidup di kota Medan seiring dengan pertumbuhan kota tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, ia akrab dengan segala hal yang bernuansa Belanda. Ruang kelas ELS dan MULO, kantor ayahnya, rumahnya dan rumah teman-temannya serta sanak familinya semuanya bergaya Belanda. Bahkan

¹¹ *Ibid*, halm 42.

¹² *Ibid*, hlm 43.

¹³ Dirk A. Buiskool, *Medan: A Plantation City On The East Coast of Sumatra 1870-1942*, dalam Freek Colombijn, dkk, (Ed), *Kota Lama, Kota Baru Sejarah Kota-Kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan*, Jogjakarta, Penerbit Ombak, 2005, hlm 278.

dalam percakapan sehari-hari, terutama di sekolah Ia menggunakan bahasa Belanda. Namun pada sisi lain, Sjahrir dapat melihat langsung kehidupan di dunia jajahan, Ia sering melihat kuli-kuli pribumi yang cukup berani datang ke kantor ayahnya untuk mengeluhkan penghinaan dan kebengisan atasan-atasan mereka. Di kantor iparnya, Dr.R.M.W Djoeana, Sjahrir sering bertemu dengan kuli, tukang becak, pelacur, penderita penyakit paru-paru, dan pecandu narkotik yang sering datang untuk menyampaikan keluhan dan mengharapkan pertolongan dari iparnya yang berkerja sebagai dokter ini.¹⁴ Kenyataan seperti ini sering dijumpai Sjahrir dari lingkungan tempat tinggalnya, yang akan berpengaruh terhadap kepribadiannya dan pandangannya mengenai kolonialisme.

Sjahrir dapat dikatakan sebagai orang yang terlepas dari hal-hal yang berbau tradisional, dan primordial. Dapat dikatakan demikian karena tidak banyak ditemukan kenangan masa kecil dan kungkungan budaya asal yang melekat sebagaimana yang berlaku kuat pada orang-orang besar sezamannya. Sjahrir boleh dikatakan tidak pernah menggunakan kata “Minangkabau”, ia juga di gambarkan sebagai orang yang cepat dan mudah melepaskan diri dari tradisi Minangkabau atau lingkungan pemikiran serta moral Timur menuju lingkungan etika dan intelektual Barat.

¹⁴ Rudolf Mrazek, *op.cit*, hlm 50.

2. Latar Belakang Pendidikan

a) Pendidikan di ELS dan MULO

Pada tahun 1915, ketika berusia enam tahun, Sjahrir masuk *Europeesche Lagere School* (ELS) atau Sekolah Dasar Eropa.¹⁵ ELS menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di sekolah. Pada awalnya sekolah ini hanya terbuka bagi warga Belanda di Hindia Belanda, sejak tahun 1903 kesempatan belajar juga diberikan kepada orang-orang pribumi dan Tionghoa yang kaya dan terpandang.¹⁶

Tahun 1923 Sjahrir lulus dari ELS, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Lanjutan (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*-MULO), sekolah ini juga merupakan sekolah terbaik di Medan.¹⁷ MULO bersifat lebih “etis” dibandingkan dengan Sekolah Menengah Atas Warga Negara (*Hogere Burgerschool*-HBS), HBS setingkat dengan sekolah-sekolah di Belanda dalam kurikulumnya. Sementara itu, MULO dirancang khusus untuk Hindia, mata pelajaran yang tidak ada gunanya di Hindia diganti dengan mata pelajaran yang relevan untuk kebudayaan Hindia.¹⁸ Sekolah ini merupakan bagian dari sistem pendidikan zaman kolonial Belanda di Indonesia. Pada masa sekarang, MULO setara dengan SMP (Sekolah Menengah Pertama). MULO menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pada akhir tahun 30-an, sekolah-sekolah MULO sudah ada hampir di setiap kabupaten.¹⁹

¹⁵ *Anak Minang Jago Menyerang*, dalam *Majalah Tempo Edisi Khusus 100 tahun Sjahrir*, Edisi 9-15 Maret 2009, hlm 21.

¹⁶ *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm 37.

¹⁷ Rudolf Mrazek, *op.cit*, hlm 37.

¹⁸ *Idem*. M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta, Serambi, 2001, hlm 333.

¹⁹ *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*, hlm 38.

Peraturan pendidikan dasar untuk masyarakat pada zaman kolonial pertama kali dikeluarkan pada tahun 1848, dan disempurnakan pada tahun 1892, yang menghendaki pendidikan dasar ada pada setiap Keresidenan, Kabupaten, Kawedanan, atau pusat-pusat kerajinan, perdagangan, atau tempat yang dianggap perlu. Peraturan yang terakhir (1898) diterapkan pada tahun 1901 setelah adanya Politik Etis atau *Politik Balas Budi* dari Kerajaan Belanda, yang diucapkan pada pidato penobatan Ratu Belanda Wilhelmina pada 17 September 1901, yang intinya ada 3 hal penting, yaitu irigasi, transmigrasi, dan pendidikan.²⁰ Untuk menerapkan peraturan yang telah dibuat tersebut, maka dalam bidang pendidikan pemerintah kolonial membangun sekolah-sekolah berorientasi barat, seperti ELS dan MULO. Tujuannya ialah untuk mencetak pegawai-pegawai berpendidikan yang akan dipekerjakan di kantor-kantor pemerintah.²¹

Pada waktu Sjahrir duduk di ELS, perpustakaan untuk pelajar bumiputera berbahasa Belanda (*Bibliotheek voor Nederlands-lezende Inheemsen*) sedang melakukan penerbitan buku cerita anak yang disebarluaskan di Hindia terutama untuk murid-murid ELS dan MULO. Di kemudian hari Sjahrir mengaku tidak melewatkan kesempatan itu, ia rajin membaca ratusan buku dan novel kanak-kanak Belanda yang ada. Buku-buku tersebut diantaranya ialah buku *Puss in Boots* karya Oltman, *Little Shepherd* karya Malot, karya-karya Karl May tentang Indian Amerika, *Don Outxote*, dan sejarah populer Jawa karya Nyonya Fruin-

²⁰ M.C. Ricklefs, *op.cit*, hlm 320. G.Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 (I) Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggajati*, Jogjakarta, Kanisius, 1988, hlm, 21.

²¹ *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*, hlm 23.

Mess, serta buku-buku yang menceritakan tentang kisah-kisah “etis” dari Hindia karya Marie van Zeggelen.²²

Keterangan dalam paragraf di atas, memperlihatkan bahwa Sjahrir adalah seorang anak yang senang membaca. Ia tidak melewatkan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dari hal-hal yang dapat dipelajarinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa sejak kecil Sjahrir memiliki kemauan untuk belajar. Dari buku-buku sejarah populer Jawa karya Nyonya Fruin-Mess, ia memperoleh pengetahuan mengenai sejarah dan gambaran umum kehidupan di pulau Jawa sehingga ia dapat membandingkan dengan keadaan di Medan pada saat itu. Dari novel dan karya sastra lainnya, ia memperoleh gambaran mengenai lika-liku kehidupan yang dijalani oleh manusia. Dengan demikian, cakrawala berfikir Sjahrir juga mendapat pengaruh dari buku-buku yang telah dibacanya sejak usia dini.

b) Pendidikan di AMS

Pada 1926, Sjahrir selesai dari MULO, kemudian masuk sekolah lanjutan atas (AMS) di Bandung.²³ AMS adalah singkatan dari bahasa Belanda *Algemeene Middelbare School* yang juga merupakan bagian dari sistem pendidikan zaman kolonial Belanda di Indonesia. AMS setara dengan SMA (Sekolah Menengah Atas) pada saat ini, yakni pada jenjang sekolah lanjutan tingkat atas. AMS menggunakan pengantar bahasa Belanda dan lama belajar di sekolah ini ialah tiga tahun. AMS terdiri dari dua jurusan, yaitu Bagian A (Pengetahuan Sosial) yang dibagi lagi menjadi Bagian A1 (Sastra Timur) dan A2 (Klasik Barat), dan Bagian

²² Rudolf Mrazek, *op.cit*, hlm 40.

²³ *Ibid*, hlm 52.

B (Pengetahuan Alam). Seperti halnya, sekolah-sekolah berbahasa pengantar bahasa Belanda lainnya, anak-anak yang bersekolah di AMS juga berasal dari golongan pribumi yang kaya dan terpandang.²⁴

Ijazah MULO yang diperoleh Sjahrir di Medan memungkinkannya untuk menjadi pegawai rendah, misalnya di jawatan kereta api, pegadaian atau dapat juga menjadi guru sekolah menengah. Akan tetapi MULO diperuntukkan bagi pendidikan di bawah AMS, pada gilirannya AMS dimaksudkan untuk memberi peluang bagi lulusannya agar dapat menjajaki jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Perguruan Tinggi) di Hindia atau di negeri Belanda.²⁵ Di AMS, Sjahrir mengambil jurusan Westers Klassiek atau Bagian A2 (Klasik Barat). Kurikulum di jurusan ini mempersiapkan para siswanya untuk bisa melanjutkan di perguruan tinggi hukum. Sebagaimana ditunjukkan oleh sekolah yang dipilihnya, Sjahrir dikirim ke AMS agar kelak dapat meneruskan karir ayahnya menjadi jaksa dengan posisi yang lebih tinggi.²⁶

Sebagai seorang pelajar, Sjahrir telah menunjukkan sifat kritisnya dengan lebih mengutamakan pengertian daripada sekedar menghafalkan pelajaran. Sifat-sifat ini terutama menonjol pada mata pelajaran sejarah dan bahasa latin. Buku-buku bacaan yang berisi tentang filsafat dan sejarah Kerajaan Yunani-Romawi menjadi buku pelajaran yang menarik bagi Sjahrir. Ia tidak hanya sekedar mempelajari bahasa Latin saja, akan tetapi senantiasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan filsafat dan Kerajaan Romawi. Sjahrir juga

²⁴ *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*, hlm 38.

²⁵ M.Said & D.Mansoer, *Mendidik Dari Zaman ke Zaman*, Djakarta, Pustaka Rakjat, 1953, hlm 175.

²⁶ *Anak Minang Jago Menyerang*, *op.cit*, hlm 21. J.D. Legge. *op. cit*, hlm. 44.

menguasai pelajaran sejarah sebagai modal dalam mengupas berbagai masalah, khususnya yang berhubungan dengan perkembangan masyarakat dan dunia internasional, serta mengenai perkembangan kapitalisme dan kolonialisme.²⁷

Uraian diatas menunjukkan bahwa bagi Sjahrir, buku-buku sejarah memiliki peran yang penting untuk membuka wawasannya. Hal ini terlihat pada kemauannya untuk tidak sekedar menghafal pelajaran yang diberikan, akan tetapi dipelajarinya sungguh-sungguh dengan mencari maknanya. Selain itu, paragraf diatas juga menunjukkan bahwa persoalan kapitalisme dan kolonialisme telah sering dipelajarinya ketika masih duduk dibangku AMS. Perhatiannya terhadap perkembangan masyarakat Indonesia juga telah muncul seiring dengan adanya pemberontakan PKI, ia berusaha memahaminya dalam persepektif filsafat dan sejarah perkembangan masyarakat.

Di kalangan siswa sekolah menengah (AMS) Bandung, pada mulanya Sjahrir bukan murid yang menonjol, namun pada perkembangannya ia memperlihatkan karakternya yang pandai bergaul, pemberani dan mahir mendebat gurunya.²⁸ Sjahrir bukanlah tipe siswa yang hanya menyibukkan diri dengan buku-buku pelajaran dan pekerjaan rumah. Ia aktif dalam klub debat di sekolahnya. Sjahrir juga berkecimpung dalam aksi pendidikan pemberantasan buta huruf secara gratis bagi anak-anak dari keluarga tak mampu dalam *Tjahja Volks Universiteit* (Perguruan Nasional “Cahaya”).²⁹ Disini terlihat bahwa

²⁷ Syahbudin Mandaralam, *Apa dan Siapa Sutan Syahrir*, Jakarta, PT. Rosda Jayaputra, 1987, hlm 4.

²⁸ Hamdani, *Sutan Sjahrir di Masa Mudanya*, dalam *Mengenang Sjahrir*, Rosihan Anwar (Ed), Jakarta, PT Gramedia, 1980, hlm 71.

²⁹ *Anak Minang Jago Menyerang*, *op.cit.* hlm 21.

meskipun berasal dari keluarga kaya dan terpandang, Sjahrir memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Selain menjalani aktifitas di atas, Sjahrir bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia (*Batovis-Bandungse Toneel Vereniging Van Indonesie Studerenden*) sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga aktor. Mereka mengadakan pementasan lakon-lakon patriotik di daerah Priangan untuk mengumpulkan dana bagi kebutuhan Perguruan Nasional “Cahaya”.³⁰ Lakon-lakon patriotik yang ditulis dan diperankan oleh Sjahrir, semakin memperkuat kesadaran kebangsaan dalam dirinya.

Sjahrir bersama teman-temannya di AMS juga bergabung dalam sebuah study club yang bernama *Patriae Scientiaequae* (PSQ), artinya untuk tanah air dan ilmu pengetahuan. Dalam kelompok belajar ini, Sjahrir bersama teman-temannya sering menyelenggarakan diskusi politik. Hal seperti ini sudah menjadi tradisi bagi kaum muda untuk melakukan perdebatan mengenai ide-ide kebangsaan disetiap pertemuan, disini Sjahrir belajar untuk mengasah kemampuannya dalam berdiskusi. Keaktifan Sjahrir dalam politik lebih terlihat lagi ketika ia ikut dalam pendirian perhimpunan pemuda nasionalis, yakni “*Jong Indonesie*” dan majalah perhimpunan.³¹ Perhimpunan itu kemudian berubah nama jadi Pemuda Indonesia yang menjadi motor penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia, yaitu kongres monumental yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada tahun 1928.³²

Salah satu kegiatan Sjahrir yang terkenal di kalangan pelajar AMS adalah kebiasaannya membaca *Algemene Indische Dagblad* (AID), yaitu surat kabar

³⁰ Hamdani, *op.cit*, hlm 76.

³¹ Rudolf Mrazek, *op.cit*, hlm 64. Hamdani, *op. cit.* hlm 73.

³² G.Moedjanto, *op.cit*, hlm 56.

berbahasa Belanda yang dipasang pada papan (*aanplak bord*)³³ setiap pukul enam sore. Sebenarnya surat kabar tersebut dimaksudkan untuk pembaca warga Belanda, namun Sjahrir dan beberapa orang temannya sering membaca surat kabar tersebut. Seringkali ia dan teman-temannya ketahuan dan harus diusir oleh polisi Belanda. Topik berita yang ingin dibaca oleh para pelajar itu ialah berita tentang pemberontakan PKI dan pembuangan anggota-anggotanya ke Boven Digoel. Karena berita tersebut merupakan berita yang tidak disenangi oleh pemerintah Belanda, maka para pelajar sering diusir ketika ketahuan membaca surat kabar tersebut.³⁴ Dari hal ini, bisa diketahui bahwa Sjahrir pada waktu itu senantiasa mengikuti perkembangan aktual masyarakat Indonesia. Selain itu, disini terlihat usaha-usaha Sjahrir untuk mengapresiasi perjuangan dan keberaniannya untuk menerima resiko yang akan dihadapinya setelah melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang tersebut.

Sjahrir merupakan pelajar yang aktif dalam berbagai bidang, namun keaktifannya dalam kegiatan politik tidak membuat ia meninggalkan hobinya bermain sepak bola. Ia bergabung dalam perkumpulan sepak bola “*Voetbalvereniging Poengkoer*” bersama teman-temannya. Dalam permainan sepak bola, Sjahrir merupakan sosok yang gesit dan cekatan dalam menghadapi lawan, meskipun demikian ia tetap memiliki jiwa sportivitas yang tinggi.³⁵ Kesibukan Sjahrir dalam studi dan kegiatan sosial dan politik tidak membuatnya lupa akan pentingnya berolahraga. Baginya, olahraga dapat memberikan

³³ Sejenis papan pengumuman.

³⁴ Burhanuddin, *Sjahrir yang Saya Kenal*, dalam *Mengenang Sjahrir*. Rosihan Anwar, (Ed), Jakarta, PT Gramedia, 1980, hlm 48.

³⁵ *Anak Minang Jago Menyerang*, *op.cit*, hlm 21. Hamdani, *op.cit*, hlm 72.

keseimbangan hidup, dimana ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Dengan olahraga Sjahrir akrab dengan sportivitas, yang sangat berguna bagi karir politiknya dikemudian hari. Jiwa dan sifat yang sama ini merupakan karakteristik Sjahrir yang tercermin dalam kehidupannya.

c) Pendidikan di Universitas Amsterdam

Setamat dari AMS pada tahun 1929, Sjahrir kemudian melanjutkan studinya ke Fakultas Hukum, Universitas Amsterdam di Negeri Belanda. Ketika berada di Negeri Belanda, ia tinggal bersama kakak perempuannya, Sjahrizal Djoeana, di kawasan Amsterdam Selatan.³⁶ Meskipun sudah mengecap kehidupan yang relatif modern ketika bersekolah di AMS di Bandung, namun Amsterdam lebih kosmopolitan daripada Bandung dan pergaulan antar-manusianya lebih bersahabat apabila dibandingkan dengan di Hindia Belanda.

Amsterdam memang memikat bagi Sjahrir, ia sering mendatangi pusat-pusat budaya atau tempat-tempat perkumpulan mahasiswa. Salah satu tempat yang paling sering ia kunjungi adalah bioskop atau Cinema Tuschinski di kawasan Rembrandtplein.³⁷ Beberapa hari setelah tiba di Amsterdam, Sjahrir langsung menghubungi ketua perkumpulan mahasiswa Sosial Demokrat Amsterdam (*Amsterdamsche Sociaal Democratische Studenten Club*). Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sol Tas, yang pada saat itu menjabat sebagai ketua ASDSC:

Waktu itu pada tahun 1929, saya sebagai seorang mahasiswa dan ketua perkumpulan mahasiswa sosial demokrat Amsterdam (ASDSC), ketika pengantar pos membawakan saya surat dari seorang pemuda Indonesia

³⁶ Rudolf, Mrazek, *op.cit*, hlm 92.

³⁷ Antara Tuschinski dan Stadsschouwburg, dalam *Majalah Tempo Edisi Khusus 100 tahun Sjahrir*, Edisi 9-15 Maret, 2009, hlm 24.

yang baru datang di Amsterdam dan menginginkan informasi mengenai sosialisme dan gerakan sosialis. Hal ini sangat menarik perhatian saya.³⁸

Sjahrir merupakan mahasiswa Indonesia pertama yang menghubungi dan kemudian bergabung dalam perkumpulan mahasiswa sosialis tersebut. Pada masa itu hanya sedikit orang-orang Indonesia di Negeri Belanda yang melakukan kontak dengan perkumpulan tersebut, pada umumnya mereka berhati-hati dan menjauhkan diri dari kelompok-kelompok politik Belanda.³⁹ Di sini terlihat ada beberapa hal dari dalam diri Sjahrir, pertama terlihat adanya keberanian dalam diri Sjahrir, ia tidak takut terlibat dalam perkumpulan mahasiswa sosialis di Belanda. Kedua, Sjahrir memiliki kesadaran berorganisasi yang cukup tinggi, baginya tidak cukup hanya memfokuskan diri pada studi saja. Ketiga, keterlibatannya dalam perkumpulan mahasiswa sosialis ini menunjukkan kemana arah ideologi yang akan dipilih oleh Sjahrir, yaitu sosialisme.

Perkumpulan mahasiswa sosialis adalah suatu organisasi yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari SDAP (*Sociaal Democratische Arbeiders Partij* atau Partai Buruh), namun perkumpulan ini banyak berhubungan dengan sayap kiri SDAP. SDAP sebagai partai sosial demokrat, menentang kolonialisme dan menghendaki Indonesia merdeka dengan jalan evolusi. Sebaliknya perkumpulan mahasiswa sosialis yang berhaluan kiri dalam diskusinya tentang kolonialisme berdasarkan ideologi Marxis menentang pandangan yang samar-samar, dan sentimental yang umumnya ada dalam kalangan sosial demokrat Belanda. Dalam diskusi-diskusi yang diadakan, mahasiswa sama-sama berpendapat bahwa Hindia

³⁸ Sol Tas, *Kenangan pada Sjahrir*, dalam *Mengenang Sjahrir*, (Ed) Rosihan Anwar, Jakarta, PT Gramedia, 1980, hlm 233.

³⁹ *Idem*.

Belanda harus merdeka secepat mungkin.⁴⁰ Kegiatan Sjahrir dalam perhimpunan ini memberikan pengalaman berorganisasi yang lebih, karena ia terlibat langsung dalam politik di Negeri Belanda.

Sjahrir merupakan salah satu dari mahasiswa yang mempelajari sosialisme secara mendalam. Ia banyak membaca buku-buku Hilferding dan Rosa Luxemburg mengenai imperialisme, buku-buku tentang teori sosialisme karya Karl Kautsky, Otto Bauer, Hendrik de Man, dan Marx and Engels.⁴¹ Pergaulan Sjahrir berputar kian cepat, untuk berberapa lama ia sempat menghilang dan tenggelam dalam perkawanan radikal, ia bergaul dengan kaum anarkis kiri. Dalam pergaulan ini, mereka menjaga diri untuk terbebas dari sistem kapitalisme dengan menghindari dari pekerjaan yang mencari untung, mereka hidup dan bertahan dengan berbagi apapun yang mereka miliki. Akan tetapi Sjahrir muncul kembali dan melepaskan diri dari perkawanan radikal tersebut dengan cepat, setelah itu perhatiannya terhadap sosialisme mengambil bentuk yang lebih praktis.⁴²

Sjahrir sebagai mahasiswa sesuai dengan semangat mudanya ingin merangkul seluruh kemanusiaan, terutama rakyat jelata atau kaum buruh. Dalam menyelami sosialisme dan gerakan sosialis, ia melibatkan diri dalam gerakan Sarekat Buruh dan bekerja pada Sekretariat Federasi Buruh Transport Internasional yang pada waktu itu memainkan peranan internasional yang sangat penting. Kegiatan yang dilakukan Sjahrir melebihi kebanyakan mahasiswa Indonesia yang berada di Belanda, yang kebanyakan hanya membaca buku

⁴⁰ Subadio Sastrosatomo, *op.cit*, hlm xiv.

⁴¹ Rudolf Mrazek, *op.cit*, hlm 100.

⁴² Sol Tas, *op.cit*, hlm 239.

tentang organisasi.⁴³ Dari sini, semakin kelihatan arah ideologi Sjahrir, yaitu mengarah pada sosialisme.

Mengenyam pendidikan di dunia barat, memperkenalkan Sjahrir pada kehidupan yang bebas tanpa adanya perbedaan antara individu. Sebuah realita kehidupan yang sangat berbeda dengan apa yang dilihat dan dialaminya ketika berada di Indonesia. Belajar dari realitas kehidupan yang dilaluinya, Sjahrir menumbuhkan nasionalisme dan karakteristik pemikiran yang berbeda dengan tokoh lainnya, hal ini akan berpengaruh terhadap kepemimpinannya sebagai perdana menteri kelak.

B. Latar Belakang Politik

1) Perhimpunan Indonesia (PI)

Selain melibatkan diri dalam perkumpulan mahasiswa sosialis di Negeri Belanda, Sjahrir juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia (PI) yang ketika itu dipimpin oleh Mohammad Hatta. Pada tanggal 20 September 1927, Moh. Hatta dan tiga orang anggota PI, yaitu Abdul Madjid Djojohadiningrat, Nazir Pamuntjak, dan Ali Sastromidjojo ditahan oleh pemerintah Belanda. Sesudah diajukan ke pengadilan Belanda di Den Haag pada tanggal 20 Maret 1928, keempat mahasiswa tersebut kemudian dibebaskan.⁴⁴

Setelah bebas dari segala tuduhan, Hatta kemudian mempersiapkan kader-kader baru sebagai penerus PI. Ada tiga nama yang dicalonkan sebagai pengganti Hatta sebagai pimpinan, tiga nama tersebut ialah Abdullah Sjukur, mahasiswa

⁴³ *Berkembang di Iklim Barat*, dalam *Majalah Tempo Edisi Khusus 100 tahun Sjahrir*, Edisi 9-15 Maret 2009, hlm 26.

⁴⁴ G.Moedjanto, *op.cit*, hlm 48.

hukum yang telah mencapai tingkat kandidat pada Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Rusbandi, mahasiswa Hukum pada Universitas Leiden dan Sutan Sjahrir yang baru lulus dari AMS di Bandung. Pada akhirnya, Abdullah Sjukur yang terpilih sebagai ketua PI yang baru.⁴⁵

Ketika menjadi ketua PI, Hatta menjadi ketua delegasi Indonesia untuk menghadiri Kongres Internasional Anti Penindasan Kolonialisme dan Imprealisme. Kongres ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 15 Februari 1927 di Brussel.⁴⁶ Pada akhir kongres disepakati oleh anggota kongres untuk mendirikan suatu organisasi baru yang akan meneruskan usaha liga dengan nama *League Against Imprealism and for National Independence* (Liga Anti Imprealisme dan untuk Kemerdekaan Nasional). Liga ini mempunyai perwakilan di Negeri Belanda, dan PI merupakan pusat dan penggeraknya. Pemeriksa pembentukan Liga ialah seorang komunis Jerman, yaitu Willy Muzenberg pada tahun 1927.⁴⁷

Kaum Komunis berhasil membuat perpecahan dalam tubuh Liga dan mereka juga berhasil menguasai PI, serta dapat menyingkirkan setiap orang yang melawan pengaruh komunis. Pada waktu itu yang menjadi ketua PI ialah Abdullah Sjukur yang kurang berwibawa, sedangkan anggota PI yang berhaluan komunis ialah Rustam Effendi, Abdul Madjid dan Setiadjid.

⁴⁵ Moh. Hatta, *Kenang-kenangan Masa Lampau dengan Sjahrir*, dalam *Mengenang Sjahrir*, (Ed) Rosihan Anwar, Jakarta, PT Gramedia, 1980, hlm 11. Mohammad Hatta, *Memoir*, Jakarta, Tintamas, 1978, hlm 226.

⁴⁶ Mohammad Hatta, *op.cit*, hlm 207. Susanto Tirtoprodjo, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, Jakarta, PT Pembangunan, 1962, hlm 51.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 209.

Hatta berusaha keras agar PI keluar dari Liga karena menurutnya Liga telah menjadi komunis yang sangat eksklusif. Orang-orang komunis dalam PI berhasil memecat Hatta dan Sjahrir dari PI dalam sebuah rapat pleno.⁴⁸ Menanggapi pemecatan tersebut, Sjahrir tidak panik, tidak merasa diintimidasi, tidak takut terhadap manuver-manuver yang langsung menantanginya. Percampuran kepercayaan diri dan realisme, serta keberanian yang berdasarkan tidak adanya ambisi atau kesombongan, itu merupakan salah satu ciri kepribadian Sjahrir ketika menghadapi masalah dalam hidupnya.

2) Pendidikan Nasional Indonesia Baru (PNI-Baru)

Di awal 1930, pemerintah Hindia Belanda semakin ketat mengawasi organisasi pergerakan nasional, dengan aksi razia dan memenjarakan pemimpin pergerakan di tanah air, yang berbuntut pembubaran Partai Nasional Indonesia (PNI) oleh aktivis PNI sendiri. Mohammad Hatta memandang pembubaran PNI dapat melemahkan pergerakan rakyat. Pada waktu itu di Hindia tidak ada pemimpin yang menonjol di kalangan Golongan Merdeka.⁴⁹ Agar semangat pergerakan rakyat tetap terjaga, Hatta dan Sjahrir bermufakat agar Sjahrir pulang ke Indonesia pada bulan desember 1931 untuk membantu Golongan Merdeka dan mengurus majalah *Daulat Rakjat*. Sedangkan Hatta menyelesaikan studinya terlebih dahulu, kemudian ia akan mengambilalih pimpinan di Hindia dan Sjahrir akan kembali ke Belanda untuk melanjutkan studinya.⁵⁰

⁴⁸ Rudolf Mrazek, *op.cit*, hlm 134.

⁴⁹ Golongan Merdeka adalah golongan yang tidak setuju terhadap pembubaran PNI lama dan kemudian mendirikan partai baru dengan nama PNI-Baru. Sedangkan golongan yang setuju dengan pebubaran PNI mendirikan partai baru dengan nama Partindo yang dipimpin oleh Sartono.

⁵⁰ Rudolf Mrazek, *op.cit.*, hlm 135. Lihat J.D.Legge, *op.cit*, hlm 42-43.

Sesampainya Sjahrir di Hindia pada akhir bulan Februari 1932, anggota-anggota yang tergabung dalam Golongan Merdeka baru menyelesaikan konferensi di Yogyakarta. Dalam konferensi tersebut diputuskan pendirian partai politik baru dengan nama “Pendidikan Nasional Indonesia” dengan ketuanya Soekemi. Selanjutnya partai ini digabungkan dengan partai Pendidikan Nasional Indonesia cabang Jakarta. Pada bulan Juni 1932 kembali diadakan kongres di Bandung, dalam kongres ini Sjahrir turut dalam perumusan asas dan tujuan partai, serta rencana perjuangan politik sebagai partai kader.⁵¹

Sebelum diadakan kongres Pendidikan Nasional di Bandung pada bulan Juni 1932, Sjahrir juga membantu Soedjadi dalam penerbitan majalah Daulat Rakjat. Dalam kegiatan ini Sjahrir yang telah memperoleh pengetahuan dan mempelajari tentang teori perjuangan revolusioner di negeri Belanda menyebarkan pengetahuannya tentang sosialisme dan perjuangan kerakyatan dalam kursus-kursus di cabang-cabang Pendidikan Nasional Indonesia. Oleh sebab itu, pada waktu diadakan Kongres I Pendidikan Nasional Indonesia di Bandung pada bulan Juni 1932 Sjahrir terpilih sebagai ketua Pimpinan Umum Pendidikan Nasional Indonesia, menggantikan Soekemi.⁵²

Pimpinan Sjahrir ditandai oleh pengarahannya ke dalam dengan metode pendidikan yang mengarah pada kematangan politik dan jiwa kritis. Tidak lama setelah Kongres I PNI, Hatta kembali ke Hindia. Pada waktu itu PNI telah terkonsolidasi, cabang-cabang telah banyak berdiri dan anggotanya sudah ribuan

⁵¹ *Ibid*, hlm 150. Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi (1908-1945)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1994, hlm 83.

⁵² Syahbudin Mandaralam, *op. cit*, hlm 22-23

orang.⁵³ Dengan kembalinya Hatta dari negeri Belanda, maka jabatan ketua Pimpinan Umum PNI diserahkan oleh Sjahrir kepada Hatta. Selanjutnya Sjahrir bermaksud untuk kembali ke Belanda guna melanjutkan studinya, namun pada akhirnya keinginan ini tidak terwujud karena ia dan pemimpin PNI lainnya ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya, Sjahrir menjalani hari-harinya dengan berada di tahanan dan di pembuangan bersama tokoh-tokoh nasionalis lainnya.

3) Di Penjara dan di Pembuangan

Sesudah ditangkapnya Soekarno kembali pada tanggal 1 Juli 1933, maka pada bulan Agustus 1933 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan larangan bersidang dan berkumpul bagi partai-partai politik, terutama bagi PNI dan Partindo. Maka tertutuplah kegiatan PNI untuk melakukan propaganda secara lisan, sehingga satu-satunya jalan untuk berhubungan dengan rakyat ialah melalui tulisan-tulisan yang dimuat dalam majalah *Daulat Rakjat*. Namun kegiatan PNI sudah dipelajari oleh Pemerintah Hindia Belanda, dan melalui bahan-bahan tertulis ini menyadari bahwa PNI lebih berbahaya bagi kelangsungan kolonialisme daripada Soekarno dan Partindonya.⁵⁴

Pada tanggal 25 Februari 1934, pimpinan PNI di Jakarta dan di Bandung ditangkap 13 orang, antara lain Burhannudin, Murwoto, Sorka, Kartawikanta, Wangsawijaya, Tisno, Wagiman dan Karwani. Sedangkan di Jakarta ditangkap, antara lain Hatta, dan Bondan. Pada waktu itu Sjahrir tidak berada di antara pemimpin PNI yang ditangkap hari itu. Dia tidak diketahui ada dimana, dan

⁵³ Suhartono, *op.cit*, hlm 83.

⁵⁴ Mohammad Hatta, *op.cit*, hlm 319.

beberapa teman dekatnya mengira ia sudah meninggalkan Hindia menuju Negeri Belanda, sesuai seperti yang telah direncanakannya semula. Akan tetapi, ternyata Sjahrir ditangkap ketika ia sedang berada di rumah saudaranya guna menunggu kapal yang akan bertolak pada awal bulan Maret.⁵⁵

Hatta dan Bondan dibawa ke Penjara Glodok di Batavia, Burhanuddin, Maskoen, dan Soeka ke penjara Sukamiskin di Bandung dan Murwoto ke penjara Banceuy di kota yang sama. Hanya Sjahrir yang ditahan di penjara Cipinang, yang terletak di daerah Meester Cornelis di Batavia. Setelah beberapa bulan berada dalam tahanan, pada bulan Agustus 1934 Sjahrir, Hatta dan pimpinan PNI lainnya di Jakarta dibawa ke kantor Komisaris Polisi dan diajukan dengan berbagai pertanyaan. Pada tanggal 16 November 1934, Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membuang mereka ke Boven Digoel.⁵⁶

Sjahrir menjalani masa pembuangan selama setahun di Boven Digoel, yaitu dari tanggal 28 Januari 1935 sampai pertengahan tahun 1936.⁵⁷ Kemudian di pindahkan ke Banda Neira sampai pecahnya Perang Pasifik, dan pada bulan Februari 1942 di pindahkan ke Sukabumi.⁵⁸ Selama berada di pembuangan, Sjahrir menghabiskan waktunya dengan membaca dan belajar mengenai ekonomi, politik, serta budaya. Ia mengikuti perkembangan dunia luar melalui surat-surat kabar yang diterbitkan di pulau Jawa maupun yang terbit di negeri Belanda.⁵⁹ Pengasingan ke Digoel dan Banda Neira dimanfaatkan oleh Sjahrir untuk

⁵⁵ Rudolf Mrazek, *op.cit*, hlm 202.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 203. Mohammad Hatta, *op. cit*, hlm 343.

⁵⁷ Syahbudin Mandaralam, *op. cit*, hlm 32. Chalid Salim, *Limabelas tahun Digul Kamp Konsentrasi di New Guniea Tempat Persemaian Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1977, hlm 305-306.

⁵⁸ *Idem*. Solichin Salam, *Wajah Seorang Diplomat*, Jakarta, CISR, 1990, hlm 20.

⁵⁹ Chalid Salim, *op.cit*, hlm 311.

meningkatkan kesadaran pengetahuannya tentang perkembangan dunia dan sejarah kemanusiaan sambil mendidik dan mendewasakan dirinya dalam hubungan perkembangan dunia dan sejarah manusia.

Di samping belajar dan membaca, kegiatan lain yang dilakukan Sjahrir dan Hatta di pembuangan ialah mendidik dan memberi pelajaran kepada anak-anak.⁶⁰ Bagi Sjahrir memberi pelajaran pada anak-anak tidak semata-mata untuk mendidik dan mengajar, tetapi juga untuk teman dan penghibur dalam hidupnya di pengasingan. Ia mempunyai beberapa orang anak angkat, yang nantinya turut diajak serta kembali ke Jakarta. Ia merasa sayang dan terhibur dengan anak-anak dan begitu pula sebaliknya anak-anak sangat sayang padanya karena ia selalu bisa menempatkan dirinya dalam alam pikiran dan suasana jiwa mereka. Di Banda Neira, ia menemukan keseimbangan antara rasio di satu pihak, keindahan dan kasih sayang di pihak lainnya.

4) Zaman Pendudukan Jepang

Ketika Hindia-Belanda dikuasai oleh Jepang, Soekarno dan Hatta menjalin kerja sama dengan Jepang, sementara itu Sjahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis. Ia yakin Jepang tak mungkin memenangkan perang, dan sudah seharusnya kaum pergerakan menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di saat yang tepat. Jaringan gerakan bawah tanah kelompok Sjahrir adalah kader-

⁶⁰ Lily G. Sutantio, *Kenang-kenangan akan Jasa-jasa Baik Oom Sjahrir, Pencinta dan Sahabat Anak-anak*. dalam *Mengenang Sjahrir*, (Ed) Rosihan Anwar, Jakarta, PT Gramedia, 1980, hlm 41. Solichin Salam, *op.cit*, hlm 36.

kader PNI yang tetap meneruskan pergerakan dan kader-kader muda yakni para mahasiswa progresif.⁶¹

Sastra, merupakan seorang tokoh senior pergerakan buruh yang akrab dengan Sjahrir, menulis:

Di bawah kepemimpinan Sjahrir, kami bergerak di bawah tanah, menyusun kekuatan subjektif, sambil menunggu perkembangan situasi objektif dan tibanya saat-saat psikologis untuk merebut kekuasaan dan kemerdekaan.⁶²

Kesempatan untuk merdeka itu pun makin terang ketika Jepang makin terdesak oleh pasukan Sekutu. Sjahrir mengetahui perkembangan Perang Dunia dengan cara sembunyi-sembunyi, ia mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Ketika itu, semua radio tidak bisa menangkap berita luar negeri karena disegel oleh Jepang. Berita-berita tersebut kemudian ia sampaikan ke Hatta. Sementara itu ia juga menyiapkan gerakan bawah tanah untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang.⁶³ Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sjahrir ini, bisa diketahui bahwa ia merupakan seorang yang berani untuk melakukan hal-hal yang penuh resiko. Jika pihak Jepang mengetahui kegiatan yang dilakukannya, ia akan menanggung resiko yang berat.

Sjahrir yang didukung para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus karena Jepang sudah menyerah, Sjahrir siap dengan massa gerakan bawah tanah untuk melancarkan

⁶¹ Syahbudin Mandaralam, *op. cit*, hlm 38. Sutan Sjahrir, *Renungan dan Perjuangan*, Jakarta, Djambatan, 1990, hlm 256.

⁶² Sastra, *Makna Sjahrir untuk Sastra dan Sastra untuk Sjahrir*, dalam *Mengenang Sjahrir*, (Ed) Rosihan Anwar, Jakarta, PT Gramedia, 1980, hlm 89.

⁶³ Subadio Sastrosatomo. *op.cit*, hlm xxvii. Ali Boediardjo, *Sjahrir, Manusia yang Utuh Apa Amanatnya Kepada Kita?*, dalam, *Ibid*, hlm 117-118. T.B. Simatupang, *Apa Arti Sutan Sjahrir Bagi Kita Sekarang Ini?*, dalam *Ibid*, hlm 189.

aksi perebutan kekuasaan sebagai simbol dukungan rakyat. Soekarno dan Hatta yang belum mengetahui berita menyerahnya Jepang, tidak merespon secara positif. Mereka menunggu keterangan dari pihak Jepang yang ada di Indonesia, dan proklamasi itu harus sesuai prosedur lewat keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk oleh Jepang.⁶⁴ Sesuai rencana PPKI, kemerdekaan akan diproklamasikan pada 24 September 1945. Sikap Soekarno dan Hatta tersebut mengecewakan para pemuda, sebab sikap itu berisiko kemerdekaan RI dinilai sebagai hadiah Jepang dan RI adalah negara buatan Jepang. Untuk mendesak lebih keras, para pemuda pun menculik Soekarno dan Hatta pada 16 Agustus. Akhirnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus.⁶⁵

Sikap dan pendirian yang ditunjukkan Sjahrir pada zaman pendudukan Jepang ini, secara tidak langsung memberikan efek politis praktis.⁶⁶ Kehadirannya dalam pemerintahan nanti akan mampu melepaskan Indonesia dari tuduhan Belanda sebagai negara buatan Jepang, karena Ia bebas dari cap kolaborator Jepang seperti yang dituduhkan pada Soekarno-Hatta.

⁶⁴ Subadio Sastrosatomo, *op.cit*, hlm 14. Mohammad Hatta, *op.cit*, hlm 440.

⁶⁵ M. Ridwan & Sophian M, *Peristiwa-peristiwa Di Sekitar Proklamasi 17-8-1945*, Jakarta, Sinar Grafika, 1987, hlm 101.

⁶⁶ Y.B.Mangunwijaya, *Sutan Sjahrir Antara Pemikir dan Politikus*, dalam Yanto Bashri & Retno Suffatni (ed), *Sejarah Tokoh Bangsa*, Yogyakarta, Pustaka Tokoh Bangsa, 2005, hlm 77.

BAB III

PERANAN SUTAN SJAHRIR

DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA (1945-1947)

A. Arti Penting Sjahrir Pada Awal Kemerdekaan

1) Situasi Politik Pasca Kemerdekaan

Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan sebuah tonggak lahirnya negara baru, terbebasnya bangsa Indonesia dari penindasan bangsa asing. Kemerdekaan yang telah dicapai tidak serta merta dapat langsung dirasakan oleh bangsa Indonesia, karna masih terdapat perjuangan baru yang harus dilakukan yaitu untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman akan kembalinya penjajahan Belanda. Sejak itu terjadilah berbagai usaha rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan, seperti pengambil-alihan kantor-kantor pemerintahan dan kekuasaan dari tangan Jepang oleh pemuda di berbagai tempat di tanah air.¹

Tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945), serta memilih Presiden dan Wakil Presiden yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengamanatkan pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) dan menetapkan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai negara. Pembentukan KNI-Pusat dimaksudkan untuk membantu

¹ Soejitno Hardjososediro, *Dari Proklamasi ke Perang Kemerdekaan*, Jakarta, Balai Pustaka, 1987, hlm 46.

pemerintah, dan badan ini dibentuk sampai tingkat daerah. Selanjutnya dibentuk pula Badan Keamanan Rakyat (BKR), dengan tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.²

Pada tanggal 5 September 1945, Soekarno membentuk kabinet pertama RI dalam bentuk presidensial. Para menteri yang duduk dalam kabinet ini sebagian besar merupakan bekas pejabat-pejabat penting dalam pemerintahan pendudukan Jepang.³ Selain menyusun kabinet, dalam waktu yang bersamaan ditunjuk pula gubernur-gubernur untuk delapan provinsi, yaitu Mr. Teuku Moh. Hassan untuk provinsi Sumatera, M. Sutardjo untuk Jawa Barat, R.P. Suroso untuk provinsi Jawa Tengah, R.A. Surio untuk provinsi Jawa Timur, Mr. I Gusti Ktut Pudjo untuk Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara), Mr. Latuharhary untuk provinsi Maluku, Dr. G.S.S.J. Ratulangi untuk provinsi Sulawesi, dan Ir. Pang. Moh. Noor untuk provinsi Kalimantan.⁴

² Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta, Balai Pustaka, Edisi ke-4, 1993, hlm. 100.

³ Susunan anggota kabinet: Menteri Luar Negeri: Mr. Subarjo, penasihat *Bukan fu*, kantor AL Jepang dibawah pimpinan Laksamana Maeda; Menteri Dalam Negeri: Wiratnakusuma, Kepala Departemen Dalam Negeri Pemerintah Jepang; Menteri Kehakiman: Prof. Supomo, Kepala Departemen Kehakiman Pemerintah Jepang; Menteri Kesehatan: Dr. Buntaran Martoatmojo, Penasihat Kantor Kesehatan dari Departemen Dalam Negeri pemerintah Jepang; Menteri Pendidikan: Ki Hadjar Dewantara, Penasihat Kantor Pendidikan pemerintah Jepang; Menteri Penerangan: Mr. Amir Syarifudin; Menteri Sosial: Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Kepala Bagian Perburuhan Departemen Dalam Negeri pemerintah Jepang; Menteri Perhubungan: Abikusno Cokrosuyoso, Kepala Pemerintahan Umum pemerintah Jepang; Menteri Keuangan: Dr. Syamsi Sastrowidagdo, Penasihat Departemen Keuangan pemerintah Jepang; Menteri Negara: 1. Ki Wahid Hasyim, Penasihat Departemen Agama Pemerintah Jepang; 2. Mr. Sartono, Penasihat Departemen Dalam Negeri pemerintah Jepang; 3. Mr. Maramis; 4. Otto Iskandardinata, Penasihat Departemen Keamanan pemerintah Jepang; 5. Dr. Amir, Penasihat pemerintah Jepang di Sumatera.

Departemen Penerangan, *Susunan dan Program Kabinet Republik Indonesia 1945-1970*, Jakarta, Penerbit Pradnja Paramita, 1970, hlm 3.

⁴ Soejitno Hardjososediro, *op.cit*, hlm 48. George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Yogyakarta, UNS Press-Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 177.

Sementara itu, pemuda mempersenjatai diri untuk mengambil-alih kantor-kantor dan pusat pelayanan umum dari kekuasaan Jepang. Pertempuran dan bentrokan terjadi antara pemuda dan aparat Jepang. Perebutan kekuasaan pertama kali terjadi di Surabaya, tindakan mereka kemudian diikuti oleh pemuda-pemuda lain dengan menduduki kantor-kantor dan perusahaan Jepang, serta mengibarkan bendera Merah Putih. Dalam waktu singkat para pemuda kemudian menyusun kerja sama dan pada tanggal 11 September dilangsungkan rapat umum untuk mendukung proklamasi di lapangan Tambaksari, Surabaya. Rapat umum itu menghasilkan keputusan untuk mengambil-alih berbagai kantor dan perusahaan Jepang secara cepat. Pekik “Merdeka” terdengar dimana-mana dari seruan pemuda Indonesia.⁵

Kedatangan Sekutu pada tanggal 8 September 1945 yang berniat melucuti senjata tentara Jepang ternyata ditunggangi oleh NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*), hal ini membuat kemerdekaan Indonesia terancam. Pemerintah Belanda tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dan berniat menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Sebelumnya, pihak sekutu menyatakan bahwa tentara Inggris yang akan tiba akan menjalankan peranan yang netral terhadap pihak Indonesia dan Belanda, serta tidak akan mengizinkan Belanda mendarat bersama tentara Inggris. Akan tetapi, kenyataannya NICA telah turut serta mendarat di Indonesia.⁶

Setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia, Belanda membentuk NICA di Brisbane, Australia, di bawah pimpinan van Mook. Pada saat Jepang kalah,

⁵ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005, hlm. 437-438.

⁶ Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notokusanto, *op.cit*, hlm. 122.

Belanda ingin kembali ke Indonesia, dengan alasan ekonomis. Agar tindakannya dapat dibenarkan oleh hukum internasional, Belanda menyatakan bahwa wilayah Indonesia sebagai wilayah yang sejajar dengan Belanda di Eropa, bukan lagi sebagai wilayah koloni. Menurut Persetujuan “*Civil Affairs Agreement*”, antara Inggris dan Belanda tanggal 24 Agustus 1945, tentara yang boleh mendarat di Indonesia hanya tentara Inggris dan dapat dibantu pegawai-pegawai sipil Belanda (NICA). Dengan alasan inilah maka Belanda dapat memasukkan orang-orangnya ke Indonesia, yang beranggotakan tidak hanya pegawai sipil tetapi juga kebanyakan dari militer.⁷

2) Sutan Sjahrir: Tokoh Antifasis yang Dibutuhkan

Pemerintah Republik Indonesia awal yang telah terbentuk memiliki banyak kelemahan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di berbagai pihak terutama bagi pemuda. Buruknya hubungan pemerintah pusat dan daerah, kedatangan sekutu, peleburan badan-badan peperangan, pengumpulan kembali orang Jepang, penyesuaian tugas pegawai, buruknya sarana transportasi, dan kemunduran ekonomi menjadi penghalang pemerintah untuk dapat berfungsi dengan baik.⁸

Pemerintah di daerah juga banyak mengalami kesulitan-kesulitan, sementara itu pemerintah pusat tidak dapat memberi bantuan yang berarti. Pengambil-alihan kantor-kantor dan perusahaan di daerah-daerah tidak dapat dikontrol oleh pemerintah pusat. Begitu pula dalam hal penyediaan dan pengawasan penggunaan uang. Ketidakpuasan ini sampai menimbulkan gagasan untuk mengganti Kabinet

⁷ Susanto Tirtoprodjo, *Sejarah Revolusi Nasional Indonesia*, Jakarta, PT.Pembangunan, 1962, hlm 14.

⁸ G.Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggajati*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, Jilid 1, 1988, hlm 141.

Soekarno-Hatta dengan kabinet baru yang dapat menghadapi situasi sulit itu secara lebih tegas dan berani.⁹

Kelemahan pemerintah pusat ke dalam tidak diimbangi dengan kekuatan keluar. Kabinet presidensial yang dibentuk oleh Soekarno dinilai oleh pihak sekutu sebagai kabinet yang berbau fasis, karena orang-orang yang duduk di dalamnya pernah bekerjasama dengan pihak Jepang.¹⁰ Kondisi ini membuat sekutu sebagai pihak pemenang Perang Dunia II, sulit mengakui keberadaan Republik Indonesia. Sekutu menganggap Indonesia merupakan negara buatan Jepang dan masih berada di bawah kendali Jepang.

Untuk menyelamatkan Republik dari cap negara buatan Jepang dan segera memperoleh pengakuan internasional, dicari tokoh pemimpin yang antifasis dan tidak termasuk dalam *black list* orang yang pernah bekerjasama dengan Jepang. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan desakan-desakan yang menginginkan agar Pemerintah RI lebih mencerminkan semangat kemerdekaan dan demokrasi. Di antara orang-orang Indonesia banyak yang anti Jepang, terutama pada akhir-akhir pendudukan Jepang. Kekerasan dan kekejaman yang dilakukan oleh tentara Jepang hampir-hampir menguras habis simpati bangsa Indonesia yang pernah terbit pada awal pendudukan. Salah satu tokoh anti Jepang yang mencuat ke permukaan pada zaman revolusi ini adalah Sutan Sjahrir, ia merupakan seorang tokoh antifasis yang terkenal dengan jaringan bawahnya pada masa pendudukan Jepang.

⁹ *Ibid*, hal 142.

¹⁰ Hamid Algadri, *Suka Duka Masa Revolusi*, Jakarta, UI Press, 1991, hlm. 92.

Sjahrir dianggap dapat menghilangkan ketidakpuasan di kalangan pemuda, ia dianggap sebagai orang yang tepat untuk mengatasi masalah dalam masa revolusi ini. Ia mempunyai hubungan yang baik dengan politisi tua, dan dikenal sebagai nasionalis intelektual dan ex Digulis. Di kalangan pemuda, peranannya selama pendudukan Jepang sangat dihargai, dan umurnya yang baru 36 tahun lebih dekat dengan pemuda.¹¹

B. Sutan Sjahrir Sebagai Ketua KNIP (16 Oktober-28 November 1945)

Lima hari setelah kemerdekaan Indonesia, diumumkan bahwa Komite Nasional Indonesia yang terdiri atas 137 orang telah terbentuk.¹² Kelompok pemuda mendorong agar Sjahrir menjadi Ketua Komite, namun ia menolak dengan alasan masih menanti sejauh mana Komite mencerminkan kehendak rakyat.¹³ Pada kenyataannya lembaga-lembaga negara RI masih belum dapat berfungsi dengan baik, begitu pula dengan KNI, baik pusat maupun daerah. Hal itu mungkin terjadi karena lembaga tersebut masih baru dan para pejuang lebih banyak menunggu instruksi daripada mempunyai inisiatif sendiri.¹⁴

Pada tanggal 7 Oktober 1945, 40 anggota KNIP menandatangani petisi untuk Presiden Soekarno, yang berisi tuntutan agar Komite Nasional menjadi badan legislatif, bukan pembantu presiden. Selain itu, menteri kabinet harus bertanggungjawab kepada dewan, bukan kepada presiden. Selanjutnya, para

¹¹ G. Moedjanto, *op.cit*, hlm. 142.

¹² Djoeir Moehamad, *Memoar Seorang Sosialis*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1997, hlm 93. Y.B.Mangunwijaya. *Sutan Sjahrir Antara Pemikir dan Politikus*. Dalam Yanto Bashri & Retno Suffatni (ed), *Sejarah Tokoh Bangsa*, Yogyakarta, Pustaka Tokoh Bangsa, 2005, hlm 76.

¹³ Adam Malik, *Sambutan intuk Peringatan Hari Lahir 70 tahun Almarhum Bung Sjahrir*, dalam (Ed) Rosihan Anwar, *Mengenang Sjahrir*, Jakarta, PT Gramedia, 1980, hlm 3.

¹⁴ Djoeir Moehamad, *op.cit*, hlm 94.

pemuda mendesak agar Sjahrir bersedia menjadi ketua Komite.¹⁵ Pada tanggal 16 Oktober 1945, Komite Nasional mengadakan rapat yang kedua, rapat ini menghasilkan keputusan penting yaitu Sjahrir diangkat sebagai ketua Komite.¹⁶

Pada pertengahan kedua bulan Oktober 1945 aku menerima baik undangan untuk turut serta dalam KNIP. Pada hari itu juga aku terpilih sebagai ketua badan tersebut yang buat sementara mewakili rakyat...¹⁷

Naiknya Sjahrir sebagai ketua KNIP segera membawa angin segar ke dalam tubuh KNI dan Pemerintah (eksekutif) yang lebih mencerminkan aspirasi rakyat banyak. Adapun langkah-langkah yang diambil Sjahrir sebagai ketua KNIP ialah sebagai berikut :

a) Mengubah status KNIP dari badan eksekutif menjadi badan legislatif

Berdasarkan UUD 1945 pemerintahan RI merupakan pemerintahan presidensial. Agar Sjahrir dapat diangkat menjadi Perdana Menteri maka UUD 1945 harus diubah. Perubahan UUD 1945 berdasarkan Bab XIV Pasal 37, yang berbunyi sebagai berikut:¹⁸

- I. Untuk mengubah UUD 1945, sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR harus hadir.
- II. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

¹⁵ *Kudeta Sunyi Triumvirat*, dalam *Majalah Tempo Edisi Khusus 100 tahun Sjahrir*. Edisi 9-15 Maret 2009, hlm 44. George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Yogyakarta, UNS Press-Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 191.

¹⁶ Sutan Sjahrir, *Renungan dan Perjuangan*, Jakarta, Djambatan, 1990, hlm 280. Rudolf Mrazek, *op.cit*, hlm 488.

¹⁷ Sutan Sjahrir, *op.cit*, hlm 280.

¹⁸ Soebadio Sastrosatomo, *Perjuangan Revolusi*, Jakarta, Puataka Sinar Harapan, 1987, hlm 61.

Pada waktu itu MPR belum ada, jadi tidak mungkin mengadakan perubahan UUD 1945. Akan tetapi, Peraturan Peralihan Pasal IV berbunyi sebagai berikut: “Presiden menjalankan kekuasaan non-eksekutifnya dengan bantuan sebuah Komite Nasional.”¹⁹

Sjahrir beranggapan bahwa rumusan peralihan tersebut masih kabur dan harus segera diterangkan. Selanjutnya, Sjahrir dan anggota KNIP mulai mengadakan pembicaraan mengenai perlunya reorganisasi KNIP dari badan pembantu presiden menjadi badan yang berstatus MPR-DPR Sementara. Hal ini berarti perubahan status KNIP dapat memperkokoh kedudukan RI dalam menghadapi pihak asing yang menganut paham demokrasi. RI dapat dicap sebagai negara fasis buatan Jepang apabila kekuasaan presiden terlalu besar.²⁰

Sidang KNIP pada tanggal 16 Oktober membuahkan hasil dengan disetujuinya usul Sjahrir, kemudian dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X. (*lihat lampiran*). Isi pokok dari maklumat tersebut ialah:²¹

1. Sebelum MPR-DPR terbentuk, KNIP disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara.
2. Berhubung dengan keadaan yang sedang genting, banyak anggota KNIP diperlukan di daerah-daerah, maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja (BP).

¹⁹ G. Moedjanto, *op.cit*, hlm 142.

²⁰ Hamid Algadri, *op.cit*, hlm 93.

²¹ Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Lukisan Revolusi Indonesia 1945-1950*, Jakarta, 1954, hlm 81. Soebadio Sastrosatomo, *op.cit*, hlm 63.

Pada tanggal 17 Oktober 1945 rapat KNIP memutuskan untuk menunjuk Sjahrir dan Amir Sjariffudin sebagai pimpinan KNIP, sekaligus melaksanakan Maklumat Wakil Presiden No. X, yaitu menjadi formatur untuk membentuk Badan Pekerja. Sebagai pimpinan KNIP, Sjahrir dan Amir Sjariffudin kemudian menyusun anggota Badan Pekerja yang terdiri atas 15 orang orang dengan susunan sebagai berikut :²²

Ketua	: Sutan Sjahrir
Wakil Ketua	: Mr. Amir Sjariffudin
Sekretaris	: Mr. Suwandi
Anggota-anggota	: Wahid Hasyim, Mr.Hindramartono, Mr.R.M.Sunario Kolopaking, Soebadio Sastrosatomo, Tadjuludin, Dr.A.Halim, Supeno, Sarmidi Mangunsarkoro, Dr.Sudarsono, Tan Ling Djie, Mr.R.Sjafuddin Prawiranegara.

Susunan ini merupakan hasil dari dua orang formatur, yaitu sepertiganya merupakan usul dari masing-masing dan sisanya adalah hasil usul dari keduanya.

BPKNIP mulai bekerja pada tanggal 18 Oktober 1945 di bawah pimpinan perjuangan kerakyatan yang antifasisme. Pekerjaannya dimulai tidak sebagai kelanjutan dari organisasi maupun *Jawa Hokokai*, melainkan manifestasi dari perjuangan kemerdekaan yang revolusioner. Susunan BPKNIP yang pertama ini, mencerminkan bahwa para anggotanya adalah orang-orang demokrat yang berpandangan politik dan menganut ideologi tertentu.²³

²² George McTurnan Kahin. *op.cit*, hlm.192.

²³ Soebadio Sastrosatomo, *op.cit*, hlm 68.

b) Mendirikan partai-partai politik

Dengan perubahan status KNIP tersebut, maka RI menjadi sebuah negara yang mengikuti pola parlemen Eropa Barat. Sebagai konsekuensinya suara rakyat harus disalurkan melalui organisasi politik, dan hal ini berarti mensyaratkan adanya partai-partai. Sebagai dasar hukum digunakan Aturan Tambahan ayat 1 UUD 1945, yang menetapkan bahwa: “Dalam enam bulan sesudah akhir peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar ini.”²⁴ Artinya bahwa 6 bulan sesudah perang selesai di Indonesia harus diselenggarakan suatu pemilihan untuk anggota MPR-DPR. Sjahrir menjelaskan bahwa pemilihan itu akan bersifat demokratis dan sebagai konsekuensi sifat demokratis dari pemilu, maka keikutsertaan partai-partai politik merupakan hal yang utama.

Pada tanggal 30 Oktober 1945, Presiden Soekarno, Hatta dan Amir Sjariffudin sedang berada di Surabaya, Sjahrir berhasil memperoleh persetujuan BPKNIP untuk mengeluarkan Maklumat Pendirian Partai-partai (*lihat lampiran*). Adapun isi pokok dari maklumat tersebut ialah sebagai berikut:²⁵

1. Pemerintah mengizinkan pembentukan partai-partai politik, dengan adanya partai politik, segala aliran dan paham-paham politik yang ada dalam masyarakat dapat disalurkan secara teratur.
2. Pemerintah berharap agar partai-partai politik yang dimaksud sudah dapat terbentuk sebelum dilangsungkannya pemilihan umum pada bulan Januari 1946.

²⁴ G. Moedjanto, *op.cit*, hlm 143

²⁵ Osman Raliby. *Documenta Historica Sejarah Dokumenter dari Pertumbuhan dan Perjuangan Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1953, hlm 529.

Maklumat mengenai pendirian partai-partai ini telah disetujui oleh Soekarno-Hatta, dan pada tanggal 3 November 1945 Wakil Presiden Moh. Hatta mengesahkannya.²⁶ Maklumat 3 November 1945 ini memungkinkan bagi munculnya partai-partai politik di Indonesia. Pendirian partai-partai politik akan bisa menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi, suatu bentuk negara yang dapat diterima oleh dunia internasional, terutama oleh sekutu. Dengan demikian, kesan bahwa Indonesia merupakan negara fasis buatan Jepang dapat dihilangkan dan dapat segera memperoleh pengakuan dari negara-negara lain.

c) Menulis buku *Perjuangan Kita*

Sebagai seorang pemikir dari revolusi kerakyatan dan revolusi nasional, Sjahrir mempunyai pandangan mengenai taktik dan strategi perjuangan sendiri. Pemikirannya tertuang dalam sebuah buku kecil yang berjudul *Perjuangan Kita*. Buku ini diterbitkan pada tanggal 10 November 1945 oleh Kementerian Penerangan. Sjahrir menulis buku tersebut berdasarkan atas kenyataan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia pada saat itu.

Di dalam buku kecil *Perjuangan Kita*, Sjahrir menyajikan suatu pembahasan yang mendalam mengenai keadaan, kritik terhadap politik pemerintah, program pembangunan politik serta langkah perjuangan nasional selanjutnya. Buku ini merupakan sebuah diagnosa yang dirumuskan secara jernih tentang persoalan yang dihadapi Indonesia pada waktu itu dan merupakan program untuk menghadapi perjuangan fisik dengan Belanda.

²⁶ G. Moedjanto, *op.cit*, hlm hlm 142.

Isi pokok dari *Perjuangan Kita* ialah: pertama, uraian secara singkat tentang kepahitan hidup rakyat Indonesia di zaman pendudukan Jepang, adanya kerja paksa, penyerahan hasil pertanian secara paksa, ketiadaan hukum, korupsi dan kekejaman. Seperti yang diuraikan Sjahrir dalam pamphletnya:

Selama tiga setengah tahun penjajahan Jepang, sendi-sendi masyarakat di desa diobrak-abrik serta diruntuhkan dengan kerja paksa, penculikan orang-orang desa dijadikan romusha jauh dari tempat tinggalnya, dijadikan serdadu, dengan penyerahan hasil bumi dengan paksa, dengan sewenang-wenang yang tiada batasnya. Demikian pula diantara rakyat jelata di kota, ketidakpastian didalam kedudukannya menyebabkan kegelisahan. Beribu-ribu orang sebelum Jepang datang, mempunyai pencaharian sebagai buruh kehilangan mata pencahariannya. Berpuluh ribu orang desa melarikan diri ke kota untuk melepaskan diri dari kelaparan, puluhan ribu orang pelarian romusha, heiho, dan kerja paksa lainnya menambah banyak pengangguran di kota. Semua ini menyebabkan kegelisahan didalam masyarakat di kota terus memuncak. Bahaya semua ini akan meletus dalam pemberontakan dan kerusuhan bertambah besar untuk Jepang.²⁷

Isi pokok yang kedua dari buku *Perjuangan Kita* ini ialah dikemukaanya gagasan agar unsur-unsur kolaborasi dilenyapkan, sedangkan pemuda diajari tentang prinsip-prinsip sosialisme. Menurut Sjahrir, revolusi yang dijalani pada saat itu adalah revolusi demokrasi, baru kemudian revolusi nasional.

Revolusi kita ini yang keluar berupa revolusi nasional, jika dipandang dari dalam berupa revolusi kerakyatan. Meskipun kita telah berpuluh tahun berada dalam lalu-lintas dunia modern, meskipun masyarakat negeri kita telah diubah dan dipengaruhi olehnya, akan tetapi dalam kehidupan rakyat kita terutama di desa, alam kehidupan serta fikiran orang masih feodal. Penjajahan Belanda berpegang pada segala sisa-sisa feodalisme itu untuk menahan kemajuan sejarah bangsa kita. Seumpamanya pangrehpraja tak lain daripada alat yang dibuat oleh penjajah Belanda dari warisan feodal masyarakat kita. Berupa aturan yang dilakukan atas rakyat kita di desa tak lain daripada lanjutan yang lebih teratur daripada kebiasaan feodal, demikian penghargaan yang begitu rendah terhadap diri orang desa, yang masih

²⁷ Sutan Sjahrir, *Perjuangan Kita*, Jakarta, Pusat Dokumentasi Politik "Guntur 49", 1995, hlm 2.

dipandang setengah budak belian, bukan saja di dalam pandangan mata kaum ningrat, akan tetapi juga dalam pandangan kaum penjajah Belanda.²⁸

Menurut Sjahrir, agar revolusi yang dijalankan ini dapat berhasil maka pimpinan revolusi harus bersih dari unsur-unsur fasisme Jepang. Pemimpin-pemimpin yang pernah bekerjasama dengan Jepang dipandang sebagai bagian dari fasisme. Menurutnya, mereka tidak pantas memegang pimpinan negara karena berjiwa lemah, padahal RI memerlukan pimpinan yang kuat dalam menghadapi situasi sulit. Hal ini seperti yang diuraikannya dalam buku *Perjuangan Kita*:

Perjuangan demokrasi revolusioner itu memulai dengan membersihkan diri dari noda-noda fasis Jepang, mengungkung penglihatan orang-orang yang masih jiwanya terpengaruh oleh propaganda Jepang dan didikan Jepang. Orang-orang yang sudah menjual jiwa dan kehormatannya kepada fasis Jepang disingkirkan dari pimpinan revolusi kita (orang-orang yang bekerjasama dalam propaganda, polisi rahasia Jepang, umumnya didalam usaha kolone 5 Jepang). Orang-orang ini harus dianggap sebagai penghianat perjuangan dan harus diperbedakan dari kaum buruh biasa yang bekerja hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi sekalian *politieke collaboratoren* dengan fasis Jepang seperti yang disebutkan diatas harus dipandang sebagai fasis sendiri atau perkakas dan kaki tangan fasis Jepang dan tentu sudah berdosa dan berkhianat pada perjuangan dan revolusi rakyat.²⁹

Dalam tulisannya, Sjahrir berpendapat bahwa pemerintahan yang dijalankan harus pemerintahan demokratis yang terlepas dari bahaya fasisme dan feodalisme.

Langkah yang pertama yang harus dilakukan sekarang untuk memperbaiki dan mengubah keadaan adalah selain menyusun segala kekuatan revolusioner yang sadar didalam suatu susunan partai yang berdisiplin, memperbaiki secepat mungkin kedudukan Negara Republik Indonesia, dan mencegah menjalarnya kekacauan diantara rakyat dengan cara yang tersusun. Secepat mungkin seluruh pemerintahan harus *didemokratiser*, sehingga rakyat banyak masuk dalam lingkungan pemerintahan. Alat-alat kekuasaan pun seboleh-bolehnya didemokratiser,

²⁸ *Ibid*, hlm 11.

²⁹ *Ibid*, hlm 14-15.

sehingga mengecilkan jurang pertentangan pada rakyat banyak. Untuk sementara pangrehpraja lama dapat diberi kedudukan sebagai pengawas dan penasihat segala perubahan pemerintahan di daerah masing-masing atau ditarik ke kantor-kantor, ke polisi, agrarian, dan sebagainya. Dengan terbentuknya alat pemerintahan baru ini dengan sendirinya kekacauan mendapat bantahan pada pusatnya sendiri, yaitu di desa sendiri, serta pemerintahan mendapat alat yang dapat dipergunakan untuk menjalankan revolusi demokrasi juga di dalam alam ekonomi dan sosial desa. Masyarakat kita mendapat alat untuk disusun baru dari pokoknya, yaitu desa. Segala cita-cita pembaharuan masyarakat kita dapat dimulai membentuknya dari situ.³⁰

Menurut Sjahrir, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi pada saat itu, RI harus memelihara hubungan dengan kekuatan-kekuatan yang berpengaruh, yaitu Inggris dan Amerika Serikat. Menurutnya, kita harus dapat menjaga agar jangan sampai kedua negara tersebut membantu Belanda. Oleh karena itu, berbagai hal yang tidak mereka setuju harus dibuang, dan harus dapat menciptakan suasana yang sesuai dengan konsepsi barat, misalnya lembaga pemerintahannya. Hal ini ditunjukkannya dalam tulisannya berikut:

Dengan sendirinya pula kedudukan kita terhadap dunia luar akan menjadi bertambah kuat. Usaha kita yang tersusun untuk terus menerus memperkuat kedudukan itu, adalah memperkuat organisasi negara kita secara demokratis, dan memperbesar kepercayaan dunia, bahwa kita sanggup mengatur rapi negara dan rakyat kita dengan tidak mengecewakan perhubungan ekonomi, politik dan kebudayaan kita. Selama alam kita alam dunia kapitalis, terpaksa kita menjaga jangan sampai dimusuhi oleh dunia kapitalis itu, jadi membuka negara kita untuk lapang usaha mereka sedapat mungkin, yaitu dengan batas, bahwa keselamatan rakyat tidak akan terganggu olehnya. Demikian pula terhadap pemasukan orang-orang asing ke dalam negeri kita. Di dalam masyarakat yang berdasar demokratis yang kuat dan sehat, segala ini dapat dipikul dengan mudah, dengan tak perlu menimbulkan pembencian golongan-golongan berdasar atas kebangsaan seperti terdapat sekarang. Segala hukum dan hal penduduk diatur secara demokratis dengan semangat kemanusiaan dan kesosialan.³¹

³⁰ *Ibid*, hlm 16.

³¹ *Ibid*, hlm 17.

Buku kecil yang ditulis Sjahrir tersebut, menggambarkan konsepsinya tentang kenegaraan. Golongan pemuda banyak yang tertarik dengan sosok Sjahrir, konsepsi yang dikemukannya disetujui bukan saja atas dasar pertimbangan baik atau buruknya, akan tetapi konsepsi itu memberi jalan kearah perubahan kepemimpinan nasional. Pemuda berharap dengan adanya perubahan, maka mereka dapat sejalan dengan pemerintah.

C. Sutan Sjahrir sebagai Perdana Menteri (14 November 1945-28 Februari 1946)

1) Terbentuknya Kabinet Sjahrir I

Setelah mengubah status KNIP menjadi badan legislatif, Sjahrir melanjutkan langkahnya untuk mengubah sistem kabinet yang pada waktu itu menggunakan sistem presidensial menjadi parlementer. Perubahan ini menyesuaikan dengan dikeluarkannya maklumat tentang pendirian partai-partai. Keberadaan partai-partai tidak akan ada artinya apabila sistem kabinet tidak disesuaikan dengan perwakilan partai dalam DPR/KNIP.³²

Pada tanggal 11 November 1945, BPKNIP mengusulkan penyesuaian sistem kabinet kepada presiden dan wakil presiden. Usulan ini kemudian disetujui oleh oleh Presiden Soekarno. Pemuda kemudian mempersoalkan perubahan sistem kabinet, menurut logika, apabila kabinet presidensial yang masih berlaku pada saat itu diubah menjadi kabinet parlementer, maka yang seharusnya menjadi perdana menteri ialah menteri luar negeri. Saat itu, yang menjabat sebagai menteri luar negeri ialah Mr. Subardjo, jadi seharusnya ia yang menjadi perdana menteri.

³² George McTurnan Kahin, *op.cit*, hlm.194.

Namun, dari pihak pemuda menganggap bahwa kabinet pertama RI merupakan kabinet buatan Jepang, dan anggotanya kebanyakan tokoh yang bekerjasama dengan Jepang. Menurut Sjahrir, perubahan sistem kabinet dari presidensial ke parlementer berarti membentuk susunan kabinet baru atau dengan kata lain kabinet pertama RI dibubarkan.³³

Pada tanggal 14 November dikeluarkan Maklumat Pemerintah 14 November 1945 (*lihat lampiran*). Inti dari maklumat ini ialah disetujuinya perubahan sistem kabinet dari presidensial menjadi parlementer.³⁴ Kemudian Sjahrir ditunjuk sebagai formatur kabinet, dan segera membentuk kabinet. Sjahrir ditunjuk untuk menjadi pemimpin pemerintahan sebagai perdana menteri, tanpa harus menggeser kedudukan Soekarno-Hatta. Sjahrir dianggap sebagai orang yang tepat untuk menjadi pemimpin karena ia dianggap mampu untuk menghadapi diplomasi dengan negara Barat.³⁵

Tanggal empat belas Oktober aku diminta membentuk pemerintahan baru. Menyimpang dari Undang-undang Dasar yang menentukan bahwa presiden merupakan kekuasaan eksekutif tertinggi, aku mendapat tugas membentuk suatu kabinet yang bertanggungjawab kepada parlemen. Untuk maksud itu KNIP mengadakan sidang pleno dan aku menerima jabatan Perdana Menteri pertama Republik Indonesia.³⁶

Terbentuknya Kabinet Sjahrir I pada pertengahan bulan November 1945 ini, menandakan terwujudnya satu negara Republik Indonesia yang merdeka dengan

³³ Soebadio Sastrosatomo, *op.cit*, hlm 97.

³⁴ *Ibid*, hlm 98.

³⁵ Moh, Hatta, *Memoir*, Jakarta, Tintamas, 1978, hlm 478.

³⁶ Sutan Sjahrir, *op.cit*, hlm 281.

pimpinan yang terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis.³⁷ Sebagian besar anggotanya terdiri atas tenaga pemerintahan dan tenaga ahli, bukan politisi dan merupakan orang-orang yang tidak bekerjasama dengan Jepang. Perubahan sistem kabinet ini akan memperkuat pandangan internasional bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi.

2) Usaha-usaha Sjahrir sebagai Perdana Menteri

Setelah membentuk pemerintahan baru, pada tanggal 17 November 1945, sebagai pimpinan pemerintah yang baru, Sjahrir mengeluarkan Maklumat Pemerintah yang berisi mengenai hal-hal berikut:³⁸

Pertama, kabinet yang baru terbentuk menyatakan bahwa pergantian kabinet tidak berarti terjadi perubahan politik luar negeri Indonesia. Dasar-dasar politik ke luar telah dijelaskan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945 yang lalu. Kabinet akan menuntut sepenuh-penuhnya kemerdekaan Indonesia dengan mengindahkan kewajiban-kewajiban negara merdeka di dalam hubungan internasional.

Kedua, dalam menyempurnakan susunan Negara Indonesia, maka akan diperhatikan sepenuh-penuhnya kepentingan asing serta kedudukan penduduk asing di negara Indonesia. Untuk itu, perjuangan tidak hanya ditempuh melalui satu jalan saja, melainkan segala macam usaha akan dijalankan. Mengadakan

³⁷Kabinet Sjahrir I dibentuk pada tanggal 14 November 1945, dengan susunan sebagai berikut: Perdana Menteri: Sutan Sjahrir; Menteri Luar Negeri: Sutan Sjahrir; Menteri Dalam Negeri: Sutan Sjahrir; Menteri Penerangan: Mr. Amir Syarifuddin; Menteri Keamanan: Mr. Amir Syarifuddin; Menteri Keuangan: Mr. Sunario Kolopaking; Menteri Perhubungan: Ir. Abdul Karim; Menteri Kesehatan: Dr. Darmasetiawan; Menteri Sosial: Dr. Ajidarmo; Menteri Kehakiman: Mr. Suwandi; Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan: Dr. Todung Gelar Sutan Gunung Mulia; Menteri Pekerjaan Umum: Ir. Putuhena; Menteri Kemakmuran: Ir. Darmawan Mangkusumo; Menteri Negara: H. Rasyidi.
Departemen Penerangan, *op.cit*, hlm 4.

³⁸ Osman Raliby, *op.cit*, hlm 103-104.

perundingan-perundingan dengan pihak Belanda tidak akan mengurangi kedaulatan negara.

Ketiga, menetapkan program kerja kabinet ke dalam, yang terdiri atas empat pasal :³⁹

- a) Menyempurnakan susunan Pemerintah Daerah berdasarkan kedaulatan rakyat.
- b) Mencapai koordinasi semua tenaga rakyat dalam usaha menegakkan Negara Republik Indonesia serta pembangunan masyarakat yang berdasarkan keadilan dan perikemanusiaan.
- c) Berusaha untuk memperbaiki kemakmuran rakyat diantaranya dengan pembagian makanan.
- d) Berusaha mempercepat keberesan tentang hal uang Republik Indonesia.

Setelah menetapkan program kerja kabinet, selanjutnya Sjahrir bersama anggota kabinetnya berusaha untuk merealisasikan program-program tersebut. Adapun usaha-usaha yang ia dilakukan dalam Kabinet Sjahrir I ialah:

a. Melakukan konsolidasi Pemerintah RI

Sebagai pimpinan pemerintahan, Sjahrir merasa perlu untuk mengadakan konsolidasi dengan pimpinan negara yakni Soekarno-Hatta, baik secara administrasi politik maupun dukungan rakyat banyak. Setelah Kabinet Sjahrir terbentuk, Soekarno-Hatta mengadakan perjalanan ke seluruh Pulau Jawa untuk mengadakan rapat-rapat umum agar rakyat dan daerah merasakan dan mengakui adanya pemerintah pusat.

³⁹ Departemen Penerangan, *op.cit*, hlm 4.

Pada tanggal 9 sampai 11 Desember 1945, Soekarno-Hatta mengadakan perjalanan ke Banten sampai ke Serang dan Rangkasbitung. Tanggal 16 Desember 1945, Soekarno mengunjungi Jawa Timur, kemudian pada tanggal 18 Desember, bersama dengan Sjahrir, mereka melanjutkan perjalanan ke Madiun, Kediri, Blitar dan Malang. Perjalanan ini merupakan salah satu usaha pemerintah untuk konsolidasi dengan memberi penerangan dan kesadaran bagi rakyat Indonesia dalam bidang administrasi pemerintahan.⁴⁰

Dalam usaha meredakan pergolakan di daerah-daerah, Sjahrir mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan perkembangan dan keperluan bagi daerah tersebut. Sjahrir merasa perlu untuk mengambil tindakan dalam mengatasi pergolakan di daerah agar pergolakan-pergolakan tersebut tidak berkembang menjadi pergolakan liar yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, Sjahrir mengadakan pembicaraan mengenai Undang-undang No.1 tentang Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), bersama Badan Pekerja untuk melakukan peninjauan kembali tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah.⁴¹

b. Menjalankan politik diplomasi

Sjahrir berpendapat bahwa negara Indonesia memiliki aparat dan kekuasaan yang belum baik, serta peralatan yang masih kurang. Selain itu organisasi untuk memobilisasi dan menggerakkan rakyat di lapangan juga dianggap belum tersusun dengan rapi. Oleh karena itu, jalan yang paling penting dan efektif untuk

⁴⁰ Soebadio Sastrosatomo, *op.cit*, hlm 195.

⁴¹ *Idem*.

memperjuangkan pengakuan atas kedaulatan bangsa dan negara RI, ialah melalui politik diplomasi.

Sejak disertai tampuk pemerintahan sebagai perdana menteri pada November 1945, Sjahrir memilih jalur diplomasi sebagai jalan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perundingan dengan pihak Belanda diadakan untuk pertama kalinya pada tanggal 17 November 1945, atas undangan panglima tentara Sekutu pada pukul 20.00 di gedung KPM (Perusahaan Pelayaran Belanda) di jalan Merdeka Timur. Pihak Belanda dihadiri antara lain oleh Dr. van Mook (Letnan Gubernur Jenderal), Dr. T.J. Idenburg (direktur Kabinet Gubernur Jenderal), Prof. Baron F.M van Asbeck (utusan Pemerintah Belanda), dan Mr. C.O. Van der Plas. Sedangkan dari pihak Indonesia, antara lain hadir PM Sjahrir, Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin, Menteri Pekerjaan Umum Putuhena dan Menteri Perhubungan Abdul Karim. Selain itu dari pihak Inggris dihadiri oleh Laksamana Christison (Panglima Tentara Sekutu), Dr. M.E. Denning dan Brigadir Jenderal N.D. Wingrave.⁴²

Pertemuan ini menghasilkan usulan-usulan dari pihak Inggris dan Belanda yang harus diperhatikan oleh pihak Indonesia dalam waktu lima hari. Adapun isi usulan tersebut ialah sebagai berikut:⁴³

- 1) Harus ada perbaikan dalam organisasi angkatan kepolisian, karena pada waktu itu dalam kepolisian terdapat beberapa pemuda yang tidak bertanggungjawab.

⁴² Ida Anak Agung Gde Agung, *Persetujuan Linggarjati Prolog dan Epilog*, Yogyakarta, Yayasan Pustaka Nusantara-Sebelas Maret University Press, 1995, hlm 40.

⁴³ Soebadio Sastrosatomo, *op.cit*, hlm 182.

- 2) Provokasi dan hasutan yang masih merajalela harus dihentikan. Inggris telah mengeluarkan perintah yang keras kepada tentara Inggris dan Belanda untuk mencegah tindakan provokasi dan hasutan.
- 3) Pengawasan terhadap suasana dan semangat radio serta pers Indonesia yang berkobar-kobar.

Sjahrir menyambut baik usulan tersebut dan meminta waktu untuk mempelajari segala usul sebelum pemerintahannya dapat mengambil sikap tertentu. Sebagai pimpinan dalam kabinet parlementer yang bertanggungjawab kepada KNIP, ia juga harus memperoleh dukungan dari anggota KNIP untuk memberi jawaban atas usulan tersebut. Akan tetapi pada akhirnya perundingan ini tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini disebabkan karena Sjahrir dan kabinetnya sedang sibuk mengadakan rapat bersama KNIP, selain itu timbul kejengkelan dan keprihatinan di pihak Indonesia akibat insiden penembakan Mr. M. Roem oleh serdadu Belanda pada tanggal 21 November 1945.⁴⁴

Perundingan selanjutnya diadakan pada tanggal 10 Februari 1946, dalam perundingan ini Pemerintah Inggris mengirim Sir Archibald Clark Kerr sebagai duta istimewa ke Indonesia. Pihak Belanda diwakili oleh Wakil Gubernur Jenderal Dr. H.J. van Mook. Perundingan ini menghasilkan pernyataan politik pemerintah Belanda dengan isi pokoknya sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri di dalam lingkungan Kerajaan Belanda.

⁴⁴ Ida Anak Agung Gde Agung, *op.cit*, hlm. 41.

⁴⁵ Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *op.cit*, hlm. 124. Osman Raliby, *op.cit*, hlm 232.

- 2) Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedangkan urusan luar negeri diurus oleh Pemerintah Belanda.
- 3) Sebelum dibentuk persemakmuran akan dibentuk pemerintah peralihan selama 10 tahun.
- 4) Indonesia akan masuk sebagai anggota PBB.

Dalam perundingan itu, pihak Indonesia belum sempat memberikan usulan jawaban. Di dalam negeri terdapat gabungan organisasi dengan nama *Persatuan Perjuangan* (PP) yang dipimpin oleh Tan Malaka, melakukan oposisi terhadap Kabinet Sjahrir. Kelompok ini berpendapat bahwa perundingan hanya dapat dilaksanakan atas dasar pengakuan 100% terhadap Republik Indonesia. Dalam sidang KNIP di Solo pada tanggal 28 Februari-2 Maret 1946, mayoritas suara menentang kebijakan Perdana Menteri Sjahrir. Akibat oposisi yang terlalu kuat tersebut, akhirnya Sjahrir menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden.⁴⁶

D. Sutan Sjahrir Sebagai Perdana Menteri untuk yang Kedua (12 Maret-27 Juni 1946)

1) Terbentuknya kabinet Sjahrir II

Pada pembukaan sidang KNIP tanggal 28 Februari 1946, Presiden Soekarno mengemukakan persetujuannya atas pengunduran Kabinet Sjahrir. Kemudian Sjahrir menyampaikan laporan kegiatan-kegiatan kabinetnya, disertai penekanan bahwa tidak ada pilihan lain bagi RI selain berjuang melalui jalan damai dan perundingan. Kemudian KNIP membentuk komite 11 orang yang terdiri atas pendukung Sjahrir dan Tan Malaka, komite ini akan membantu formateur yang

⁴⁶ Moh. Hatta, *op.cit*, hlm 481.

akan ditunjuk. Soekarno menginginkan terbentuknya sebuah kabinet koalisi dengan keanggotaan yang lebih luas, tetapi tetap meneruskan kebijaksanaan perundingan Kabinet Sjahrir. Atau dengan kata lain Soekarno hanya menginginkan perubahan susunan kabinet, tetapi tidak mengubah politiknya.⁴⁷

Presiden Soekarno kemudian meminta pimpinan Persatuan Perjuangan untuk menunjuk calon-calonnya yang akan duduk dalam kabinet yang akan dibentuk. Soekarno juga mengusulkan agar jabatan menteri luar negeri dipegang oleh Sjahrir dan menteri pertahanan oleh Amir Sjarifuddin, sedangkan kementerian lain dibagi oleh partai-partai lainnya. Soekarno memberikan mandat kepada pimpinan Persatuan Perjuangan, yaitu Tan Malaka untuk membentuk kabinet baru, akan tetapi ia gagal karena tidak mendapat dukungan dari Persatuan Perjuangan sendiri. Banyak unsur dalam koalisi Persatuan Perjuangan tidak menginginkan suatu kabinet yang dikuasai oleh Tan Malaka beserta kelompoknya. Kebanyakan tokoh militer dan politik yang mau bekerjasama dengan Tan Malaka hanya untuk melemahkan dan menjatuhkan posisi Sjahrir sebagai perdana menteri.⁴⁸

Setelah mandat yang ditawarkan oleh Presiden Soekarno tidak dapat dilaksanakan oleh pimpinan Persatuan Perjuangan, Soekarno kemudian meminta Sjahrir untuk membentuk kabinet baru. KNIP yang masih berada dalam masa sidang segera menyetujui tindakan ini, dengan memberi kepercayaan kepada Sjahrir. KNIP juga mengadakan pemungutan suara agar Kabinet Sjahrir nantinya lebih diperluas sehingga dapat mewakili aliran-aliran politik utama dalam negeri.

⁴⁷ G. Moedjanto, *op.cit*, hlm

⁴⁸ George McTurnan Kahin, *op.cit*, hlm. 222.

Selanjutnya Sjahrir mengadakan perundingan bersama Soekarno dan Hatta selama seminggu, dan pada tanggal 2 Maret 1946 Sjahrir mengumumkan keanggotaan kabinet barunya.⁴⁹ Kabinet Sjahrir II dilantik pada tanggal 12 Maret 1946 dengan susunan yang lebih baik daripada Kabinet Sjahrir I.⁵⁰

Sjahrir kemudian menetapkan program kerja yang akan dilaksanakan oleh kabinetnya. Program ini sesuai dengan program lima pasal yang dibuat untuk menandingi program tujuh pasal yang diajukan oleh Persatuan Perjuangan. Adapun program Kabinet Sjahrir II ialah sebagai berikut:⁵¹

- a) Berunding atas dasar pengakuan Republik Indonesia (100%)
- b) Mempersiapkan rakyat negara disegala lapangan politik, ketentaraan, ekonomi, dan sosial untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia.
- c) Menyusun Pemerintahan pusat dan daerah yang demokratis.
- d) Berusaha segiat-giatnya untuk menyempurnakan pembagian makanan dan pakaian.
- e) Menjalankan perkebunan dan industri-industri penting dengan pengawasan pemerintah.

⁴⁹ *Idem.*

⁵⁰ Susunan Kabinet Sjahrir II sebagai berikut: Perdana Menteri: Sutan Sjahrir (Partai Sosialis); Menteri Luar Negeri: Sutan Sjahrir; Menteri Muda Luar Negeri: H. Agus Salim; Menteri Dalam Negeri: Dr. Sudarsono (Sosialis); Menteri Pertahanan: Mr. Amir Sjarifuddin (Sosialis); Menteri Muda Pertahanan: Arudji Kartawinata (Masyumi); Menteri Kehakiman: Mr. Suwandi; Menteri Muda Kehakiman: Mr. Hadi; Menteri Penerangan: Moh. Natsir (Masyumi); Menteri Keuangan: Ir. Surachman; Menteri Muda Keuangan: Mr. Sjafruddin Prawiranegara (Masyumi); Menteri Pertanian/ Persediaan: Ir. Rasad; Menteri Muda Pertanian/ Persediaan: Ir. Saksono (Sosialis); Menteri Perdagangan/ Perindustrian: Ir. Darmawan Mangunkusumo; Menteri Perhubungan: Ir. Abdul Karim; Menteri Muda Perhubungan: Ir. Djuanda; Menteri Pekerjaan Umum: Ir. Putuhena (Parkindo); Menteri Muda Pekerjaan Umum: Ir. Laoh (PNI); Menteri Sosial: Mrs. Maria Ulfah Santoso; Menteri Muda Sosial: Mr. ABD. Madjid Djojoaningrat (Sosialis); Menteri Pengajaran:---; Menteri Agama: H. Rasyid (Masyumi); Menteri Kesehatan: Dr. Darma Setiawan; Menteri Muda Kesehatan: Dr. Leimana (Parkindo); Menteri Negara: Wikana (Pemuda); Menteri Muda Pengajaran: Dr. T.G.S Mulia.

⁵¹ Soebadio Sastrosatomo, *op.cit*, hlm. 234-235.

Dalam menyusun kabinetnya yang baru, Sjahrir mengutamakan sifat dan kecakapan para menteri, selain itu ia juga memperhitungkan corak koalisi kabinet tersebut, sebab anggota kabinet terdiri dari orang-orang yang mewakili partai politik masing-masing. Dengan terbentuknya kabinet Sjahrir II, maka Persatuan Perjuangan dengan Minimum Programnya resmi menjadi pihak oposisi.

2) Usaha-usaha Sjahrir dalam Kabinet Sjahrir II

Alasan Presiden Soekarno menunjuk Sjahrir sebagai formatur kabinet kembali ialah karena ingin melanjutkan kebijaksanaan perundingan Kabinet Sjahrir I. Oleh karena itu, dalam kabinetnya yang kedua, Sjahrir tetap melanjutkan perundingan sebagai usaha untuk mempertahankan kemerdekaan RI.

Sebelum Kabinet Sjahrir I jatuh, van Mook sudah menyampaikan usulan pemerintah Belanda kepada RI. Ketika kabinet baru sudah terbentuk, Sjahrir kemudian menyusun usul balasan Pemerintah RI, yang intinya berisi hal-hal berikut.⁵²

- a) Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas Hindia-Belanda.
- b) Pinjaman-pinjaman Belanda sebelum tanggal 8 Maret 1942 menjadi tanggungan Pemerintah RI.
- c) Federasi Indonesia-Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu, dan mengenai urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang terdiri atas orang-orang Indonesia dan Belanda.

⁵² Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notokusanto, *op.cit*, hlm. 125.

- d) Tentara Belanda segera ditarik dari Indonesia dan jika perlu diganti dengan tentara RI.
- e) Pemerintah Belanda harus membantu Pemerintah Indonesia untuk dapat diterima sebagai anggota PBB.
- f) Selama perundingan berlangsung semua aksi militer harus dihentikan dan pihak Republik akan melakukan pengawasan terhadap pengungsian tawanan-tawanan Belanda dan interniran lainnya.

Usul balasan ini disampaikan kepada van Mook, akan tetapi pihak Belanda tidak dapat menerima usul tersebut, meskipun pihak Republik sudah memberikan konsesi-konsesi yang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sendiri sulit diterima. Sebagai gantinya, van Mook mendapat inspirasi dari persetujuan antara Vietnam dan Perancis tanggal 6 Maret 1946, bahwa Republik Vietnam merupakan negara bebas dalam lingkungan federasi Indocina. van Mook mengusulkan pembentukan negara Indonesia yang merdeka yang berbentuk federasi dalam suatu Uni dengan Belanda.⁵³

Pada tanggal 27 Maret 1946, Sjahrir memberikan jawaban yang disertai konsep persetujuan dalam membentuk traktat dengan isi pokok sebagai berikut:⁵⁴

- a) Supaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan de facto RI atas Jawa dan Sumatera.
- b) Supaya RI dan Belanda bekerjasama membentuk RIS.
- c) Republik Indonesia Serikat bersama-sama dengan Nederland, Suriname, Curacao, menjadi peserta dalam suatu ikatan kenegaraan Belanda.

⁵³ G.Moedjanto, *op.cit*, hlm 162.

⁵⁴ Susanto Tirtoprodjo, *op.cit*, hlm 19.

Usul balasan tersebut, mampu memberi pendekatan antara Indonesia dan Belanda. Selanjutnya Sjahrir menyusun suatu rancangan untuk mengadakan suatu perundingan yang lebih tinggi tingkatannya. Pada tanggal 14 sampai 24 April 1946 diadakan *Perundingan Hoge Veluwe* di Negeri Belanda. Delegasi Indonesia diwakili oleh Suwandi, Sudarsono dan Pringgodigdo, sedangkan dari pihak Belanda diwakili oleh Perdana Menteri Prof. Dr. Ir. W. Schermerhorn, Logermann, Van Rooyen, dan van Mook.⁵⁵

Dalam perundingan tersebut, pihak Belanda menolak konsep hasil pertemuan Sjahrir dan van Mook yang dilakukan sebelum perundingan. Usulan Sjahrir bagi pengakuan atas wilayah Jawa dan Sumatera sebagai wilayah kedaulatan RI, sebelumnya telah disetujui oleh van Mook. Pihak Belanda hanya bersedia untuk memberikan pengakuan *de facto* kedaulatan RI atas Jawa dan Madura saja, selain itu dikurangi oleh daerah-daerah yang dikuasai oleh pasukan Sekutu. Sedangkan RI masih harus tetap menjadi bagian dari Kerajaan Belanda. Perundingan *Hoge Veluwe* yang dilakukan selama sepuluh hari tersebut mengalami kegagalan. Akan tetapi perundingan ini merupakan tahapan dalam peletakan dasar untuk perundingan selanjutnya.⁵⁶ Akibat kegagalan ini untuk sementara waktu hubungan Indonesia dengan Belanda terputus.

Pada tanggal 2 Mei 1946 van Mook kembali membawa usul pemerintahannya. Usulan tersebut berisi mengenai pengakuan Pemerintah Belanda terhadap Republik Indonesia sebagai bagian dari Persemakmuran

⁵⁵ Tuk, Setyohadi, *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa*, Jakarta, Rajawali Corporation, 2002. hlm 49. Basuki, Suwarno, *Hubungan Indonesia-Belanda Periode 1945-1950*, Jakarta, PT. Setyo Aness, 1999, Jilid II, hlm. 217.

⁵⁶ *Ibid*, Hal 50. *Ibid*, hal 228. Ida Anak Agung Gde Agung, *op. cit.* hlm 84.

Indonesia yang berbentuk serikat, serta merupakan bagian dari Kerajaan Belanda. Selain itu, Pemerintah Belanda akan mengakui *de facto* kekuasaan RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera, dikurangi dengan daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Inggris dan Belanda.⁵⁷ Usul Belanda tersebut tidak dapat diterima oleh Sjahrir, karena tidak mengandung sesuatu yang baru.

Di dalam negeri, posisi Sjahrir semakin sulit akibat serangan pihak oposisi yang semakin kuat. Puncak dari tindakan oposisi ini ialah penculikan terhadap Sjahrir beserta rombongannya pada tanggal 28 Juni 1946 di Solo.⁵⁸ Presiden Soekarno menyatakan keadaan darurat dan mengambil alih pemerintahan untuk sementara, serta mendesak pada pihak oposisi agar segera membebaskan Sjahrir beserta pejabat lainnya.⁵⁹ Dengan pernyataan pengambil-alihan pemerintahan oleh Presiden Soekarno tersebut, maka berakhirilah masa jabatan Kabinet Sjahrir II.

E. Sutan Sjahrir Sebagai Perdana Menteri untuk yang Ketiga (2 Oktober 1946-27 Juni 1947)

1) Terbentuknya kabinet Sjahrir III

Peristiwa penculikan terhadap Sjahrir oleh pihak oposisi, dinyatakan sebagai keadaan darurat oleh Presiden Soekarno. Presiden kemudian mengambil-alih pemerintahan untuk sementara. Setelah Sjahrir dibebaskan dan keadaan krisis dapat diatasi, pemberlakuan undang-undang keadaan darurat segera dicabut dan kekuasaan pemerintahan dikembalikan kepada kabinet yang akan dibentuk.

⁵⁷ Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *op.cit*, hlm 127.

⁵⁸ Aboe Bakar Loebis, *Kilas Balik Revolusi Kenangan, Pelaku, dan Saksi*, Jakarta, UI Press, 1992, hlm 161.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 164. George McTurnan Kahin, *op.cit*, hlm 238.

Sjahrir ditunjuk kembali sebagai perdana menteri oleh Soekarno dan pada bulan Oktober dibentuk Kabinet Sjahrir yang ketiga.⁶⁰

Kabinet Sjahrir yang ketiga ini merupakan kabinet koalisi, dimana anggotanya melibatkan wakil-wakil partai Masyumi dan PNI yang sebelumnya menentang kebijakan Sjahrir. Selain itu, anggota kabinet juga berasal dari komunitas Cina dan Arab. Kabinet ini juga mendapat dukungan dari KNIP yang memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah untuk melanjutkan program-program kabinet sebelumnya, terutama untuk melanjutkan perundingan.

2) Usaha-usaha Sjahrir dalam Kabinet Sjahrir III

Sesudah Kabinet Sjahrir III dilantik, Sjahrir kembali melanjutkan perundingan dengan pihak Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946, diadakan perundingan yang dipimpin oleh Sjahrir dengan anggota-anggotanya, Mr. Moh. Roem, Mr. Susanto Tirtoprodjo, dan dr. A.K. Gani. Sedangkan dipihak

⁶⁰ Susunan Kabinet Sjahrir III adalah sebagai berikut: Perdana Menteri: Sutan Sjahrir (P.Sosialis); Menteri Luar Negeri: Sutan Sjahrir; Menteri Muda Luar Negeri: H. Agus Salim (non partai); Menteri Dalam Negeri: Mr. Moh. Roem (Masyumi); Menteri Muda Dalam Negeri: Wijono (Sosialis); Menteri Pertahanan: Mr. Amir Sjarifuddin (Sosialis); Menteri muda Pertahanan: Harsono Tjokroaminoto (Masyumi); Menteri Kehakiman: Mr. Susanto Tirtoprodjo (PNI); Menteri Penerangan: Moh. Natsir (Masyumi); Menteri Muda Penerangan: A.R. Baswedan; Menteri Keuangan: Mr. Sjafruddin Prawiranegara (Masyumi); Menteri Muda Keuangan: Mr. Lukman Hakim (PNI); Menteri Kemakmuran: Dr. A.K.Gani (PNI); Menteri Muda Kemakmuran: Mr. Joesoef Wibisono (Masyumi); Menteri Perhubungan: Ir. Djuanda; Menteri Muda Perhubungan: Setiadjud (PBI); Menteri Pekerjaan Umum: Ir. Putuhena (Parkindo); Menteri Muda Pekerjaan Umum: Ir. H. Laoh (PNI); Menteri Sosial: Mr. Maria Ulfah Santoso; Menteri Muda Sosial: Mr. Abd. Madjid Djodjodiningrat (Sosialis); Menteri Pengajaran: Mr. Suwandi; Menteri Muda Pengajaran: Ir. Gunarso; Menteri Agama: K.H Faturrachman (Masyumi); Menteri Kesehatan: Dr. Darma Setiawan; Menteri Muda Kesehatan: Dr. Leimena (Parkindo); Menteri Negara: Sri Sultan Hamengkubuwono IX; Menteri Negara: Wahid Hasyim (Masyumi); Menteri Negara: Wikana (wakil pemuda); Menteri Negara: Dr. Sudarsono (Sosialis); Menteri Negara: Mr. Tan Po Goan (Sosialis); Menteri Negara: Dr. D.D. Setyabudy. Departemen Penerangan, *op.cit*, hlm 5-6.

Belanda dibentuk *Komisi Jenderal*, yang dipimpin oleh Prof. Schermerhorn, dengan anggotanya Max van Poll, F.de Boer, dan van Mook.⁶¹

Perundingan dilaksanakan atas dasar program politik pemerintah yang menekankan pada perundingan atas dasar pengakuan merdeka 100%, dan persiapan rakyat serta negara dalam bidang politik, militer, ekonomi, dan sosial untuk mempertahankan RI.⁶² Perundingan ini menghasilkan usul-usul dari pihak Belanda yang tidak dapat diterima oleh Sjahrir, Belanda menginginkan agar Indonesia menjadi negara bagian dari Kerajaan Belanda. Menurut Sjahrir usul ini masih berisi gagasan yang menuntut RI tetap dalam lingkungan Belanda, maka untuk sementara waktu perundingan ditunda kembali.

Perundingan selanjutnya diadakan di Linggarjati,⁶³ perundingan ini dilaksanakan pada tanggal 15 November 1946, delegasi Indonesia dipimpin oleh Sutan Sjahrir dan delegasi Belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn. Perundingan ini kemudian menghasilkan 17 pasal ketentuan, yang pokok-pokok persetujuannya berisi mengenai hal-hal berikut:⁶⁴

- a) Pemerintah Belanda akan mengakui wilayah Indonesia secara *de facto* atas Jawa, Madura dan Sumatera. Daerah-daerah yang sedang diduduki oleh

⁶¹ Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *op.cit*, hlm 130. Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit*, hlm 116.

⁶² Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *op.cit*, hlm 131.

⁶³ Perundingan ini diadakan di Linggarjati karena pihak RI tidak mau berunding di Jakarta dengan alasan keamanan, begitu juga pihak Belanda tidak bersedia mengadakan perundingan di Yogyakarta yang merupakan tempat kedudukan pemerintah dan pemimpin RI. Linggarjati dipilih atas saran Ibu Maria Ulfah, dengan alasan letak Linggarjati sebagai tempat peristirahatan yang iklimnya nyaman serta tidak jauh dari Jakarta.

A.B. Lopian & P.J. Drooglever, *Menelusuri Jalur Linggajati*, hlm 15.

⁶⁴ Ide Anak Agung Gde Agung, *op.cit*, hlm 170-175. K.M.L. Tobing, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*, Jakarta, Gunung Agung, 1986, hlm 2-10.

Belanda akan dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia secara berangsur-angsur.

- b) Pemerintah Belanda dan Indonesia akan bekerjasama untuk membentuk Negara Indonesia Serikat yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda sebagai negara yang berdaulat.
- c) Pemerintah Belanda dan Indonesia akan bekerjasama untuk membentuk Persekutuan Belanda-Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan Kerajaan Belanda dalam hal ini adalah negeri Belanda, Suriname, dan Curacao, sedangkan yang dimaksud dengan Indonesia adalah NIS. Pimpinan tertinggi dalam persekutuan ini adalah Raja Belanda.
- d) Pemerintah Belanda dan Indonesia akan mengusahakan untuk mewujudkan NIS dan Persekutuan Belanda-Indonesia sebelum tanggal 1 Januari 1949.
- e) Pemerintah RI akan mengakui dan memulihkan hak-hak orang asing, serta mengembalikan barang-barang yang menjadi hak-hak orang asing tersebut.
- f) Pemerintah Belanda dan Indonesia setuju untuk melakukan pengurangan kekuatan tentara masing-masing dan melakukan kerjasama dalam bidang ketentaraan.
- g) Apabila terjadi perselisihan antara Pemerintah Belanda dan Indonesia yang berkaitan dengan persetujuan ini, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalah tersebut kepada badan arbitrase untuk menyelesaikannya.

Persetujuan Linggarjati ditandatangani pada tanggal 15 November di kediaman Sjahrir di Jakarta.⁶⁵ Proses untuk memperoleh pengesahan persetujuan ini dari KNIP cukup sulit, karena dianggap terlalu menguntungkan pihak Belanda dan tidak sesuai dengan tuntutan perjuangan yang menghendaki merdeka 100%. Agar KNIP dapat menerima persetujuan tersebut, maka Presiden Soekarno mengadakan penambahan anggota KNIP, namun KNIP memprotes penambahan tersebut. Wakil Presiden Moh. Hatta kemudian menyatakan apabila hal tersebut ditolak oleh KNIP, maka presiden dan wakil presiden akan turun dari jabatan. Persetujuan Linggarjati akhirnya dapat diterima dan diratifikasi oleh KNIP pada tanggal 24 Maret 1947.⁶⁶

Setelah Belanda memberikan pengakuan kekuasaan *de facto* RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera, negara-negara lain kemudian mengikutinya. Pengakuan tersebut datang dari Inggris, AS, Mesir, Libanon, Suria, Afganistan, Burma, Saudi Arabia, Yaman, Rusia, serta India dan Pakistan yang pada waktu itu belum resmi memperoleh kedaulatan dari Inggris. Negara-negara tersebut kemudian membuka perwakilan konsuler di Indonesia, hal ini merupakan perkembangan yang dapat memperkuat kedudukan RI.⁶⁷

Banyak pihak yang menganggap dalam Persetujuan Linggarjati Sjahrir terlalu banyak memberi konsesi pada pihak Belanda dan banyak ketidakjelasan dalam Persetujuan yang dapat menimbulkan perbedaan tafsiran antara Indonesia dan Belanda. Sjahrir mengalami kesulitan berhubungan dengan pihak Belanda,

⁶⁵ K.M.L. Tobing, *op.cit*, hlm 1.

⁶⁶ G. Moedjanto, *op.cit*, hlm 185. Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Op.cit*, hlm 163-165.

⁶⁷ *Ibid*, hlm 184.

sehingga banyak yang menarik dukungan terhadapnya, termasuk partainya sendiri, yaitu Partai Sosialis. Akibat banyaknya pertentangan dari pihak oposisi dan partai-partai pemerintah terhadap kebijakan Sjahrir, maka ia kemudian mengundurkan diri dan mengembalikan mandatnya kepada presiden pada tanggal 27 Juni 1947.⁶⁸

Apabila dilihat lebih lanjut, Persetujuan Linggarjati ini memiliki kelebihan, Sjahrir mencantumkan pasal mengenai arbitrase yang memungkinkan untuk meningkatkan masalah Indonesia menjadi masalah internasional apabila terjadi pelanggaran. Hal ini terbukti ketika Belanda melancarkan agresi militernya yang pertama, karena adanya pasal mengenai arbitrase maka masalah Indonesia dapat diajukan ke badan internasional (PBB). Pada tanggal 4 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi Australia untuk penyelesaian pertikaian Indonesia-Belanda.⁶⁹ Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 1947, Sjahrir memimpin delegasi Indonesia ke sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success, Amerika Serikat.⁷⁰ Dalam sidang ini Sjahrir diberi kesempatan untuk berpidato di kanvas internasional, momen inilah yang membuat nama Indonesia mulai dikenal oleh dunia internasional. Sejak saat itu pertikaian Indonesia-Belanda tidak pernah luput dari perhatian PBB.

⁶⁸ George McTurnan Kahin, *op.cit*, hlm 261-262.

⁶⁹ Departemen Luar Negeri Indonesia, *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa*, Jakarta, Buku I, 2004, hlm 582.

⁷⁰ Solichin Salam, *op.cit*, hlm 52-53.

BAB IV
TANTANGAN-TANTANGAN
YANG DIHADAPI SUTAN SJAHRIR

A. Oposisi Persatuan Perjuangan

1. Terbentuknya Persatuan Perjuangan

Kebijakan Sjahrir menjalankan politik diplomasi untuk menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah ditentang oleh kelompok-kelompok yang lebih mengutamakan perjuangan fisik. Kelompok-kelompok ini yakin perjuangan fisik atau berperang dengan Belanda mampu membawa Indonesia mencapai kemerdekaan 100%. Keyakinan tersebut berdasarkan atas percaya diri yang muncul ketika mereka berhasil menghadapi pasukan Belanda dan sekutu di medan perang. Pertempuran Ambarawa dan Surabaya merupakan titik balik kekuatan Republik. Demikian pula dengan *clash* di Magelang, pihak Republik berhasil memukul mundur pasukan sekutu. Di Banyumas, pasukan BKR/TKR pimpinan Jenderal Sudirman berhasil merebut senjata-senjata milik Jepang.¹ Kemenangan-kemenangan inilah yang membangkitkan rasa percaya diri kelompok penentang diplomasi, mereka yakin apabila kekuatan-kekuatan yang ada bersatu dan dikoordinasi dengan baik pasukan Belanda dapat dikalahkan.

Kelompok-kelompok penentang kebijakan Sjahrir ini antara lain ialah kelompok yang terdiri atas mantan-mantan menteri dalam Kabinet Soekarno,

¹ M.Yuanda Zara, *Peristiwa 3 Juli 1946*, Yogyakarta, MedPress (Anggota IKAPI), 2009, hlm 60-61.

seperti Ahmad Subardjo, Iwa Kusuma Sumantri, Muhammad Yamin, dan Abikusno Cokrosuyoso. Mereka merupakan orang-orang yang tidak puas dengan kebijakan Sjahrir dan merasa tersingkir dari panggung politik, serta tersinggung dengan cap kolaborator yang diungkapkan Sjahrir dalam buku *Perjuangan Kita*.²

Kelompok lainnya ialah kelompok yang dipimpin oleh Bung Tomo dengan nama Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI). Kelompok ini menentang kebijakan Sjahrir untuk melakukan perundingan karena menurut mereka apabila mengadakan perundingan dengan Belanda, maka kita akan ditipu. Kelompok penentang kebijakan Sjahrir lainnya ialah kelompok Tan Malaka, yakni kelompok penganut aliran Trotskis yang bersumber pada konsep pelaksanaan revolusi permanen tanpa adanya perundingan dengan pihak musuh.³ Kelompok ini merupakan kelompok oposisi yang paling kuat menentang kebijakan Sjahrir untuk melakukan perundingan dengan pihak Belanda.

Pada tanggal 6 Januari 1946, diadakan kongres rakyat di Purwokerto yang dihadiri oleh 143 organisasi penentang kebijakan Sjahrir. Pembicara utama dalam kongres tersebut ialah Tan Malaka yang muncul untuk pertama kalinya di depan umum sejak tahun 1922. Dalam pidatonya, Tan Malaka menganjurkan untuk menyusun suatu minimum program yang singkat dan jelas, sehingga seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat mendukungnya.⁴ Kongres di Purwokerto ini merupakan pertemuan awal dari organisasi-organisasi yang tidak setuju diadakannya perundingan dengan pihak Belanda.

² *Ibid*, hlm 62.

³ Subadio Sastrosatomo, *Perjuangan Revolusi*, Jakarta, Puataka Sinar Harapan, 1987, hlm 209.

⁴ *Ibid*, hlm 211.

Minimum Program yang dimaksud Tan Malaka ialah sebagai berikut:⁵

- 1) Berunding atas pengakuan kemerdekaan 100%.
- 2) Pemerintahan rakyat (artinya haluan pemerintah sesuai dengan kehendak rakyat).
- 3) Tentara rakyat (artinya haluan Tentara sesuai dengan kehendak rakyat).
- 4) Melucuti senjata Jepang.
- 5) Mengurus tawanan bangsa Eropa.
- 6) Menyita perkebunan musuh dan menyelenggarakannya.
- 7) Menyita dan menyelenggarakan perindustrian (pabrik, bengkel, tambang, dll) milik musuh.

Rumusan Minimum Program yang ditawarkan oleh Tan Malaka tersebut lebih mengutamakan perlawanan terhadap sekutu dan Belanda. Pemerintah RI mengadakan perundingan dengan Belanda dan sekutu agar kemerdekaan dan kedaulatan RI dapat diakui oleh pihak lain. Sedangkan minimum program lebih mengutamakan perlawanan fisik dan revolusi total, tindakan ini lebih merupakan pemberontakan terhadap penjajah daripada bertindak sebagai negara yang berdaulat.⁶

Memunculkan Tan Malaka dan Minimum Program dalam kongres di Purwokerto merupakan usaha dari Sukarni dan Adam Malik. Mereka ingin menggantikan posisi Soekarno-Hatta dengan Tan Malaka. Tindakan tersebut dilakukan atas dasar ketidaksetujuan mereka diadakannya perundingan dengan Belanda. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan jalan perundingan

⁵ Ben Anderson, *Revoloesi Pemuda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1988. hlm 320-321.

⁶ Subadio Sastrosatomo, *op.cit* hlm 212.

yang dilakukan oleh Sjahrir merupakan politik yang sejalan dengan garis politik Soekarno-Hatta, namun Sukarni dkk merasa sangsi atas kesediaan pemerintah tersebut.⁷

Kehadiran dan program Tan Malaka pada saat itu mempunyai daya tarik tersendiri bagi orang-orang dan kelompok yang tidak menyukai program Kabinet Sjahrir. Pada tanggal 15 dan 16 Januari 1946, diadakan kongres perjuangan rakyat yang kedua di Surakarta. Kongres ini dihadiri sekitar 133 organisasi dan badan perjuangan. Pada kesempatan ini, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta serta semua turut diundang untuk menghadiri kongres, namun mereka tidak hadir. Dari pihak pemerintah, yang datang menghadiri kongres ialah Jenderal Sudirman yang menyatakan bahwa ia turut menentang kebijakan Kabinet Sjahrir.⁸

Kongres yang kedua ini menghasilkan persetujuan dari anggota-anggotanya untuk membentuk sebuah organisasi yang mampu mewadahi aspirasi seluruh organisasi dan badan perjuangan yang ada. Sesuai dengan pidato Tan Malaka yang mengingatkan betapa pentingnya organisasi dan persatuan, maka disetujuiilah pembentukan organisasi dengan nama Persatuan Perjuangan (PP). Selanjutnya dibentuk "Panitia Kecil" yang terdiri atas sebelas anggota untuk membuat usul-usul kongkret bagi pengorganisasian intern badan baru tersebut. Keanggotaan panitia ini merupakan gambaran dari kelompok-kelompok yang tergabung saat itu, seperti Pesindo yang diwakili oleh Ibnu Parna, Masyumi diwakili oleh Wali al-Fatah, Dewan Perjuangan Jawa Tengah diwakili Sakirman,

⁷ *Ibid*, hlm 216.

⁸ *Ibid*, hlm 217.

PS diwakili Abdulmadjid, TKR diwakili oleh Jenderal Sudirman, Angkatan Laut diwakili Atmadji, KNI-Surakarta diwakili Soejono, PRI Surabaya diwakili oleh Usman dan Perwani diwakili oleh Nyonya Mangoenkoesumo.⁹

Daya tarik Persatuan Perjuangan terus berkembang, pada tanggal 27 Januari 1946, diadakan kongres lanjutan yang dilaksanakan di Surakarta. Dalam kongres ini telah bergabung beberapa partai dan badan perjuangan lainnya, seperti PKI yang diwakili oleh Mr. Yusuf, BPRI diwakili oleh Bung Tomo, PBI, dan berbagai partai lainnya. Selanjutnya dalam kongres yang diadakan pada akhir Januari 1946, anggota organisasi Persatuan Perjuangan semakin bertambah luas dengan ikut sertanya BPKRI (Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia) dan beberapa badan perjuangan besar seperti Barisan Banteng dan Dewan Perjuangan Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa penampilan dan kewibawaan Tan Malaka sebagai pencetus lahirnya Persatuan Perjuangan telah mencapai puncak keberhasilannya. Sejumlah besar golongan yang berbeda-beda telah memutuskan untuk bergabung dan mulai menjauhi pemerintah.

2. Usaha Menjatuhkan Kabinet Sjahrir I

Persatuan Perjuangan semakin populer dan berkembang dengan cepat berkat kepribadian dan muslihat Tan Malaka yang dikemukannya dengan konsekuen. Selain itu kesulitan-kesulitan yang dihadapi Kabinet Sjahrir juga mendorong kelompok-kelompok lain untuk mencari alternatif lain sehingga dapat meningkatkan popularitas organisasi tersebut. Sejak terbentuknya Persatuan Perjuangan, wibawa Sjahrir dan kabinetnya semakin menurun dan mengalami

⁹ Ben Anderson, *op.cit*, hlm 234.

¹⁰ *Ibid*, hlm 235.

kesulitan-kesulitan baik dalam bidang politik maupun militer. Perundingan-perundingan yang dilakukan oleh Sjahrir tidak membuahkan hasil yang gemilang, kedudukan Republik Indonesia dalam diplomasi masih sulit. Di kalangan partai pendukung kabinet juga terdapat ketidakpuasan, BPKNIP pada akhirnya mengalami reorganisasi, jumlah anggotanya diperbesar dari 8 menjadi 25 orang. Pemuda menyerang Kabinet Sjahrir dan menuduh sejumlah menteri dicap berbau Belanda, akibatnya pada bulan Desember kabinet terpaksa direshuffle.¹¹

Pemindahan Ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946 menandakan kelemahan pemerintah dan mempunyai konsekuensi-konsekuensi untuk pembagian kekuasaan antara kabinet dan musuhnya. Karena Sjahrir menjabat sebagai perdana menteri sekaligus menteri luar negeri, ia merasa lebih baik jika mempertahankan kedudukannya di Jakarta, sedangkan presiden dan wakil presiden pindah ke pedalaman. Perpisahan secara fisik ini dapat memperlebar dan memperdalam jurang kejiwaan politik antara kabinet dan musuh-musuhnya, karena Jakarta dan Yogyakarta merupakan dua lingkungan yang sangat berbeda. Jakarta sedang dikuasai oleh sekutu dan yang dapat mengambil bagian untuk menghadapi sekutu adalah orang-orang yang berintelektual Belanda. Sedangkan Yogyakarta merupakan sebuah wilayah dimana tidak ada seorangpun anggota sekutu yang dapat dijumpai, dan pernyataan kemerdekaan dapat ditunjukkan secara leluasa. Di sini markas besar militer telah lama didirikan, selain itu juga terdapat markas besar Hisbullah dan Laskar Rakyat

¹¹ G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggajati*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, Jilid 1, 1988, hlm 153.

Mataram pimpinan Sultan. Jakarta dan Yogyakarta masing-masing menjadi simbol dan perjuangan.¹²

Untuk mengatasi masalah, pemerintah berusaha untuk mendekati pihak Persatuan Perjuangan, akan tetapi pihak Persatuan Perjuangan tidak bersedia menerima selama pemerintah masih menjalankan politik lunak (diplomasi). Pimpinan Masyumi menyatakan kepada Presiden bahwa kepercayaan kepada Kabinet Sjahrir sudah hilang, akibat tidak adanya tindakan dari kabinet ketika terjadi serangan pasukan Inggris di Tangerang, Jakarta, Bogor, dll. Pada tanggal 10 Februari pemerintah mengumumkan usul-usul Belanda, hal ini membuat ketegangan semakin bertambah.

Dalam sidang tanggal 11-13 Februari, Masyumi meminta agar dibentuk kabinet baru yang sungguh-sungguh bercorak nasional. Hal serupa diikuti oleh PNI dan PKI. Selanjutnya BPKNIP mengadakan sidang istimewa pada tanggal 16 Februari, dan menghasilkan resolusi yang intinya berisi desakan kepada Presiden agar merombak susunan kabinet dan mereorganisasi KNIP. Hal ini menunjukkan bahwa BPKNIP sudah tidak percaya lagi kepada Kabinet Sjahrir. Sidang ini tidak dihadiri oleh wakil ketua BPKNIP Adam Malik dan anggotanya Sukarni. Sjahrir menyadari bahwa resolusi dari BPKNIP tersebut menginginkan agar ia mengundurkan diri, oleh karena itu pada tanggal 23 Februari ia mengajukan surat pengunduran diri dan disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Februari.¹³

¹² Ben Anderson, *op.cit*, hlm 331.

¹³ G. Moedjanto, *op.cit*, hlm 156.

3. Usaha Menjatuhkan Kabinet Sjahrir II

Setelah berhasil menjatuhkan Kabinet Sjahrir, anggota Persatuan Perjuangan berencana akan membentuk sebuah kabinet koalisi. Namun pada kenyataannya terjadi pertentangan yang hebat antara Persatuan Perjuangan dengan PNI dan Masyumi, sehingga mereka tidak sanggup untuk membentuk kabinet koalisi tersebut.¹⁴ Soekarno sebenarnya menunjuk Tan Malaka sebagai formatur kabinet baru, namun ia tidak mendapat dukungan yang kuat dari Persatuan Perjuangan sendiri. Hal ini dikarenakan banyak unsur dalam Persatuan Perjuangan yang bergabung hanya untuk menggulingkan Sjahrir, tetapi tidak untuk mendukung Tan Malaka sebagai perdana menteri. Soekarno-Hatta pada dasarnya juga tidak setuju dengan Minimum Program yang dicetuskan oleh Persatuan Perjuangan, sehingga pilihannya ialah menunjuk kembali Sjahrir sebagai formatur kabinet baru.¹⁵

Pembentukan Kabinet Sjahrir yang kedua ini mengundang timbulnya reaksi dan komentar dari berbagai pihak, terutama dari Persatuan Perjuangan. Menurut mereka, susunan Kabinet Sjahrir II belum merupakan perwujudan dari pemerintah koalisi seperti yang diharapkan. Partai Sosialis dianggap masih mendominasi kabinet, dan banyak tokoh non-partai serta orang-orang yang masih ada hubungan kekeluargaan masuk di dalamnya. Di samping itu, dalam kabinet ini lebih banyak diisi oleh golongan profesional; yaitu 18 dari 27 menteri adalah sarjana-sarjana berpendidikan barat.¹⁶

¹⁴ Mohammad Hatta, *op.cit*, hlm 481.

¹⁵ George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Yogyakarta, UNS Press-Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm 222.

¹⁶ G. Moedjanto, *op.cit*, hlm 161.

Menjalankan politik diplomasi untuk menghadapi Belanda merupakan salah satu program yang akan dijalankan oleh Kabinet Sjahrir II, dan hal ini merupakan lanjutan dari diplomasi yang sudah dirintis pada kabinetnya yang pertama. Untuk itu, Sjahrir menyadari sepenuhnya resiko yang akan dihadapi ketika mengambil keputusan tersebut. Ia mengambil langkah-langkah untuk mematahkan oposisi yang akan menjadi penghalang dalam menjalankan diplomasi.

Langkah Sjahrir yang pertama ialah menetralsir sebagian perkumpulan pemuda yang tergabung dalam PP. Pada tanggal 1 Maret 1946, PNI bergabung dalam Persatuan Perjuangan, namun pada saat itu sudah banyak organisasi yang mulai keluar dari Persatuan Perjuangan. Hal ini disebabkan karena organisasi-organisasi tersebut menganggap kelima program kabinet cukup progresif dan secara prinsipial tidak jauh berbeda dengan Minimum Program yang diusulkan Persatuan Perjuangan. Organisasi yang keluar antara lain Pesindo dan BTI, disusul oleh Dewan Perjuangan Jawa Timur, Koperasi Rakyat Cirebon, Parkindo, dan PKRI serta masih banyak organisasi lainnya. Pada pertengahan Maret menjelang pelantikan Kabinet Sjahrir II, anggota Persatuan Perjuangan yang semula mencapai 141 organisasi kini tinggal 40 saja.¹⁷

Posisi Persatuan Perjuangan semakin melemah akibat berkurangnya dukungan yang diterima dari organisasi-organisasi pendukung sebelumnya. Mereka yang masih sejalan dengan Persatuan Perjuangan mengeluarkan ancamannya. BPRI pimpinan Bung Tomo menyatakan jika Persatuan Perjuangan tidak sanggup menjalankan Minimum Program tersebut, maka BPRI akan keluar.

¹⁷ M. Yuanda Zara, *op.cit*, hlm 142-143.

Untuk menggalang solidaritas anggotanya kembali, Persatuan Perjuangan mengadakan kongres yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1946 di Madiun. Kongres ini hanya dihadiri oleh 40 organisasi saja, dan sebagian besar berasal dari golongan militer. Organisasi-organisasi tersebut antara lain BPRI, Barisan Hisbullah, Barisan Banteng, Laskar Rakyat, dan Polisi Khusus yang dipimpin oleh Yasin. Kongres ini menunjukkan bahwa telah terjadi perpecahan di kalangan organisasi perjuangan bersenjata.¹⁸

Langkah Sjahrir selanjutnya ialah mengadakan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin Persatuan Perjuangan. Pemerintah menggunakan strategi yang tepat untuk bisa menangkap para pemimpin Persatuan Perjuangan. Untuk menghindari kontak fisik, penangkapan dilaksanakan saat laskar-laskar pendukung Persatuan Perjuangan sudah meninggalkan kota Madiun. Selain itu, penangkapan dilakukan secara diam-diam sehingga banyak anggota masyarakat yang tidak mengetahui. Kronologi penangkapan dimulai dari sebuah undangan yang ditujukan kepada Tan Malaka. Ia diminta untuk datang ke rumah Residen Madiun, dan selanjutnya ia akan dibawa ke Yogyakarta untuk berunding dengan presiden. Akan tetapi ternyata Tan Malaka tidak dibawa ke Yogyakarta, dan ketika tiba di Surakarta ia diserahkan kepada tentara. Bersamaan dengan itu ditangkap pula pemimpin Persatuan Perjuangan yang lainnya, yaitu Soekarni, Mohammad Yamin, dan Abikusno Tjokrosujoso, kemudian pada tanggal 20 Maret 1946, Chaerul Saleh juga ditangkap.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm 143.

¹⁹ *Ibid*, hlm 146.

Pada tanggal 22 Maret 1946 pemerintah mengumumkan penahanan para pemimpin Persatuan Perjuangan di Surakarta. Penangkapan dilakukan oleh pemerintah atas dasar pertimbangan untuk menghindari timbulnya kekacauan dan keresahan dalam masyarakat, atau perpecahan yang menghalangi politik pemerintah. Penahanan para pemimpin Persatuan Perjuangan ini menimbulkan reaksi berupa kecaman terhadap pemerintah karena dapat dianggap sebagai pemberangusan kebebasan berkumpul dan berbicara.²⁰ Selain itu, pihak militer mengeluarkan pernyataan bahwa penahanan para pemimpin Persatuan Perjuangan dilakukan tidak atas perintah pimpinan militer, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman.²¹

Penahanan atas tokoh-tokoh penting dan paling berpengaruh dalam Persatuan Perjuangan memberi pukulan berat bagi organisasi ini. Kelompok-kelompok yang semula bersatu dan bekerjasama dalam Persatuan Perjuangan akhirnya tercerai-berai dan eksistensi Persatuan Perjuangan sepertinya tinggal menghitung hari saja. Akhir dari segala ketidakpastian dari organisasi ini adalah sebuah usulan untuk membubarkan Persatuan Perjuangan. Pada tanggal 4 Juli 1946, anggota-anggota Persatuan Perjuangan yang masih tersisa mengadakan rapat di Yogyakarta. Rapat yang dipimpin oleh Mangunsarkoro itu berjalan sangat alot. Sebagian besar peserta rapat menginginkan agar Persatuan Perjuangan dibubarkan, dan kemudian mendirikan sebuah badan baru sebagai penggantinya.²²

²⁰ G. Moedjanto, *op.cit*, hlm 164.

²¹ Ben Anderson, *op.cit*, hlm 360.

²² M. Yuanda Zara, *op.cit*, hlm 150.

Rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu:

1. Persatuan Perjuangan dan Konsentrasi Nasional

Atas inisiatif Persatuan Perjuangan untuk memperluas lingkungan persatuannya, pada tanggal 5 Mei 1946 telah berdiri badan pemusatan tenaga nasional untuk mempertahankan negara Republik Indonesia, yaitu Konsentrasi Nasional.

2. Gabungan Gerakan Revolusioner

Untuk meneruskan perjuangan revolusioner yang telah dijalankan oleh Persatuan Perjuangan, maka dibentuklah panitia “Pembentukan Gabungan Revolusioner”. Pembentukan panitia ini dilakukan agar semangat perjuangan tersebut tetap terjaga, terutama dalam Konsentrasi Nasional.

3. Buku *Peringatan Persatuan Perjuangan* yang memuat sejarah perjuangan akan segera diterbitkan.²³

Dengan keputusan-keputusan tersebut, maka berakhirlah riwayat Persatuan Perjuangan dalam pentas revolusi Indonesia. Pemerintahan Sjahrir merasa terganggu dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin Persatuan Perjuangan beserta anggota-anggotanya, sehingga mereka harus disingkirkan. Setelah ditinggal pemimpin-pemimpinnya, Persatuan Perjuangan tidak bisa diorganisir dengan baik. Sebagian diantara organisasi yang ada dibawahnya bergabung dalam organisasi baru bernama Konsentrasi Nasional. Pada perkembangan selanjutnya, ternyata energi yang dimiliki oleh organisasi ini

²³ A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid III: Diplomasi sambil Bertempur*, Bandung, DISJARA-AD & Angkasa, 1977, hlm 105.

tidak sekuat Persatuan Perjuangan. Sehingga pada akhirnya organisasi ini bubar dengan sendirinya.

B. Pertentangan dengan Militer

Pernyataan Sjahrir mengenai kolaborator Jepang yang ditulisnya dalam buku *Perjuangan Kita* merupakan awal dari pertentangan Sudirman terhadap Sjahrir. Sudirman tersinggung karena pasukan Pembela Tanah Air (PETA) yang dipimpinya merupakan bentukan Jepang. Menurutnya pernyataan Sjahrir itu kurang bijak dan menyinggung perasaan kalangan PETA, dan apabila diplomasi Sjahrir memecah persatuan, ia akan mengambil kebijakan sendiri.²⁴

Sudirman kemudian bergabung dengan Tan Malaka dalam Persatuan Perjuangan. Ia menganggap Sjahrir mengkhianati cita-cita proklamasi karena menyodorkan opsi pengakuan kemerdekaan hanya wilayah Jawa dan Madura saja, serta pembentukan Republik Indonesia Serikat. Menurut Sudirman, seharusnya Sjahrir mendesak Belanda, Inggris maupun sekutu untuk mengakui kedaulatan seluruh wilayah Indonesia.²⁵ Sebagai seorang militer yang telah dipersiapkan untuk berperang, Sudirman menilai perundingan dengan Belanda tidak cukup efektif dalam memperjuangkan kedaulatan RI. Menurutnya, sumber daya militer sudah jauh lebih siap untuk menghadapi Belanda, ini melihat jumlah persenjataan yang semakin banyak dan lengkap sebagai hasil rampasan dari Jepang.

Sikap Sudirman juga bisa dilihat dari latar belakang pribadinya. Berbeda dengan elit politik Indonesia yang sebagian besar memperoleh pendidikan

²⁴ Adam Malik, *Mengabdi Republik Jilid II: Angkatan 45*, Jakarta, Gunung Agung, 1978, hlm 155.

²⁵ *Perseteraan Para Kolaborator*, dalam *Majalah Tempo Edisi Khusus 100 tahun Sjahrir*, Edisi 9-15 Maret 2009, hlm 73.

modern, baik di Indonesia maupun di Belanda, Sudirman tumbuh dan berkembang dalam semangat kerakyatan tradisional yang kental. Maka, Tan Malaka yang mendasarkan diri pada perjuangan bersenjata yang sesuai dengan konsep Gerpolek (Gerilya, Politik, Ekonomi) lebih dapat diterima olehnya. Keyakinan Sudirman ini juga dipengaruhi oleh dua orang penasihat politiknya yang juga merupakan orang dekat Tan Malaka, yakni Ahmad Subardjo dan Iwa Kusuma Sumantri. Keduanya mengarahkan pandangan politik Sudirman agar mengikuti garis politik Tan Malaka.²⁶ Dukungan Sudirman terhadap Tan Malaka ini ditunjukkan dengan kehadirannya dalam kongres Persatuan Perjuangan yang diadakan di Surakarta, pada tanggal 15 dan 16 Januari 1946.

Pertentangan dengan anggota militer lainnya dimulai ketika terjadi pembagian tugas dan wewenang antara Menteri Pertahanan dan Markas Besar Angkatan Perang (MBAP), serta pengangkatan komandan divisi. Pada tanggal 23 Februari telah dibentuk panitia yang dipimpin oleh Mayjen Didi Kartasasmita untuk menyusun pertimbangan dasar bagi reorganisasi Departemen Pertahanan dan susunan Angkatan Perang (kekuatan maksimum, bentuk organisasi bidang, dan batas kekuasaannya). Panitia mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya akibat adanya pertentangan antara pendukung pemerintah dengan pendukung Sudirman. Pada tanggal 25 Mei pihak panitia baru dapat mengumumkan hasil kerjanya. Hasil ini menunjukkan kemenangan dipihak

²⁶ M. Yuanda Zara, *op.cit*, hlm 88.

pemerintah karena MBAP hanya berwenang menyusun rencana dan melaksanakan operasi-operasi militer.²⁷

Pengangkatan komandan divisi menimbulkan pertentangan, sebagian dipilih oleh Komandan Resimen (Dan Men), dan sebagian lagi diangkat oleh Menteri Pertahanan. Kekacauan terlihat di divisi III Yogyakarta dan divisi IV Surakarta, komandan divisi III Mayjen Sudarsono menolak pengangkatan Letkol Sarbini (Dan Men Magelang) menjadi Kepala Stafnya. Sementara itu Menteri Pertahanan mengangkat Mayjen Sudiro menjadi komandan divisi IV, akan tetapi komandan lama, yakni Kolonel Sutarto tidak mau diganti dan karirnya dinaikkan menjadi Mayjen.²⁸ Pada dasarnya pertentangan dari militer terhadap Kabinet Sjahrir ini juga bermuatan politik, terutama Sudarsono dan Sutarto yang mempunyai kepentingan untuk mempertahankan posisinya. Hal inilah yang menyebabkan mereka kemudian mendekati dan bergabung bersama pihak oposisi. Pertentangan ini semakin berkobar setelah penangkapan para pemimpin Persatuan Perjuangan pada bulan Maret oleh pemerintah.

Meskipun para pemimpin Persatuan Perjuangan dapat ditangkap dan ditahan, namun hal ini tidak membuat oposisi benar-benar dapat dibungkam. Para pendukung Persatuan Perjuangan memberikan reaksi keras terhadap penangkapan tersebut, apalagi mereka mengetahui perkembangan diplomasi yang menurut mereka sangat mengecewakan. Pada perayaan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad saw tanggal 25 Juni 1946 di Alun-alun Utara Yogyakarta, Wakil Presiden Mohammad Hatta menyampaikan pidatonya dihadapan rakyat banyak yang juga dihadiri oleh

²⁷ A.H. Nasution, *op. cit.*, hlm 127-129.

²⁸ *Ibid.*, hlm 131.

Presiden Soekarno dan pimpinan politik lainnya. Dalam pidatonya ini, Hatta menyampaikan hasil perundingan yang dilakukan Sjahrir dengan Belanda, serta menyatakan dukungannya kepada Sjahrir. Bagi mereka hal ini merupakan tindakan yang merugikan Indonesia, dan seolah-olah tidak mempertimbangkan perjuangan dan pengorbanan rakyat.²⁹

Setelah mendengar pidato Hatta, sejumlah tokoh yang berseberangan dengan pemerintah mengadakan pertemuan di rumah Penasihat Panglima Divisi III Budhyarto Martoatmojo di Baciro, Yogyakarta. Pertemuan ini diadakan untuk membahas isi pidato Hatta, tokoh-tokoh yang hadir ialah Buntaran, Sutarjo, Chaerul Saleh, Iwa Kusuma Sumantri, Sayuti Melik, Jenderal Marjohan, Jenderal Sudarsono, dan Mayor A.K. Yusuf.³⁰ Setelah rapat selesai di rumah Jenderal Sudarsono, A.K.Yusuf menyatakan kekesalannya terhadap Sjahrir dan berencana untuk menyingkirkan Sjahrir. Jenderal Sudarsono menyetujui gagasan Yusuf dan kemudian menandatangani surat perintah atas penahanan Sjahrir, Dokter Sudarsono dan Abdul Majid.³¹

Pada tanggal 25 Juni 1946, Sjahrir beserta rombongan sedang berada di Surakarta. Mereka sedang berada dalam perjalanan menuju Yogyakarta untuk menghadiri sidang kabinet lengkap bersama presiden dan wakil presiden. Di Surakarta, rombongan Sjahrir menginap di bekas kediaman kepala *Javaasche Bank* di kawasan Gladag, dengan pengawasan dari Polisi Militer. Melihat kesempatan ini, Mayor A.K.Yusuf segera menghubungi Panglima Divisi IV,

²⁹ Rudolf Mrazek, *Sjahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1996, hlm 563.

³⁰ Iwa Kusuma Sumantri, *Sedjarah Revolusi Indonesia, Jilid II: Masa Revolusi Bersendjata*, tanpa tahun dan penerbit.

³¹ G. Moedjanto, *op.cit*, hlm 172.

Kolonel Sutarto. Kepada Kolonel Sutarto, ia menjelaskan perintah penangkapan Sjahrir dkk yang diberikan kepadanya, kemudian mereka sepakat untuk bekerjasama.³²

Kolonel Sutarto kemudian memerintahkan untuk melakukan pemutusan hubungan telepon keluar Surakarta, memeriksa semua kendaraan yang masuk dan keluar Surakarta, dan agar Polisi Militer memberi kebebasan kepada Yusuf di berbagai pos penjagaan. Selanjutnya pengawal-pengawal *Javaasche Bank* ditarik mundur secara diam-diam. Pada pukul 23.15, Yusuf memerintahkan Sjahrir dan rombongan untuk mengikutinya dengan acungan senjata, kemudian dibawa ke Paras.³³ Mereka ditempatkan di bungalow Sunan di bawah penjagaan komandan batalyon setempat, yaitu Mayor Sukarto.³⁴

Berita penculikan Sjahrir dan rombongan segera terdengar oleh Presiden Soekarno yang berkedudukan di Yogyakarta. Pada tanggal 29 Juni 1946, ia menyatakan bahwa negara dalam keadaan darurat dan untuk sementara pemerintahan diambil alih oleh Presiden. Kabinet bersidang di bawah pimpinan Presiden dan menyelenggarakan berbagai usaha untuk mencari Sjahrir dkk. Presiden juga mengirim pesan ke Jakarta, meminta agar dilakukan penghentian tembak-menembak agar Belanda tidak menggunakan situasi krisis itu untuk melakukan serangan.³⁵

Keesokkan harinya, Panglima Besar Sudirman datang untuk menghadiri pertemuan pemimpin-pemimpin tinggi pemerintahan. Dalam pertemuan tersebut,

³² A.H. Nasution, *op.cit*, hlm 329

³³ Paras merupakan sebuah desa yang terletak di lereng Merbabu, berjarak kira-kira 35 km di sebelah barat Surakarta.

³⁴ G. Moedjanto, *op.cit*, hlm 172-173.

³⁵ *Ibid*, hlm 173.

Soekarno, Hatta, dan Amir beranggapan bahwa Jenderal Sudirman mengetahui dimana Sjahrir dan rombongannya ditahan. Mereka mendesak agar Sudirman melakukan sesuatu untuk membantu pembebasan Sjahrir dkk, namun ia menolaknya. Kemudian Sudirman pergi ke Surakarta dan mengirim perintah pribadi kepada Sudarsono agar melapor kepadanya. Dalam pertemuan dengan Jenderal Sudarsono ini, ia meminta agar tahanan dibebaskan.³⁶

Menghadapi situasi ini, pada malam hari tanggal 30 Juni Persiden Soekarno menyampaikan pidato di radio. Ia meminta agar pihak oposisi segera membebaskan Sjahrir. Menurutnya pihak oposisi tidak dapat membedakan antara oposisi dan destruksi, negara memang memerlukan oposisi tetapi harus mengetahui batas-batasnya. Penculikan perdana menteri dan pejabat-pejabat tinggi lainnya, akan memberi alasan kepada Belanda untuk mengatakan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia tidak dapat memegang pemerintahan sendiri dan terjadi kekacauan dimana-mana. Pidato Soekarno yang mencela tindakan penculikan tersebut memberikan hasil yang baik, Sjahrir dan rombongan dibebaskan.³⁷

Pemerintah segera menindaklanjuti para pelaku penculikan Sjahrir, langkah pertama ialah menarik Umar Joy, Kepala Staf Divisi II pilihan Sudarsono untuk ditempatkan sebagai wakil militer dari Sultan Yogyakarta dalam Dewan Pertahanan DIY. Selanjutnya tokoh-tokoh politik yang dekat dengan Sudarsono ditangkap, antara lain Buntaran, Budyarto, Chaerul Saleh, Moh. Saleh, Sayuti

³⁶ *Ibid*, hlm 174.

³⁷ *Ibid*, hlm 174.

Melik, Adam Malik, Subarjo, Ibnu Parna, Pandu Kartawiguna, dan Sumantoro.³⁸ Untuk membersihkan nama militer, Jenderal Sudirman memberi pernyataan bahwa yang anggota militer yang terlibat kasus penculikan terlepas dari perintah Markas Besar dan setelah itu ia berbalik mendukung pemerintah. Setelah masalah penculikan selesai, Presiden Soekarno kembali menunjuk Sjahrir untuk membentuk kabinetnya yang ketiga dan melanjutkan diplomasi.

C. Masalah Persetujuan Linggarjati

1) Penolakan KNIP Terhadap Persetujuan Linggarjati

Perundingan Linggarjati yang dilakukan Sjahrir dengan pihak Belanda, menghasilkan persetujuan di kedua belah pihak. Namun, tercapainya persetujuan tersebut belum berarti bahwa persetujuan dapat langsung dilaksanakan. Persetujuan itu baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapat ratifikasi dari parlemen masing-masing. Proses ratifikasi menyita waktu sekitar satu setengah bulan, karena muncul pro dan kontra dalam KNIP dan pandangan masyarakat Indonesia. KNIP tidak dapat begitu saja menerima persetujuan yang telah dicapai oleh Sjahrir, karena dianggap terlalu menguntungkan Belanda dan tidak sesuai dengan tuntutan perjuangan bangsa Indonesia yang menghendaki kemerdekaan 100%. Partai yang menentang persetujuan ialah Masyumi, PNI, dan pengikut Tan Malaka (Persatuan Perjuangan).³⁹

Golongan oposisi yang menentang naskah Persetujuan Linggarjati, kemudian membentuk koalisi kekuatan politik dengan nama Benteng Republik

³⁸ M. Yuanda Zara, *op.cit*, hlm 190.

³⁹ George McTurnan Kahin, *op.cit*, hlm 250.

Indonesia (BRI). Anggotanya terdiri dari partai-partai politik dan organisasi bersenjata seperti PNI, Masyumi, Partai Wanita Rakyat, Angkatan Komunis Muda (AKOMA), Partai Rakyat, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI), Laskar Rakyat Jawa Barat, Barisan Banteng, dan Kebaktian Rakyat Sulawesi (KRIS).⁴⁰

Sebaliknya, pendukung naskah Persetujuan Linggarjati berhasil menghimpun kekuatan yang tergabung dalam fraksi “Sayap Kiri”. Anggotanya terdiri atas Partai Sosialis Indonesia (PSI), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Partai Buruh Indonesia (PBI), dan organisasi politik lokal lainnya seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Partai Tani, Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik Indonesia.⁴¹

Perwakilan dari partai-partai penentang Persetujuan Linggarjati dalam KNIP mempunyai jumlah yang lebih besar, mungkin sekali persetujuan itu tidak mendapat dukungan dari KNIP. Oleh karena itu, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta terpaksa turun tangan untuk menyelesaikan masalah. Agar ketentuan-ketentuan Persetujuan Linggarjati dapat diterima oleh KNIP, maka perlu diadakan perubahan susunan keanggotaannya sehingga golongan yang pro akan menjadi lebih banyak dan dengan demikian Persetujuan Linggarjati dapat diratifikasi.⁴²

Pada tanggal 29 Desember 1946, Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6 tentang perubahan keanggotaan KNIP dari 200 menjadi

⁴⁰ Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi RI, *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa Periode 1945-1950*, Jakarta, Departemen Luar Negeri, 2004, hlm 539-540.

⁴¹ *Ibid*, hlm 540.

⁴² G. Moedjanto, *op.cit*, hlm 183.

514 orang. Hal ini menimbulkan perdebatan sengit dalam sidang KNIP, Masyumi dan PNI menganggap Peraturan Presiden tersebut akan menguntungkan pihak tertentu. Ketika partai-partai penentang Linggarjati memprotes ketetapan tersebut, Wakil Presiden Mohammad Hatta berbicara di muka sidang dan menyatakan apabila Peraturan Presiden tersebut ditolak maka dipersilakan untuk anggota KNIP memilih presiden dan wakil presiden yang lain. Menurutnya, Presiden berhak menunjuk anggota KNIP karena Undang-undang pemilihan anggota KNIP belum ada. Karena ancaman ini, maka partai-partai yang menentang Persetujuan Linggarjati terpaksa mengalah karena tidak ada pemimpin lain yang lebih baik daripada Soekarno-Hatta.⁴³

Dalam sidang tanggal 28 Februari 1947, anggota baru KNIP dilantik. Mereka memberikan dukungan kepada kebijakan pemerintah dalam rangka meratifikasi naskah Persetujuan Linggarjati. Sidang KNIP ditutup dengan memberikan kepercayaan kepada Kabinet Sjahrir untuk melanjutkan perundingan dengan Belanda. Dengan demikian Sjahrir mendapat kuasa untuk menandatangani naskah Persetujuan Linggarjati.⁴⁴

2) Sikap Belanda Terhadap Persetujuan Linggarjati

Di pihak Belanda, proses ratifikasi naskah Persetujuan Linggarjati oleh parlemennya juga mengalami kesulitan. Suara pro dan kontra saling bertentangan sehingga pemerintah Belanda mengambil kebijakan untuk memberikan tafsiran-tafsiran sendiri terhadap Persetujuan Linggarjati. Kebijakan ini diambil oleh Pemerintah Belanda agar dapat melunakkan suara kontra dari pihak oposisi.

⁴³ Panitia Penulisan Sejarah Diplomas RI, *op.cit*, hlm 541-542.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 543.

Parlemen Belanda memberikan persetujuannya setelah berhasil diyakini bahwa persetujuan itu bersifat sementara, jadi akan diadakan pengaturan yang lebih lanjut menyangkut hubungan Belanda-Indonesia. Ini merupakan hasil maksimum yang dapat dicapai pada waktu itu, hal ini disebabkan karena golongan konservatif yang takut kehilangan Indonesia lebih kuat kedudukannya dalam parlemen Belanda.⁴⁵

Persetujuan Linggarjati memiliki banyak ketidakjelasan, sehingga terjadi penafsiran yang berbeda antara pihak Indonesia dan Belanda. Misalnya dalam hal status RI dalam hukum dan hubungan internasional. Belanda mengecam tindakan Indonesia yang melakukan hubungan luar negeri dengan India dan negara-negara Timur Tengah. Pihak RI juga mengeluh atas aksi-aksi separatisme Belanda, misalnya dalam pemberian bantuan Belanda kepada Partai Rakyat Pasundan yang memelopori berdirinya Negara Pasundan. Selain itu Belanda juga terus memperkuat tentaranya, padahal dalam perjanjian tentaranya harus dikurangi dan segera ditarik dari daerah RI. Dalam hal ini berarti Belanda telah melakukan pelanggaran terhadap Persetujuan Linggarjati.⁴⁶

Akibat ketidakjelasan dalam Persetujuan Linggarjati tersebut, maka pelaksanaannya juga mengalami kemacetan. Pada tanggal 27 Mei 1947 Komisi Jenderal yang dipimpin oleh Schermerhon, menyampaikan usul kepada RI dengan isi pokok sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁵ G. Moedjanto, *op.cit*, hlm 182

⁴⁶ *Ibid*, hlm 185.

⁴⁷ Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi RI, *op.cit*, hlm 541-542

- a) Pembentukan Pemerintah Federal Sementara yang terdiri atas wakil-wakil negara bagian dan Kerajaan Belanda, di bawah pimpinan Wakil Tinggi Mahkota yang mempunyai hak memutuskan apabila terjadi perselisihan antara wakil-wakil negara bagian. Pembentukan Dewan Urusan Luar Negeri yang terdiri dari: dua wakil RI, seorang masing-masing dari wakil negara bagian Kalimantan dan NIT.
- b) Guna menjamin keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia, termasuk daerah kekuasaan Republik Indonesia, perlu dibentuk Jawatan Kepolisian Bersama.

Pada tanggal 8 Juni 1947, Sjahrir memberikan usul balasan kepada Belanda, dengan disertai usul-usul sebagai berikut.⁴⁸

- a) RI setuju dengan pembentukan Pemerintah Federal sementara, yang berkewajiban menyiapkan pembentukan konstituante dan penyerahan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Federal selama masa peralihan. Kedudukan dan kekuasaan de facto yang telah diterima pemerintah RI tetap tidak berubah dan masih seperti yang diterima dari Pemerintah Belanda sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Linggarjati.
- b) Menolak pembentukan Jawatan Kepolisian Bersama dengan alasan bahwa wilayah RI merupakan tanggungjawab RI sendiri.
- c) Persoalan umum mengenai pelaksanaan Persetujuan Linggarjati diurus oleh kedua belah pihak, dengan harapan agar pelaksanaan persetujuan tidak ditafsirkan secara pasal demi pasal.

⁴⁸ *Ibid*, hlm 559

Komisi Jenderal menolak usul balasan Sjahrir, karena dianggap terlalu keras. Untuk menghindari kemacetan, kemudian Sjahrir memperlunak usulannya yang disampaikan pada tanggal 20 Juni 1947. Isi pokok dari usulan tersebut ialah:⁴⁹

- a) RI menerima usul tentang pembentukan Pemerintahan Federal Sementara dan Dewan Urusan Luar Negeri.
- b) RI mengakui kekuasaan *de jure* dan kekuasaan istimewa Wakil Tinggi Mahkota.
- c) Menekankan bahwa RI berhak mempertahankan ketertiban dan keamanan di wilayahnya sendiri.

Pihak Belanda tidak puas dengan usul balasan Sjahrir tertanggal 20 Juni 1947 tersebut. Pada tanggal 23 Juni, pihak Belanda mengirimkan nota penegasan yang mendesak RI supaya menerima usulan Belanda tertanggal 27 Mei 1947. Sjahrir belum sempat menjawab nota penegasan tersebut, karena kabinetnya jatuh untuk yang ketiga kalinya.

3) Mundurnya Sjahrir sebagai Perdana Menteri

Konsesi-konsesi yang dibuat oleh Sjahrir untuk menyelesaikan masalah Persetujuan Linggarjati telah mengurangi dukungan politik terhadapnya. Sebelum membuat usul balasan kepada Belanda pada tanggal 20 Juni 1947 ia masih mendapat dukungan dari anggota kabinetnya, diantaranya Gani, Natsir, Abdul Majid dan Amir Sjariffudin. Sjahrir mengutus Abdul Majid dan Setiadjit untuk memberikan penjelasan kepada partai-partai di Yogyakarta yang menuduhnya

⁴⁹ G. Moedjanto, *op.cit*, hlm 187.

telah bertindak terlalu jauh dalam menghadapi Belanda. Akan tetapi, penjelasan yang diberikan oleh keduanya di Yogyakarta berbeda dengan tujuan awal, di depan kabinet dan rapat golongan Sayap Kiri keduanya berbalik menentang konsesi-konsesi itu dan menyerang Sjahrir karena tindakannya. Keesokan harinya Amir Sjariffudin tiba di Yogyakarta, ia juga ikut menyerang Sjahrir dan konsesi-konsesinya karena melihat beberapa pemimpin tinggi Sayap Kiri termasuk Tan Ling Djie dan Wikana telah memihak Abdul Majid.⁵⁰

Ketika Sjahrir tiba di Yogyakarta dan langsung menghadiri rapat dengan para pemimpin Sayap Kiri, ia diserang keras oleh Tan Ling Djie, Abdul Madjid dan Amir Sjarifuddin. Hal ini menunjukkan bahwa adanya gejala perpecahan dalam tubuh Partai Sosialis. Wakil-wakil Sayap Kiri menunjukkan ketidakpercayaan kepada Sjahrir dan menyatakan bergabung bersama oposisi yang dipimpin oleh PNI. Dalam kondisi yang semakin terjepit, akhirnya Sjahrir mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Soekarno pada tanggal 27 Juni 1947.⁵¹

Setelah Sjahrir mengajukan pengunduran dirinya, para pemimpin Sayap Kiri mengubah kedudukan dan menyetujui kembali konsesi-konsesi yang dibuat oleh Sjahrir. Mereka juga menginginkan agar Sjahrir memegang kembali jabatannya sebagai perdana menteri. Presiden Soekarno juga mendesaknya agar menerima usulan tersebut, namun Sjahrir menolak untuk menduduki jabatannya kembali. Penolakannya tersebut berlandaskan atas keyakinannya terhadap sikap Belanda yang tidak menentu dan perundingan-perundingan lebih lanjut tidak mungkin

⁵⁰ Hamid Algadri, *Suka-duka Masa Revolusi*, Jakarta, UI Press, 1991, hlm 11.

⁵¹ *Idem*.

dilakukan. Selanjutnya Presiden Soekarno menyatakan pengambilalihan kekuasaan pemerintahan. Akan tetapi, keesokan harinya Badan Pekerja meratifikasi ketetapan tersebut dan meminta agar Kabinet Sjahrir tetap bekerja sampai terbentuknya kabinet baru.⁵²



⁵² George McTurnan Kahin, *op.cit*, hlm 262.

BAB V

KESIMPULAN

Sutan Sjahrir berasal dari keluarga Minangkabau yang cukup terpandang dan disegani oleh warga pribumi serta pegawai-pegawai pemerintah Hindia Belanda di Koto Gedang, Sumatera Barat. Kakek dan ayahnya merupakan jaksa yang bekerja bagi pemerintah Hindia Belanda. Dalam tubuh Sutan Sjahrir juga mengalir darah bangsawan Mandailing Natal, Ibunya merupakan keturunan langsung dari Tuanku Besar Sintan dari Natal. Sejak kecil Sjahrir telah menikmati kemapanan ekonomi dan kehidupan keluarga yang modern.

Sutan Sjahrir memperoleh pendidikan yang modern dan bergengsi, ia melewati pendidikan dasarnya di ELS (*Europeesche Lagere School*), kemudian melanjutkan ke MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*), dan AMS (*Algemeene Middelbare School*) di Bandung. Sekolah-sekolah ini merupakan sekolahan yang berorientasi pada pendidikan barat dan bergengsi di Hindia Belanda. Sebagai seorang anak yang berasal dari keluarga mampu dan terpandang, Sjahrir dapat menikmati pendidikan modern di sekolah-sekolah tersebut. Setamat dari AMS Sjahrir melanjutkan studi ke Fakultas Hukum, Universitas Amsterdam di negeri Belanda. Pada saat duduk di bangku kuliah ini Sjahrir mulai mengenal sosialisme, untuk lebih mendalaminya ia membaca banyak buku-buku tentang sosialisme. Ia juga melibatkan diri dalam Perkumpulan Mahasiswa Sosial Demokrat Amsterdam (*Amsterdamsche Sociaal Democratische Studenten Club*) dan bekerja pada Sekretariat Federasi Buruh Internasional.

Sjahrir mulai terlibat dalam kegiatan politik dengan mengaktifkan diri dalam Perhimpunan Indonesia (PI) yang pada saat itu dipimpin oleh Hatta. Kegiatan politik Sjahrir semakin menonjol ketika ia bersama Hatta mendirikan PNI-Baru (Pendidikan Nasional Indonesia). Partai ini lebih mengutamakan pendidikan kader dan memberikan propaganda kepada rakyat melalui tulisan. Kegiatan politik yang dilakukan oleh PNI-Baru dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, sehingga para pemimpinnya ditangkap. Sjahrir ditangkap dan dipenjarakan di Cipinang selama beberapa bulan, kemudian diasingkan ke Boven Digoel, selanjutnya dipindahkan ke Banda Neira, dan Sukabumi.

Pada zaman pendudukan Jepang, Sjahrir membangun gerakan bawah tanah anti-fasis dengan melakukan berbagai kegiatan yang beresiko tinggi. Sikap dan pendirian yang ditunjukkan Sjahrir pada zaman pendudukan Jepang ini, secara tidak langsung memberikan efek politis praktis. Kehadirannya dalam pemerintahan nanti akan mampu melepaskan Indonesia dari tuduhan Belanda dan sekutu sebagai negara buatan Jepang, karena ia bebas dari cap kolaborator seperti yang dituduhkan pada Soekarno-Hatta.

Peran Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia ialah: 1) sebagai Ketua KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dari 16 Oktober hingga 28 November 1945; 2) sebagai Perdana Menteri, dari tanggal 14 November 1945 hingga 28 Februari 1946; 3) sebagai Perdana Menteri untuk yang kedua kalinya, dari tanggal 12 Maret hingga 27 Juni 1946; 4) sebagai Perdana Menteri untuk yang ketiga kalinya, dari tanggal 2 Oktober 1946 hingga 27 Juni 1947.

Peran pertama, Sutan Sjahrir sebagai Ketua KNIP; hal ini atas desakan pemuda karena mereka menganggap KNIP belum mencerminkan kehendak rakyat. Usaha Sjahrir sebagai Ketua KNIP ialah: mengubah status KNIP menjadi badan legislatif, mendirikan partai-partai politik, dan menulis buku Perjuangan Kita. Usaha-usaha ini ia dilakukan agar cap negara buatan Jepang seperti yang dituduhkan oleh sekutu dan Belanda dapat dilepaskan dari RI. Dengan berubahnya status KNIP menjadi badan legislatif serta adanya partai-partai politik, menunjukkan bahwa RI merupakan sebuah negara demokrasi dan dapat diterima oleh dunia internasional. Sedangkan munculnya buku Perjuangan Kita memberikan pengaruh positif terhadap pandangan sekutu dan Belanda, karena di dalamnya Sjahrir menyerang para kolaborator Jepang.

Peran kedua, Sutan Sjahrir diangkat sebagai perdana menteri setelah dikeluarkan Maklumat Pemerintah 14 November 1945 yang intinya terjadi perubahan sistem kabinet dari presidensial menjadi parlementer. Usaha Sjahrir sebagai perdana menteri antara lain mengadakan konsolidasi dengan pimpinan negara, yakni Soekarno-Hatta, baik secara administrasi maupun dukungan rakyat banyak. Selain itu ia juga bekerjasama dengan KNI-Daerah untuk mengatasi pergolakan-pergolakan di daerah. Dalam menghadapi Belanda dan sekutu, Sjahrir menjalankan politik diplomasi. Ia mengadakan perundingan-perundingan awal dengan Belanda, meskipun belum berhasil untuk menyelesaikan masalah RI dan Belanda.

Setelah Kabinet Sjahrir I jatuh, Sjahrir masih dipercaya untuk membentuk kabinet baru dan menjadi perdana menteri untuk yang kedua kalinya. Hal ini

terjadi setelah pihak oposisi yang menjatuhkannya tidak mampu menjalankan mandat yang diberikan oleh Presiden Soekarno untuk membentuk kabinet baru. Dalam Kabinet Sjahrir II ini, Sjahrir melanjutkan kembali perundingan-perundingan dengan Belanda, diantaranya ialah Perundingan Hoge Veluwe. Perundingan ini merupakan perundingan yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan perundingan-perundingan sebelumnya. Pada akhirnya perundingan ini tidak menghasilkan kesepakatan yang berarti, meskipun demikian perundingan ini merupakan dasar bagi perundingan selanjutnya.

Setelah Kabinet Sjahrir II jatuh, lagi-lagi Presiden Soekarno kembali menunjuk Sjahrir sebagai formatur kabinet dan perdana menteri untuk yang ketiga kalinya. Dalam Kabinet Sjahrir III diplomasi dilanjutkan dan Sjahrir mengadakan kembali perundingan yang sempat tertunda dengan Belanda. Sjahrir mengadakan Perundingan Linggarjati yang menghasilkan persetujuan antara RI dan Belanda dengan 17 pasal ketentuan. Isi yang paling penting dalam persetujuan ini ialah diakuiinya Indonesia secara *de facto* atas Jawa, Madura, dan Sumatera oleh Belanda, serta disetujuinya pembentukan NIS. Setelah Belanda memberikan pengakuan kekuasaan *de facto* RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera, negara-negara lain kemudian mengikutinya. Pengakuan tersebut datang dari Inggris, AS, Mesir, Libanon, Suria, Afganistan, Burma, Saudi Arabia, Yaman, Rusia, serta India dan Pakistan yang pada waktu itu belum resmi memperoleh kedaulatan dari Inggris.

Sjahrir tetap mendapat kepercayaan dari Presiden Soekarno untuk memimpin kabinet selama tiga kali berturut-turut, meskipun dalam waktu yang

relatif singkat. Hal ini disebabkan karena Soekarno merasa sejalan dengan garis politik yang dijalankan oleh Sjahrir, yakni politik diplomasi. Ia dianggap sebagai orang yang tepat untuk melakukan perundingan dengan Belanda karena ia terlepas dari cap kolaborator. Soekarno sendiri mengalami kesulitan untuk berhubungan dengan Belanda, karena pihak Belanda tidak mengakuinya sebagai pemimpin dengan dalih sebagai kolaborator Jepang. Sementara itu, Soekarno menyadari pentingnya pengakuan terhadap RI dari negara-negara lain, maka kemunculan Sjahrir dalam pemerintahan merupakan hal yang sangat berarti bagi eksistensi RI.

Jabatan Sjahrir sebagai perdana menteri memberikan perubahan pandangan Belanda dan sekutu terhadap para pemimpin RI. Dengan latar belakang pendidikan barat, ideologi sosial-demokrat, dan pejuang anti-fasis, Sjahrir berhasil menarik simpati dari luar negeri terutama Belanda dan sekutu. Dengan kelebihan-kelebihannya tersebut, maka ia dapat menjalankan politik diplomasi untuk memperjuangkan pengakuan internasional terhadap RI. Meskipun Sjahrir berhasil menarik simpati luar negeri, namun di dalam negeri ia kurang memperoleh dukungan dari rakyat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan munculnya berbagai tantangan dari dalam negeri yang dihadapinya selama menjabat sbagai perdana menteri.

Tantangan pertama berasal dari pihak oposisi pimpinan Tan Malaka yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan. Organisasi ini menginginkan Indonesia merdeka 100%, dan lebih mengutamakan perlawanan fisik terhadap Belanda dan sekutu. Kehadiran Tan Malaka yang legendaris serta Minimum Programnya memiliki daya tarik tersendiri bagi orang-orang dan organisasi yang pada saat itu

kurang puas terhadap kinerja Sjahrir dan kabinetnya. Posisi Sjahrir dan kabinetnya semakin sulit, perundingan yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang gemilang, selain itu pemindahan ibukota ke Yogyakarta menimbulkan masalah sendiri. BPKNIP kemudian mengeluarkan resolusi yang menandakan ketidakpercayaan terhadap Kabinet Sjahrir. Sjahrir menyadari hal tersebut dan mengundurkan diri pada tanggal 23 Februari 1946. Dengan demikian usaha PP untuk menjatuhkan Kabinet Sjahrir berhasil.

Setelah Kabinet Sjahrir I jatuh, Sjahrir ditunjuk kembali sebagai perdana menteri. Pada waktu ini, kekuatan PP sudah berkurang karena banyak organisasi yang keluar. Program kerja Kabinet Sjahrir II dianggap cukup progresif dan tidak jauh berbeda dengan Minimum Program Persatuan Perjuangan. Pada bulan Maret terjadi penangkapan-penangkapan terhadap para pemimpin Persatuan Perjuangan, hal ini semakin memperlemah kekuatan dan kesatuan organisasi tersebut. Akhirnya anggota-anggota yang masih tersisa memutuskan untuk membubarkan Persatuan Perjuangan dan membentuk organisasi baru, yakni Konsentrasi Nasional. Namun organisasi ini tidak dapat bertahan lama karena tidak memiliki kekuatan seperti Persatuan Perjuangan dulu.

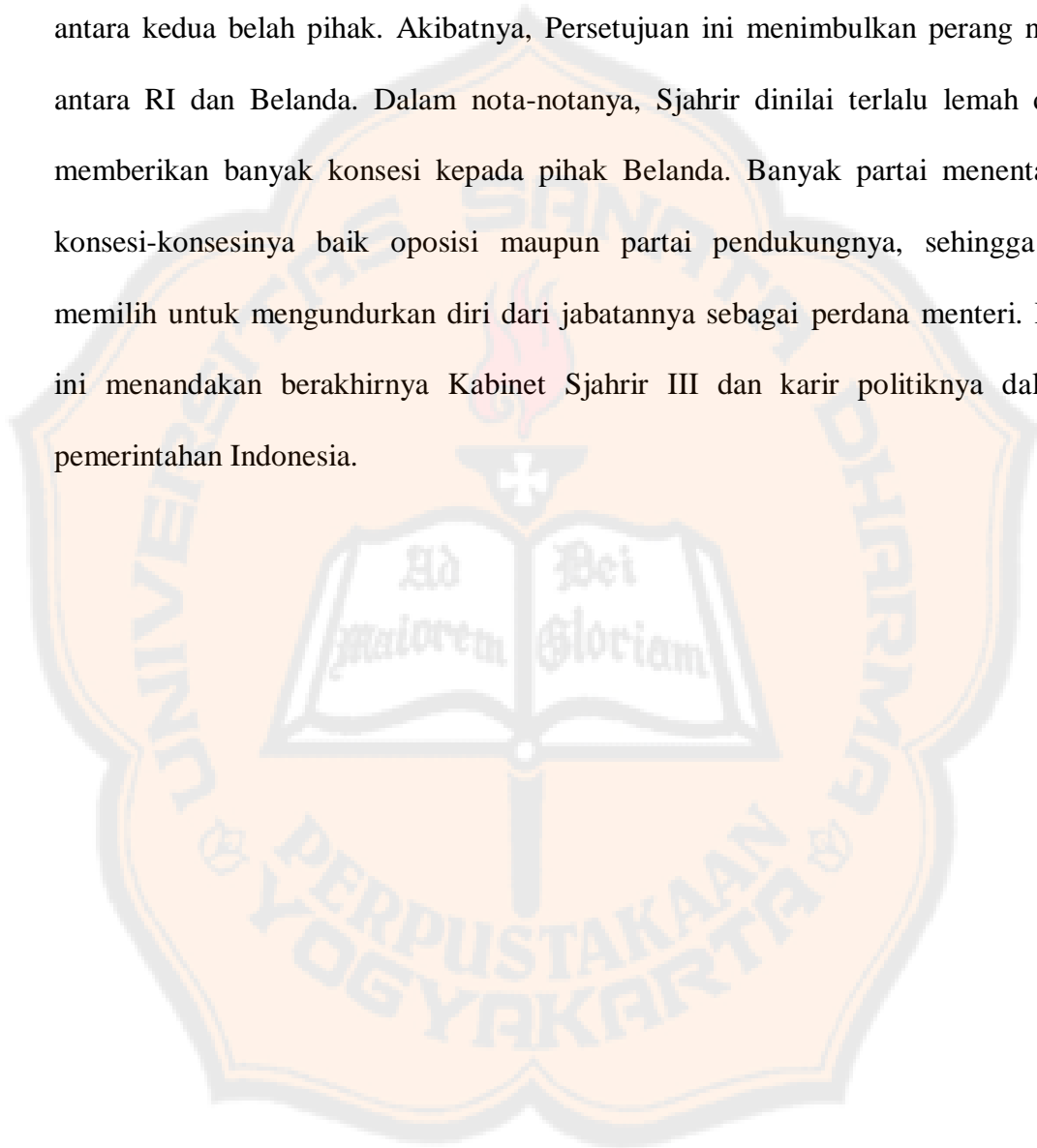
Tantangan kedua yang dihadapi Sjahrir ialah pertentangan dengan militer. Pertentangan pertama ialah dengan Jenderal Sudirman, ini berawal dari ketersinggungannya terhadap pernyataan Sjahrir dalam buku Perjuangan Kita mengenai kolaborator Jepang. Sudirman kemudian bergabung dalam Persatuan Perjuangan dan menyatakan pertentangannya terhadap kebijakan Sjahrir. Garis

politik Persatuan Perjuangan yang keras lebih menarik perhatiannya daripada diplomasi yang diperjuangkan oleh Sjahrir.

Pertentangan dengan anggota militer lainnya bermula dari pembagian jabatan dalam divisi-divisi oleh Kabinet Sjahrir. Masalah muncul karena Mayjen Sudarsono menolak pengangkatan Letkol Sarbini sebagai Kepala Stafnya, selain itu Kolonel Sutaro menolak kebijakan Menteri Pertahanan untuk mengangkat Mayjen Sudiro sebagai komandan Divisi IV. Penolakan tersebut berlatar belakang politis sebab keduanya ingin mempertahankan jabatan masing-masing. Hal ini menyebabkan mereka mendekati oposisi dan kemudian bergabung untuk menentang kebijakan Sjahrir. Puncak dari kekesalan pihak oposisi terhadap kebijakan Sjahrir ialah terjadinya penculikan Sjahrir dan rombongan di Solo pada tanggal 25 Juni 1946. Peristiwa ini melibatkan beberapa anggota militer, yaitu Mayor A.K. Yusuf, Jenderal Sudarsono, Kolonel Sutarto, dan Mayor Sukarto. Akibat dari peristiwa ini pemerintahan diambil alih oleh Presiden yang menandakan berakhirnya Kabinet Sjahrir II.

Tantangan ketiga yang dihadapi Sjahrir ialah masalah Persetujuan Linggarjati. Persetujuan Linggarjati yang sudah dibuatnya harus disetujui oleh KNIP. Namun proses ratifikasi memakan waktu cukup lama karena dalam tubuh KNIP terjadi perpecahan suara, ada yang pro dan kontra terhadap persetujuan tersebut. Pada akhirnya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah dan Persetujuan Linggarjati dapat disetujui setelah terjadi penambahan anggota KNIP.

Masalah Persetujuan Linggarjati juga muncul dari pihak Belanda yang mempunyai tafsiran sendiri terhadap persetujuan tersebut. Selain itu, Persetujuan Linggarjati juga memiliki banyak ketidakjelasan sehingga terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Akibatnya, Persetujuan ini menimbulkan perang nota antara RI dan Belanda. Dalam nota-notanya, Sjahrir dinilai terlalu lemah dan memberikan banyak konsesi kepada pihak Belanda. Banyak partai menentang konsesi-konsesinya baik oposisi maupun partai pendukungnya, sehingga ia memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perdana menteri. Hal ini menandakan berakhirnya Kabinet Sjahrir III dan karir politiknya dalam pemerintahan Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I.A.A.G. (1995). *Persetujuan Linggarjati Prolog dan Epilog*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara-Sebelas Maret University Press.
- Alamsjah, St. Rais. (1952). *10 Orang Indonesia Terbesar Sekarang*. Jakarta: Penerbit Mutiara.
- Algadri, Hamid. (1991). *Suka Duka Masa Revolusi*. Jakarta: UI Press.
- Anderson, Ben. (1988). *Revoloesi Pemuda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Anwar, Rosihan .(Ed). (1980). *Mengenang Sjahrir*. Jakarta: PT Gramedia.
- Bashri, Yanto & Suffatni, Retno. (ed). (2005). *Sejarah Tokoh Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa.
- Berchover, R. F. *A Behavioural Approach to Historical Analysis*. New York: A Free Press Paperback.
- Budiardjo, Miriam. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Colombijn, Freek. dkk. (Ed). (2005). *Kota Lama, Kota Baru Sejarah Kota-Kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan*. Jogjakarta: Penerbit Ombak.
- Dangun, Save. M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LPKN.
- Departemen Pendidikan. (1976). *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Penerangan. (1970). *Susunan dan Program Kabinet Republik Indonesia 1945-1970*. Jakarta: Penerbit Pradnja Paramita.
- Djaja, Tamar. (1980). *Rohana Kudus Srikandi Indonesia Riwayat dan Perjuangannya*, Jakarta: Mutiara.
- Gottchalk, Louis. (1969). *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI Pres.
- Handoyo, Cipto.B.H. (2003). *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Hardjososediro, Soejitno. (1987). *Dari Proklamasi ke Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hatta, Mohammad. (1978). *Memoir*, Jakarta: Tintamas.
- Heuken, A. dkk. (1973). *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Kahin, G. McTurnan. (1995). *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Yogyakarta: UNS Press-Pustaka Sinar Harapan.
- Kantaprawira, Rushadi. (1983). *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.

- Kartono, Kartini. (1983). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali.
- Kementerian Penerangan Republik Indonesia. (1954). *Lukisan Revolusi Indonesia 1945-1950*, Jakarta: Departemen Penerangan.
- Kohn, Hans. (1961). *Nasionalisme Arti dan Sedjarahnya*. Jakarta: PT. Pembangunan.
- Kuntowijoyo. (2001). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Kuper, Adam & Kuper, Jesicca. (2000). *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Legge, J.D. (1993). *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan Peranan Kelompok Sjahrir*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Loebis, Aboe. B. (1992). *Kilas Balik Revolusi Kenangan, Pelaku, dan Saksi*. Jakarta: UI Press.
- Malik, Adam. (1978). *Mengabdikan Republik Jilid II: Angkatan 45*. Jakarta: Gunung Agung.
- Mandaralam, Syahbudin. (1987). *Apa dan Siapa Sutan Syahrir*. Jakarta: PT. Rosda Jayaputra.
- Moedjanto, G. (1988). *Indonesia Abad ke-20 (I) Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggajati*. Jogjakarta: Kanisius.
- Moehamad, Djoeir. (1997). *Memoar Seorang Sosialis*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mrazek, Rudolf. (1996). *Sjahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mulia, T.G.S. (1990). *Ensiklopedi Indonesia*. Bandung: W. van Hoeve.
- Nasution, A.H. (1977). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid III: Diplomasi sambil Bertempur*. Bandung: DISJARA-AD & Angkasa.
- Natsir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi RI. (2004). *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa Periode 1945-1950*. Jakarta: Departemen Luar Negeri.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poesponegoro, M. D. & Notosusanto, Nugroho. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Raliby, Osman. (1953). *Documenta Historica Sejarah Dokumenter dari Pertumbuhan dan Perjuangan Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ricklefs, M.C. (2001). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.

- Ridwan, M. & Sophian, M. (1987). *Peristiwa-peristiwa Di Sekitar Proklamasi 17-8-1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Said, M. & Mansoer, D. (1953). *Mendidik Dari Zaman ke Zaman*. Jakarta: Pustaka Rakjat.
- Salam, Solichin. (1990). *Wajah Seorang Diplomat*. Jakarta: CISR.
- Salim, Chalid. (1977). *Limabelas tahun Digul Kamp Konsentrasi di New Guniea Tempat Persemaian Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sastrosatomo, Soebadio. (1987). *Perjuangan Revolusi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Setyohadi, Tuk. (2002). *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa*, Jakarta: Rajawali Corporation.
- Shafer, Boyd C. (1955). *Nationalism Myth and Reality*. New York: A Harvest Book Harcourt Brace & World Inc.
- Sjahrir, Sutan. (1990). *Renungan dan Perjuangan*. Jakarta: Djembatan.
- _____ (1995). *Perjuangan Kita*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Politik “Guntur 49”.
- Soekanto, Soerjono. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suhartono. (1994). *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi (1908-1945)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumantri, I. K. *Sedjarah Revolusi Indonesia, Jilid II: Masa Revolusi Bersendjata*. Tanpa tahun dan penerbit.
- Suwarno, Basuki. (1999). *Hubungan Indonesia-Belanda Periode 1945-1950*. Jakarta: PT. Setyo Acness.
- Tempo Edisi Khusus. *100 tahun Sjahrir* (Edisi 9-15 Maret 2009).
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. (1983). *Kamus Bahasa Indonesia Jilid II*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tobing, K.M.L. (1986). *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Linggarjati*. Jakarta: Gunung Agung.
- Tirtoprodjo, Susanto. (1962). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Pembangunan.
- _____. (1962). *Sejarah Revolusi Nasional Indonesia*. Jakarta: PT. Pembangunan.
- Zara, M. Yuanda. (2009). *Peristiwa 3 Juli 1946*. Yogyakarta: MedPress (Anggota IKAPI).

Lampiran 1

SUTAN SJAHRIR



Sumber: <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/03/09/KL/mbm.20090309.KL129719.id.html>.

Lampiran 2**MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN No. X**

KOMITE NASIONAL PUSAT. Pemberian kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Pusat dan untuk ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Sesudah mendengar pembicaraan dari Komite Nasional Pusat tentang usul supaya sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dibentuk kekuasaannya yang hingga sekarang dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional menurut pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-undang Dasar, hendaknya dikerjakan oleh Komite Nasional Pusat dan supaya pekerjaan Komite Nasional Pusat itu sehari-harinya berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan bernama Dewan Pekerja yang bertanggungjawab kepada Komite Nasional Pusat.

Menimbang bahwa di dalam keadaan yang genting ini perlu ada Badan yang ikut bertanggungjawab tentang nasib bangsa Indonesia, di sebelah Pemerintah;

Menimbang selanjutnya bahwa usul tadi berdasarkan paham kedaulatan rakyat;

M e m u t u s k a n :

Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggungjawab kepada Komite Nasional Pusat.

Jakarta, 16 Oktober 1945

Wakil Presiden Republik Indonesia,
MOHAMMAD HATTA

Sumber: Osman Raliby, *Documenta Historica Sejarah Dokumenter dari Pertumbuhan dan Perjuangan Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1953, hlm 511.

Lampiran 3

MAKLUMAT PEMERINTAH

PARTAI POLITIK. Anjuran Pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik

Berhubung dengan usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat kepada Pemerintah, supaya diberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi, bahwa partai-partai politik itu hendaknya memperkuat perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannya yang telah diambil beberapa waktu yang lalu bahwa:

1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin kejalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.
2. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun, sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.

Jakarta, 3 November 1945.

Wakil Presiden,
MOHAMMAD HATTA

Sumber: *Ibid*, hlm 529.

Lampiran 4**MAKLUMAT PEMERINTAH**

Oleh karena kementerian pertama dari Republik Indonesia dibentuk buat sementara waktu tatkala saat yang penting dalam sejarah Negara, maka sudah semestinya, bahwa bagian-bagian pemerintah tadi menunjukkan tanda-tanda tergesa-gesa. Pembaharuan dari kabinet memang telah lama dirasakan perlunya, akan tetapi berhubung dengan beberapa keadaan, maka terpaksa ditunda sampai ada kesempatan yang baik.

Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang hebat dengan selamat dari tingkatan pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tatausaha negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan susunan kabinet baru itu ialah, bahwa tanggungjawab adalah didalam tangan Menteri.

Tindakan-tindakan demokratis yang lain segera harus dijalankan ialah Pemilihan Umum, supaya wakil-wakil rakyat yang terpilih dengan merdeka dapat mengambil bagian yang tepat dalam menjalankan politik pemerintah dan menentukan haluan negara. Dengan kesempurnaan dari Pemilihan Umum ini, maka habislah dengan sendirinya pekerjaan Badan Pekerja sekarang, yang baru-baru ini disusun, yang buat sementara waktu menjalankan pekerjaan Majelis Perwakilan Rakyat dan Dewan Pembentuk Undang-undang.

Untuk mendorong dan memajukan tumbuhnya pikiran-pikiran politik, maka Pemerintah Republik Indonesia menganjurkan kepada rakyat untuk mendirikan partai-partai guna mewakili segala pikiran politik dalam negara. Bibit-bibit dari beberapa partai itu sudah timbul sebelum penjajahan Jepang, akan tetapi terpaksa tidak menampakkan diri dalam zaman pemerintah Jepang disini.

Baik Jepang maupun Belanda bertindak keras terhadap komunis dan partai-partai politik yang menghendaki kemerdekaan sesempurna-sempurnanya.

Republik Indonesia tidak akan melarang organisasi politik selama dasar-dasarnya atau aksinya tidak melanggar azaz-azaz demokrasi yang sah.

Jakarta, 14 November 1945,

Komite Nasional Pusat
Sutan Sjahrir

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SUPLEMEN



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN

Mata Pelajaran : SEJARAH

Satuan Pendidikan : SMA

Kelas : XII

Semester : I

Standar Kompetensi : Kemampuan menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru

Kompetensi Dasar	Indikator	Pengalaman Belajar	Materi Pokok	Penilaian			Waktu	Sumber/ Bahan/ Alat
				Jenis Tagihan	Bentuk Instrumen	Contoh Instrumen		
1. Kemampuan menganalisis perkembangan ekonomi-keuangan dan politik pada masa awal kemerdekaan sampai tahun 1950	1.1 Mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang kehidupan Sutan Sjahrir. 1.2 Mendeskripsikan dan menganalisis peranan Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia tahun 1945-1947. 1.3 Mendeskripsikan dan menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia.	1.1 Menjelaskan latar belakang kehidupan Sutan Sjahrir. 1.2 Mengidentifikasi peranan Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia tahun 1945-1947. 1.3 Mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia. 1.4 Merefleksikan nilai-nilai yang dapat diperoleh dengan mempelajari peranan Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia.	1. Latar belakang sosial-budaya, dan politik Sutan Sjahrir. 2. Situasi politik Indonesia pasca kemerdekaan. 3. Peranan Sutan Sjahrir dalam pemerintahan. 4. Tantangan-tantangan yang dihadapi Sutan Sjahrir. 5. Nilai-nilai universal kepemimpinan Sutan Sjahrir.	a. Tugas individu b. Tugas kelompok c. Presentasi d. Ulangan harian e. UTS dan UAS f. Fortopolio	a. Laporan diskusi b. LKS, Kuis c. Tes uraian, PG, dan Gambar d. Uraian refleksi	2 jp	a. Sumber : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sutan Sjahrir, <i>Renungan dan Perjuangan</i>, Jakarta, Djambatan, 1990. ▪ Rudolf Mrazek, <i>Sjahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia</i>, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1996. ▪ Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, <i>Sejarah Nasional Indonesia VI</i>, Jakarta, Balai Pustaka, Edisi 	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

									<p>ke-4, 1993.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ George McTurnan Kahin, <i>Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia</i>, Yogyakarta, UNS Press-Pustaka Sinar Harapan, 1995. <p>b Alat : Gambar, Papan tulis/ white board, bagan, LKS, soal</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Yogyakarta,2010

Guru Bidang Studi

(Bernarda Prihartanti)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran	: SEJARAH
Kelas / Semester	: XII/ I
Materi Pokok	: Peranan Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia tahun 1945-1947
Pertemuan	: 1
Waktu	: 2 x 45 menit

1. Standar Kompetensi

Kemampuan menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru

2. Kompetensi Dasar

Menganalisis perkembangan ekonomi-keuangan dan politik pada masa awal kemerdekaan sampai tahun 1950.

3. Indikator

- 1) Mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang kehidupan Sutan Sjahrir
- 2) Mendeskripsikan dan menganalisis peranan Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia tahun 1945-1947
- 3) Mendeskripsikan dan menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia

4. Tujuan Pembelajaran

- 1) Siswa mampu menjelaskan latar belakang kehidupan sosial-budaya Sutan Sjahrir.
- 2) Siswa mampu menjelaskan latar belakang kehidupan politik Sutan Sjahrir.
- 3) Siswa mampu mendeskripsikan situasi politik di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan.
- 4) Siswa mampu mengidentifikasi peranan Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia tahun 1945-1947.
- 5) Siswa mampu mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Sutan Sjahrir.
- 6) Siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai universal yang dapat diperoleh setelah mempelajari materi mengenai peranan Sutan Sjahrir dalam Pemerintahan Indonesia.

5. Materi Pembelajaran

- 1) Latar belakang sosial-budaya, dan politik Sutan Sjahrir.
- 2) Situasi politik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan.

- 3) Peranan Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia tahun 1945-1947.
- 4) Tantangan-tantangan yang dihadapi Sutan Sjahrir.
- 5) Nilai-nilai kepemimpinan Sutan Sjahrir.

6. Kegiatan Pembelajaran

a. Pendahuluan

- Motivasi: Siswa mampu mengidentifikasi peranan Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia tahun 1945-1947.
- Prasyarat : Siswa telah mempelajari materi mengenai peristiwa seputar proklamasi 17 Agustus 1945
- Apersepsi: Guru memberi gambaran tentang peranan Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia tahun 1945-1947 melalui tanya jawab

b. Kegiatan Inti

- Guru membagi siswa dalam 5 kelompok
- Satu kelompok terdiri dari 5-6 orang yang mendapat materi berbeda
 - Kelompok 1 : Latar belakang kehidupan sosial-budaya Sutan Sjahrir
 - Kelompok 2 : Latar belakang kehidupan politik Sutan Sjahrir
 - Kelompok 3 : Situasi politik di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan
 - Kelompok 4 : Peranan Sutan Sjahrir dala pemerintahan Indonesia
 - Kelompok 5 : tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Sutan Sjahrir
- Siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi bersama teman kelompoknya.
- Salah satu dari siswa dari setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas
- Siswa yang lain mendengarkan serta memberi tanggapan.
- Guru memberi penguatan terhadap hasil presentasi siswa.

c. Penutup

- Guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah diberikan kepada siswa dengan melakukan tanya jawab
- Siswa diberi kesempatan untuk menulis hasil kesimpulan.
- Refleksi untuk menemukan nilai-nilai perjuangan, persamaan, demokratis, tanggung jawab, dan cinta tanah air yang diperoleh setelah mempelajari materi mengenai peranan Sutan Sjahrir dalam Pemerintahan Indonesia.

- Tindak lanjut : Siswa ditugaskan untuk membuat karangan minimal 3 halaman dengan tema ”Strategi Sutan Sjahrir dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia”.

7. Media Pembelajaran

Buku paket, kertas soal.

8. Penilaian

a. Penilaian produk

Jenis tagihan : Tes

Contoh tes :

- 1) Jelaskan latar belakang kehidupan sosial-budaya Sutan Sjahrir!
- 2) Jelaskan latar belakang kehidupan politik Sutan Sjahrir!
- 3) Deskripsikan situasi politik di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan!
- 4) Identifikasikanlah peranan Sutan Sjahrir dalam pemerintahan Indonesia tahun 1945-1947!
- 5) Identifikasikanlah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Sutan Sjahrir!
- 6) Identifikasikanlah nilai-nilai universal yang dapat diperoleh setelah mempelajari materi mengenai peranan Sutan Sjahrir dalam Pemerintahan Indonesia!

b. Penilaian proses

- Jenis tagihan : Laporan tertulis

Contoh :

Buatlah karangan minimal 3 halaman dengan tema ”Strategi Sutan Sjahrir dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia”.

- Lembar penilaian afektif

No	Nama	Menghargai teman	Mengambil giliran	Mengajukan pertanyaan	Mempersentasi-kan hasil	Menjawab pertanyaan	Mendengarkan dengan aktif	Jumlah

Kriteria penilaian menggunakan skala sikap 1:5 dengan kriteria :

- Skor 1 : Pasif, tidak kooperatif dan tidak menghargai teman
- Skor 2 : Pasif, tidak kooperatif, tetapi dapat menghargai teman
- Skor 3 : Pasif, kooperatif dan dapat menghargai teman
- Skor 4 : Aktif, kooperatif dan dapat menghargai teman
- Skor 5 : Aktif, sangat kooperatif, dan dapat menghargai teman

$$N = \frac{\text{Jumlah Skor}}{25} \times 100 \%$$

$$NA = \frac{\text{Nilai Proses} + \text{Nilai Hasil}}{2}$$

Keterangan :

N = Nilai

NA = Nilai Akhir

c. Tindak Lanjut

- Siswa dinyatakan berhasil apabila memenuhi standar kelulusan minimal sebesar 65%.
- Siswa diberikan program remidi apabila tidak memenuhi standar kelulusan minimal sebesar 65%.
- Siswa diberikan program pengayaan apabila memenuhi standar kelulusan minimal sebesar 65%.

9. Sumber Bacaan

- Sutan Sjahrir, *Renungan dan Perjuangan*, Jakarta, Djambatan, 1990.
- Rudolf Mrazek, *Sjahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1996.
- Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta, Balai Pustaka, Edisi ke-4, 1993.
- George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Yogyakarta, UNS Press-Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Yogyakarta,2010

Guru Bidang Studi

(Bernarda Prihartanti)